

**Perkembangan Perkebunan  
Kelapa Sawit dan Penyerapan  
Tenaga Kerja :**  
**Kasus Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur**

---

Oleh :  
Sri Rahayu  
Iaila Nagib  
Sumono  
Devi Asiaty

---



PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN  
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
(PPK - LIPI) 2004



## ABSTRAK

---

Tulisan ini bermaksud mengkaji tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan menganalisis penyerapan tenaga kerja sejalan dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur umumnya dan Kabupaten Paser pada khususnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap pekerja di perkebunan kelapa sawit, khususnya terhadap petani plasma kelapa sawit pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR-BUN) di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro.

Perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur mulai berkembang sejak tahun 1982/1983 dengan pola PIR-BUN, oleh PT Perkebunan Nusantara XIII. Sebagai sektor unggulan dan prioritas bagi perekonomian di Kabupaten Paser, perkebunan kelapa sawit mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama sejak dikembangkannya pengelolaan kelapa sawit dengan pola PIR-Swadaya pada tahun 1990 an. Hal ini didukung oleh potensi yang cukup besar terutama ketersediaan lahan yang diperuntukkan bagi kebun kelapa sawit, dan partisipasi masyarakat setempat.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit disamping meningkatkan perekonomian masyarakat, juga menyerap tenaga kerja baik pendatang maupun penduduk setempat. Penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit diharapkan akan meningkat sesuai dengan perkembangan areal luas perkebunan yang direncanakan pemerintah daerah. Meskipun tenaga kerja yang terserap di usaha perkebunan kelapa sawit relatif kecil (rata-rata 2 orang setiap 2 Ha), namun terciptanya kesempatan kerja dapat diperluas karena adanya kegiatan turunan dari hasil produksi kebun kelapa sawit seperti industri pengolahan, perdagangan dan usaha lain yang berkaitan.



## KATA PENGANTAR

---

Penelitian tentang “Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Pasir” dengan kasus petani plasma di perkebunan PIR-BUN, merupakan salah satu penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kependudukan – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK – LIPI) tahun anggaran 2004.

Kajian dalam studi ini berfokus kepada kondisi dan isu penyerapan tenaga kerja, serta prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit. Keberadaan perkebunan kelapa sawit yang pengelolaannya diawali oleh perkebunan pola PIR-BUN telah menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat petani terutama transmigran dari Jawa. Dalam perkembangan perkebunan selanjutnya dengan pola PIR-Swadaya masyarakat lokal turut dilibatkan dengan memanfaatkan lahan petani. Selain itu, perkembangan perkebunan kelapa sawit ini berdampak terhadap pengembangan pabrik pengolahan terutama CPO yang melibatkan sejumlah tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dinamika perekonomian yang terkait dengan perkembangan perkebunan membuka pula kesempatan kerja dibidang lainnya terutama usaha jasa dan perdagangan. Namun demikian, usaha perkebunan kelapa sawit dengan luas lahan yang terbatas (2 hektar per keluarga) belum berhasil meningkatkan kesejahteraan petani, karena fluktuasi harga dan produktivitas yang relatif rendah. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap keberlangsungan dan perkembangan usaha kelapa sawit selanjutnya. Prospek penyerapan tenaga kerja di daerah penelitian, dapat dikembangkan dengan merealisasikan target perkembangan perkebunan kelapa sawit dan tambahan pabrik pengolahan CPO yang masih dibutuhkan di Kabupaten Pasir.

Buku ini merupakan laporan penelitian yang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir sebagai sumber informasi. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari instansi pemerintah, swasta, tokoh masyarakat dan petani kelapa sawit. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas kerjasama tersebut. Penghargaan yang sama juga disampaikan kepada staf peneliti, teknisi serta pihak yang membantu demi selesainya tulisan ini. Meskipun semua anggota peneliti telah berusaha dengan segala kemampuan mulai dari perencanaan sampai penulisan laporan, disadari masih banyak terdapat kekurangan dalam tulisan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tulisan ini.

Jakarta, Desember 2004  
Kepala Pusat Penelitian  
Kependudukan- LIPI

Dr. Ir. Aswatini, MA  
NIP: 320003450



# DAFTAR ISI

---

	Halaman
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan dan Sasaran	5
1.4. Ruang Lingkup	5
1.5. Kerangka Pikir	6
1.6. Metodologi	9
1.6.1. Pemilihan lokasi	9
1.6.2. Teknik pengumpulan data	10
1.6.3. Responden dan informan	12
1.6.4. Analisa data	13
1.6.5. Pelaksanaan penelitian	14
1.6.6. Organisasi penulisan	14
BAB II GAMBARAN DAERAH PENELITIAN	17
2.1. Kondisi Geografis	17
2.1.1. Letak dan kondisi daerah penelitian	17
2.1.2. Jenis dan kondisi tanah	18
2.1.3. Wilayah administrasi	19
2.2. Potensi Sumber Daya Alam	21
2.2.1. Sumber daya lahan	23
2.2.2. Sub-sektor perkebunan	25
2.3. Potensi Sumber Daya Manusia	28
2.4. Sarana dan Prasarana	34
2.4.1. Jalan dan transportasi	34
2.4.2. Lembaga keuangan	35
2.4.3. Koperasi Unit Desa (KUD)	36
2.4.4. Kelompok tani	36
2.5. Kesimpulan	36

BAB III	DINAMIKA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	41
3.1.	Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit	42
3.2.	Kebijakan Daerah dan Iklim Investasi	46
3.2.1.	Kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit	47
3.2.2.	Investor dan iklim investasi	50
3.3.	Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola PIR-BUN	52
3.3.1.	Pola dan sistim pengelolaan	53
3.3.2.	Pola hubungan inti-plasma	54
3.3.3.	Sistim dan pelaku	55
3.3.4.	Perkembangan produksi kelapa sawit	57
3.3.5.	Dinamika pemasaran produksi dan harga	59
3.4.	Peranan Lembaga Ekonomi dan Sosial	64
3.4.1	Peran KUD dalam pengelolaan kelapa sawit	64
3.4.2	Peranan organisasi sosial	66
3.5.	Kesimpulan	67
BAB IV	PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	69
4.1.	Dinamika Penyerapan Tenaga Kerja	69
4.1.1.	Tenaga kerja pada perusahaan Inti PIR-BUN	70
4.1.2.	Tenaga kerja pada perkebunan plasma pola PIR-BUN	71
4.1.3.	Tenaga kerja di Koperasi (KUD)	77
4.1.4.	Tenaga kerja pada PIR-Swadaya	78
4.2.	Karakteristik Sosio Demografi	80
4.2.1.	Jumlah penduduk, jenis kelamin dan umur	80
4.2.2.	Tingkat pendidikan	81
4.3.	Kegiatan di Perkebunan Kelapa Sawit	84
4.3.1.	Persiapan dan penanaman	84
4.3.2.	Pemeliharaan	85
4.3.3.	Pemetikan tandan buah segar (panen)	88
4.4.	Kesejahteraan dan Strategi Kelangsungan Hidup Petani	91
4.4.1.	Pendapatan petani	91
4.4.2.	Pemilikan lahan	95
4.4.3.	Pemilikan barang-barang berharga	96
4.4.4.	Strategi kehidupan petani	96
4.5.	Kesimpulan	98
BAB V	PROSPEK PENYERAPAN TENAGA KERJA TERKAIT PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	101
5.1.	Keberlangsungan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit	102
5.1.1.	Peran petani	104
5.1.2.	Peran perusahaan	105
5.1.3.	Peran koperasi	106



5.1.4.	Pemerintah daerah	108
5.2.	Prospek Pengelolaan Kelapa Sawit: Hulu dan Hilir	111
5.2.1.	Prospek perkebunan kelapa sawit	111
5.2.2.	Prospek industri pengolahan kelapa sawit	115
5.3.	Prospek Penyerapan Tenaga Kerja: Peluang dan Tantangan	118
5.3.1.	Potensi dan kondisi sumber daya alam (SDA)	119
5.3.2.	Kebijakan pemerintah dan sistim birokrasi	122
5.4.	Kesimpulan	125
BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN		129
6.1.	Kesimpulan	129
6.2.	Implikasi Kebijakan	133
DAFTAR PUSTAKA		135



## DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Pasir Menurut Kecamatan Tahun 2002	20
Tabel 2.2	Distribusi dan Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Komoditas di Kabupaten Pasir Tahun 2002.	25
Tabel 2.3	Distribusi dan Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Komoditas di Kabupaten Pasir Tahun 2002.	26
Tabel 2.4	Distribusi dan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasir Tahun 2002.	27
Tabel 2.5	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SLTP/MTs Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasir Tahun 2002.	32
Tabel 3.1	Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Pola Kepemilikan Lahan di Kabupaten Pasir (termasuk Penajam Pasir Utara) Tahun 2002.	44
Tabel 3.2	Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit PIR-Swadaya di Kabupaten Pasir Menurut Tahun Anggaran 1991/1992-2002/2003.	46
Tabel 3.3	Nama Perusahaan Kelapa Sawit, Luas Areal dan Produksi di Kabupaten Pasir.	52
Tabel 4.1	Alasan Responden Pindah Bekerja ke Kebun Kelapa Sawit	74
Tabel 4.2	Luas Pemilikan Lahan Menurut Tahun Kedatangan di Desa Padang Jaya	76
Tabel 4.3	Perbandingan Perekonomian Rumah Tangga Responden Saat ini dan Sebelum Krisis Ekonomi (1997)	77
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin, Desa Padang Jaya	81
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan, Desa Padang Jaya	82
Tabel 4.6	Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden Menurut Umur, Jenis Kelamin	83
Tabel 4.7	Keterlibatan Tenaga Kerja Dalam Pengelolaan Kebun Plasma	90
Tabel 4.8	Pendapatan Petani Menurut Tahun Kedatangan (Persen)	92
Tabel 4.9	Status Pekerjaan Petani Di Luar Perkebunan Plasma Menurut Tahun Kedatangan di Lokasi	93
Tabel 4.10	Jumlah Anggota Rumah Tangga Menurut Pendapatan	94
Tabel 5.1	Luas Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur	114



## DAFTAR GRAFIK

---

		Halaman
Grafik 1	Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Pasir	58
Grafik 2	Produksi Kelapa Sawit Per Bulan di Desa Padang Jaya Tahun 2003	59
Grafik 3	Perkembangan Harga Kelapa Sawit Kabupaten Pasir Tahun 2003	60
Grafik 4	Perkembangan nilai indeks "K" Kabupaten Pasir, 2003	63



## DAFTAR LAMPIRAN

---

	Halaman
Lampiran 1	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994- 2000 (Persen). 38
Lampiran 2	Perkembangan Luas Areal Perkebunan di Propinsi Kalimantan Timur Tahun 1998 s/d 2002. 38
Lampiran 3	Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur 39





### 1.1. Latar Belakang

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang memiliki potensi besar dan bernilai strategis baik dalam perkembangan ekonomi maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Salah satu komoditi strategis dari sub sektor perkebunan adalah kelapa sawit, yang mengalami kenaikan produksi dari 5.380.000 ton menjadi 6.217.000 ton selama tahun 1997-2000. Selama periode yang sama (1997-2000), volume ekspor kelapa sawit juga meningkat dari 3.471.000 ton menjadi 4.689.000 ton (BPS, 2001). Peran penting lainnya adalah dalam hal penyerapan tenaga kerja, karena perkebunan kelapa sawit mampu menciptakan banyak lapangan kerja, baik di perkebunan maupun efek ganda terhadap industri terkait, hulu maupun hilir (Dwinita, 1999). Diperkirakan saat ini terdapat sekitar 3,5 juta tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Apabila diasumsikan setiap pekerja kebun kelapa sawit memiliki anggota keluarga yang terdiri dari satu orang istri dan 2 anak, maka terdapat sekitar 14 juta orang yang menggantungkan kehidupannya dari kegiatan perkebunan kelapa sawit (Dewan Riset Nasional, 2002). Jumlah tenaga kerja yang terlibat akan semakin besar, apabila diperluas dengan kegiatan industri pengolahan yang terkait dengan komoditi kelapa sawit. Dalam perekonomian Indonesia, komoditi kelapa sawit berperan penting baik sebagai penghasil devisa utama maupun sebagai bahan baku dari berbagai industri pengolahan, seperti CPO dan mentega.

Dewasa ini perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami perkembangan baik luas lahan maupun penyebaran lokasinya, sehingga menyebabkan peningkatan produksi yang cukup tinggi. Pada tahun 2000 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah mencapai 3,1 juta hektar dengan kapasitas produksi sekitar 6,7 juta ton. Selama lima tahun terakhir terdapat penambahan areal baru sekitar 230.000 hektar/tahun. Demikian juga persebaran lokasi yang pada tahun 1970-an terkonsentrasi di Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara, telah meluas ke arah kawasan timur Indonesia, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sejak tahun 1990-an, perkebunan kelapa sawit telah meluas ke 17 propinsi di Indonesia. Apabila diasumsikan perkebunan kelapa sawit akan mengalami perkembangan yang sama di masa depan (230.000 hektar/tahun), maka pada tahun 2010, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia akan mencapai 4,8 juta hektar. Hal ini berarti kapasitas produksi juga akan meningkat menjadi sekitar 10,9 juta

ton, yaitu sekitar 35 persen dari proyeksi pangsa pasar dunia. Perkembangan ini akan menempatkan Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit dunia. Diharapkan kondisi tersebut dapat meningkatkan kegiatan ekspor kelapa sawit Indonesia ke berbagai negara seperti Belanda, Amerika Serikat, India, dan Brasil (Dewan Riset Nasional, 2001).

Potensi penyerapan tenaga kerja pada perkembangan perkebunan kelapa sawit selanjutnya dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut. Namun demikian, ketersediaan tenaga kerja baik kuantitas maupun kualitas di beberapa daerah belum tentu sesuai dengan kebutuhan perkembangan kelapa sawit. Sementara perluasan kesempatan kerja di suatu wilayah berpotensi besar menjadi daya tarik bagi tenaga kerja dari luar daerah. Hal ini menjadi peluang dan tantangan yang akan dihadapi pemerintah daerah dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit ke depan, berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja di wilayahnya. Masalah lainnya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja perkebunan, yang dilihat dari segi pendapatan / upah yang diterima relatif masih rendah. Hal ini menjadi faktor pendorong banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di berbagai perkebunan yang kurang profesional dan cenderung dengan biaya tinggi, sehingga menyulitkan Indonesia dalam menghadapi persaingan dengan daerah lain.

Dilaksanakannya OTDA sejak tahun 2000, memberikan kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah dalam berbagai hal, termasuk untuk mengelola sumber daya alam sesuai dengan potensi yang dimiliki serta kebutuhan daerah. Di beberapa wilayah Indonesia, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki keunggulan komparatif, kelapa sawit juga berpotensi untuk perkembangan agro industri (Simanjuntak, 2001). Pengembangan agro industri berbasis komoditi kelapa sawit, selain berpotensi untuk meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit, juga memperluas kesempatan kerja di daerah tersebut. Berdasarkan hasil serangkaian penelitian PPK-LIPI berkaitan dengan otonomi daerah di beberapa daerah, pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kaltim merupakan salah satu prioritas dari pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur diawali dengan Pola PIR dan dilanjutkan dengan melibatkan Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan perkebunan rakyat. Pembangunan perkebunan dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) merupakan usaha pemerintah dalam mengembangkan sub-sektor perkebunan. Usaha ini dipandang perlu sebagai campur tangan pemerintah untuk meningkatkan usaha rakyat. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa perkebunan rakyat memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi gejolak ekonomi (Dirjen Perkebunan, 1992). Sasaran pembangunan sub sektor perkebunan ini merupakan salah satu usaha

pemerintah dalam memecahkan berbagai masalah nasional yang dihadapi bangsa Indonesia, yaitu pengangguran, pendapatan yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, pengembangan ekonomi wilayah, penyebaran penduduk dan peningkatan ekspor non migas (Nuhung, 2003).

Perkembangan Perkebunan pola PIR dengan komoditi kelapa sawit di Kalimantan Timur telah dilakukan sejak tahun 1982/1983, yaitu di Kabupaten Pasir bekerja sama dengan perusahaan milik Negara yaitu PT. Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII). PTPN XIII berfungsi sebagai perusahaan inti dan sekaligus pembina, sedangkan petani peserta adalah sebagai plasma dimana semua rangkaian kegiatannya bergantung pada perusahaan inti. Perusahaan Perkebunan sebagai inti memberikan penyediaan sarana produksi (saprodi), pengolahan dan pemasaran. Sedangkan petani peserta sebagai plasma menghasilkan bahan baku olahan dari hasil perkebunannya yang dijual kepada perusahaan inti. Antara kedua belah pihak yaitu inti dan plasma melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan. Kerjasama ini sesuai Keppres No. 11 tahun 1974 tentang pola PIR-BUN yaitu:

*“ Keppres No.11 tahun 1974 dan SK Menteri Pertanian No. 688/85, bahwa Pola PIR- BUN merupakan suatu pola pengembangan perkebunan untuk mewujudkan sistem kerja sama yang saling menguntungkan antara perkebunan besar dan perkebuann rakyat yang ada di sekitar “*

Seiring dengan era otonomi daerah dan makin pulihnya ekonomi nasional, tampaknya rencana perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur terus berlanjut, dengan Kabupaten Pasir sebagai primadonanya. Meskipun di kawasan tersebut potensi lahan masih cukup luas untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit, namun banyak pihak mencemaskan dampak perkembangan ini, karena sebagian besar izin pembukaan perkebunan kelapa sawit berada di atas areal hutan. Hal ini berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan izin hanya untuk mengambil kayu saja.

Pengakuan akan hak adat, sebagai buah reformasi, di satu sisi menguntungkan masyarakat lokal yang selama ini sering kali terabaikan hak-haknya dalam pemanfaatan lahan Negara. Namun disisi lain, tututan akan hak ulayat, potensial menimbulkan konflik baik antar kelompok masyarakat, maupun antara masyarakat dan perusahaan. Ketidak jelasan aturan hak adat dan melemahnya kekuatan adat sering menimbulkan gejolak dalam masyarakat, karena merasa hak-haknya terabaikan.

Kabupaten Pasir pada saat penelitian memiliki lebih dari separuh luas kebun sawit di Kaltim (64.059,5 Ha). Kawasan ini juga sebagai pionir untuk kelapa sawit di Kaltim, karena pada tahun 1987, PTPN XIII bekerja sama dengan Departemen Transmigrasi merintis PIR-BUN di kawasan ini, dengan mendatangkan transmigran dari Jawa untuk mengelola kebun plasmanya. Pengembangan selanjutnya diarahkan ke perkebunan swadaya masyarakat dengan bantuan dari APBD. Sejalan dengan target propinsi untuk mencapai satu juta hektar, Kabupaten Pasir masih menyediakan lahan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang dapat dikonversi untuk usaha perkebunan, baik yang sudah mendapat ijin lokasi, namun belum terealisasi maupun yang belum memperoleh izin. Bahkan kawasan ini masih memiliki sisa lahan KBNK dan lokasi yang ijin usahanya telah dicabut seluas 278.282 Ha. Namun sejauh mana keseriusan investor dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit, apabila ketersediaan kayu di lahan HPH lebih menarik daripada kelapa sawit?. Konflik yang meluas antara PT Perkebunan Nusantara dengan masyarakat setempat berkaitan dengan klaim tanah adat, potensial menjadi hambatan untuk perkembangan kebun sawit di masa depan.

Berbagai potensi dan permasalahan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut berperan penting dalam menyediakan kesempatan kerja, sehingga dapat membantu mengatasi pengangguran, sekaligus potensial dalam mengurangi tingkat kemiskinan penduduk di kawasan tersebut. Untuk itu diperlukan penelitian tentang penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan penekanan pada perkebunan pola PIR di Kabupaten Pasir.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana kondisi dan isu dinamika perkebunan kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur. Secara rinci penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan:

1. Bagaimana dinamika pengelolaan perkebunan kelapa sawit baik pola PIR-BUN maupun pola lainnya di Kabupaten Pasir.
2. Bagaimana penyerapan tenaga kerja terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan aspek-aspek yang terkait.
3. Bagaimana prospek dan isu penyerapan tenaga kerja dikaitkan dengan peluang dan tantangan ke depan.

### 1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penelitian secara umum adalah mengkaji kondisi dan dinamika pengelolaan perkebunan kelapa sawit, penyerapan tenaga dan prospeknya dalam menghadapi peluang dan tantangan di Kabupaten Pasir, Propinsi Kalimantan Timur. Secara khusus tujuan tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Mengkaji kondisi dan dinamika pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur.
2. Mengkaji penyerapan tenaga kerja dan aspek-aspek terkait serta isu ketenagakerjaan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur.
3. Menganalisis prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit dalam kaitannya dengan peluang dan tantangan ke depan.

Adapun yang menjadi sasaran penelitian adalah:

1. Memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan tentang kondisi dan dinamika pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pasir khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya.
2. Memberikan masukan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan mengenai alternative kebijakan penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit.

### 1.4. Ruang Lingkup

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit baik pola PIR-BUN maupun pola lainnya yang berlokasi di Kabupaten Pasir. Dinamika pengelolaan perkebunan kelapa sawit mencakup pengelolaan kelapa sawit yang dilakukan masyarakat baik melalui pola PIR-BUN dan pola PIR-Swadaya. Penyerapan tenaga kerja dan latar belakang pekerja terutama menggunakan data survei terhadap petani plasma PIR-BUN di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir. Isu yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja selain dari survei juga menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari pengelola perkebunan (instansi pemerintah c.q Dinas Perkebunan, PTPN XIII maupun perusahaan swasta). Sasaran pokok survei adalah petani plasma yang terlibat pada pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN di wilayah tersebut. Penelitian dilakukan pada waktu panen kelapa sawit baru selesai dilakukan, sehingga petani plasma tidak banyak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan

kelapa sawit. Pada saat penelitian dilakukan, umur tanaman kelapa sawit PIR-BUN adalah sekitar 17 tahun dan PIR-Swadaya sekitar 14 tahun.

Proses pengelolaan perkebunan mencakup kegiatan pada masa persiapan, penanaman, pemeliharaan, panen dan pasca panen. Setiap tahapan kegiatan tersebut melibatkan sejumlah tenaga kerja baik pada pengelolaan kebun inti maupun plasma, pekerja staf maupun pelaksana kebun.

Kelapa sawit sebagai salah satu komoditi yang potensial untuk perkembangan agroindustri (usaha pengolahan hasil), juga memungkinkan untuk perluasan kesempatan kerja di samping peningkatan nilai tambah dari produk kelapa sawit. Dengan demikian penelitian juga mencakup isu ketenagakerjaan baik terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit (inti dan plasma), maupun pengolahan hasil lebih lanjut (terutama CPO). Dengan demikian dinamika penyerapan tenaga kerja dan isu ketenagakerjaan dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas baik dari segi potensi maupun prospeknya dengan menekankan pada peluang dan tantangan yang dihadapi baik internal maupun eksternal.

Pelaksanaan metode penelitian di lapangan disesuaikan dengan kondisi internal yang dibatasi oleh waktu, tenaga dan biaya. Pemilihan lokasi, waktu penelitian dan penggunaan asisten peneliti di lapangan juga mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerah penelitian menjelang dan selama proses berlangsungnya Pemilihan Umum.

### 1.5. Kerangka Pikir

Sub sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sumber daya daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR, tenaga kerja merupakan determinan utama bagi perkembangan dan kelangsungan usaha perkebunan. Pola PIR dalam pengelolaan perkebunan merupakan prakarsa Bank Dunia dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan pada sub sektor perkebunan terutama komoditas ekspor. Pertumbuhan ekspor perkebunan diharapkan dapat merangsang budidaya perkebunan sehingga dapat menciptakan kesempatan kerja baru bagi petani yang tinggal di sekitar perkebunan dan mengelola kebun milik sendiri. Namun demikian, dari hasil studi yang dilakukan oleh Litbang Perkebunan sebelumnya (Dirjen Perkebunan, 2002) menunjukkan bahwa dinamika perkembangan pola PIR sangat tergantung pada faktor luar seperti perusahaan yang merupakan faktor dominan dalam penentuan harga. Keadaan ini berpengaruh terhadap kelangsungan usaha dan penyerapan tenaga kerjanya.

Sejalan dengan permasalahan tersebut maka perlu diketahui sejauh mana kondisi, dinamika dan isu penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit. Beberapa aspek terkait dengan penyerapan tenaga kerja meliputi kuantitas, kualitas, aktifitas, dinamika dan kesejahteraan petani plasma. Pengembangan aspek-aspek tersebut berperan penting dalam meningkatkan kesiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan ke depan.

Kerangka kajian penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit pola PIR tidak dapat lepas dari pola hubungan antara inti dan plasma, terutama dalam kelangsungan usaha perkebunan tersebut. Sedangkan dalam kaitan dengan penyerapan tenaga kerja, petani dan keluarganya terlibat dalam tahapan kegiatan perkebunan plasma. Penyerapan tenaga kerja di plasma dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal meliputi potensi SDA dan potensi kesiapan SDM, permodalan dan teknologi. Faktor-faktor tersebut berpengaruh langsung terhadap perkembangan plasma serta kemampuan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Pada tahap awal pengelolaan perkebunan plasma dilaksanakan dengan keterbatasan modal, teknologi sederhana dan penggunaan tenaga kerja tanpa harus memenuhi persyaratan kualitas tertentu. Keadaan ini memudahkan petani untuk terlibat langsung dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sebagai petani plasma. Bagi daerah otonom, seperti Kabupaten Pasir yang berpotensi dalam pengembangan sub sektor perkebunan, akan menjadi alternative kebijakan daerah tersebut. Sedangkan faktor eksternal yang dianggap berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja meliputi kebijakan pemerintah, pemasaran, iklim investasi, kelembagaan ekonomi, dan faktor sosial budaya. Berbagai faktor internal maupun eksternal tersebut akan mendorong perkembangan perkebunan kelapa sawit (inti dan plasma), sehingga akan berpengaruh terhadap perluasan kesempatan kerja baik lingkup perkebunan maupun industri pengolahan CPO.

Globalisasi memungkinkan peningkatan mobilitas tenaga kerja, sehingga potensial memunculkan persaingan tenaga kerja setempat dengan para pendatang baik dari dalam maupun luar negeri. Tantangan tersebut dapat dijadikan modal bagi daerah otonom untuk memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja setempat dalam menghadapi persaingan. Partisipasi penduduk setempat dalam memanfaatkan peluang kerja, akan menciptakan rasa keadilan, sehingga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial antara pendatang dan penduduk setempat. Melalui keterlibatan masyarakat lokal dalam penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit, diharapkan akan membantu daerah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan di wilayah tersebut.

Berdasarkan undang-undang otonomi daerah (OTDA) No 22 dan 25 tahun 1999, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam mengelola bidang pemerintahan, perencanaan pembangunan nasional daerah, serta pengelolaan sumber daya alam nasional yang tersedia di wilayahnya. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan “daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Hal ini berarti pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi pembangunan di wilayahnya harus mempertimbangkan keberlangsungan pemanfaatan sumber daya alam bagi pengembangan ekonomi daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Dilihat dari ketersediaan lahan secara fisik di Kabupaten Pasir dan Kalimantan Timur pada umumnya dapat dinyatakan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit masih sangat potensial. Sebagian lahan yang sudah memiliki ijin lokasi merupakan hutan yang dikonversikan ke perkebunan kelapa sawit (Casson, 2003 : 292). Pemanfaatan lahan hutan untuk perkebunan tersebut telah meningkatkan konflik sosial antara perusahaan-perusahaan besar dengan masyarakat lokal. Para investor menghadapi kendala dalam merealisasikan pengembangan kelapa sawit sesuai dengan rencana besar daerah, karena dua faktor utama yaitu konflik sosial dan lemahnya infrastruktur (Casson, 2003). Kualitas SDM merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kelapa sawit.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit potensial menyerap tenaga kerja besar baik melalui perluasan perkebunan maupun melalui pengembangan industri hilir (agro- industri terkait). Penyerapan tenaga kerja pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir tidak terlepas dari latar belakang sosial demografi petani, dinamika tenaga kerja dalam perkebunan, kegiatannya serta kesejahteraan para petani. Salah satu tujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir adalah untuk menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Bagaimana penyerapan tenaga yang terserap sangat ditentukan oleh perkembangan pengelolaan perkebunan kelapa sawit baik dilihat dari peningkatan areal tanaman kelapa sawit maupun peningkatan produksi kelapa sawit yang dihasilkan. Sedangkan kualitas SDM petani dibidang perkebunan relatif kurang, hal ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan perkebunan kelapa sawit, sehingga juga berpengaruh terhadap produktivitas yang akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani kelapa sawit pada umumnya. Keteringgalan SDM lokal juga berpengaruh terhadap keberlangsungan pengembangan kelapa sawit. Dengan semakin banyaknya daerah menghasilkan kelapa sawit, persaingan pasar kelapa sawit akan semakin ketat baik di tingkat domestic maupun global. Untuk itu dibutuhkan pemberdayaan petani sehingga dapat mengelola perkebunan secara profesional.



Kelapa sawit di Indonesia mempunyai prospek yang cerah, karena didukung oleh pasar yang prospektif baik domestic maupun global. Kebijakan umum daerah Kabupaten Pasir di bidang perkebunan antara lain membangun perkebunan yang berorientasi kepada pasar melalui peningkatan inisiatif dan partisipasi masyarakat. Demikian pula kebijakan peningkatan daya saing kelapa sawit dioperasionalkan melalui upaya peningkatan produksi dan produktivitas, efisiensi, kualitas dan promosi. Dalam merealisasikan kebijakan perkebunan yang berorientasi pasar, maka pilihan terhadap pengembangan kelapa sawit sebagai primadona pembangunan Kabupaten Pasir adalah tepat, karena komoditi ini memiliki peluang pasar yang besar, baik dalam negeri maupun untuk ekspor. Realitas yang dihadapi oleh Kabupaten Pasir dan Kalimantan Timur pada umumnya antara lain kondisi lahan, ketersediaan benih unggul di daerah, penetapan harga pasar yang didominasi perusahaan, serta tidak adanya sistem kredit untuk usaha perkebunan dengan bunga murah, sehingga perkembangan usaha menjadi lambat. Kebijaksanaan harga selama ini kurang menguntungkan petani dan produktivitas relatif rendah, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan petani untuk mengembangkan perkebunan yang dimiliki saat ini. Diperlukan kebijakan untuk mengatasi tantangan tersebut, agar keberlangsungan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit mencapai target yang direncanakan. Dengan demikian prospek penyerapan tenaga kerja sub sektor perkebunan kelapa sawit maupun sektor lainnya sangat ditentukan oleh keseriusan pama dalam mengelola komoditi tersebut, sehingga potensi pasar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

## **1.6. Metodologi**

Penelitian di Kalimantan Timur merupakan salah satu dari tiga penelitian sejenis yang dilakukan di tiga propinsi, yaitu Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur. Tiga lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan perbedaan masa perkembangan dan luas areal perkebunan kelapa sawit. Propinsi Sumatera sebagai lokasi perkebunan kelapa sawit tertua dan terluas dan Kalimantan Timur merupakan perkebunan kelapa sawit yang relatif baru dan luas areal paling kecil.

### **1.6.1. Pemilihan lokasi**

Penelitian untuk Propinsi Kalimantan Timur difokuskan di Kabupaten Pasir yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas dan sebagai pionir perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Disamping itu, pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN yang terdiri

dari beberapa distrik terdapat di Kabupaten Pasir. Untuk survei dilakukan di salah satu distrik PIR-BUN yaitu Long Pinang yang berlokasi di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaru. Desa ini dipilih dengan pertimbangan efisiensi yaitu lokasi mudah dicapai dari kota kecamatan. Disamping itu, berdasarkan informasi dari Dinas Perkebunan Tingkat Kabupaten, maupun perusahaan PTPN XIII maka ditetapkan Desa Padang Jaya sebagai lokasi survei. Dari lokasi ini peneliti juga relatif mudah untuk menjangkau lokasi lainnya seperti lokasi PIR-Swadaya, kota kecamatan dan kota kabupaten. Selama penelitian peneliti tinggal untuk sementara di lokasi perkebunan plasma.

### 1.6.2. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), kajian bersama dengan beberapa instansi yang terkait, dan observasi atau pengamatan terfokus selama penelitian lapangan. Data primer terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner/daftar pertanyaan yang terstruktur, dan telah dipersiapkan sebelumnya. Kuesioner disusun berdasarkan variabel yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang disusun bersifat semi terbuka, meliputi aspek karakteristik sosial demografi responden, kegiatan ekonomi responden terutama berkaitan dengan pekerjaan di perkebunan kelapa sawit, kualitas tenaga kerja dan kesejahteraan keluarga responden.

Pengumpulan data kualitatif dilakukan oleh tim peneliti, melalui wawancara mendalam, kajian bersama dan diskusi kelompok terhadap beberapa informan yang relevan dengan permasalahan penelitian dan dipilih secara purposif. Untuk memperoleh kejelasan permasalahan atau isu, pemilihan informan juga dilakukan secara *snow ball*, sehingga dapat memperoleh data secara komprehensif sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berisi variabel pokok dan sub variabel dari permasalahan penelitian yang berkembang selama di lapangan. Pedoman wawancara telah dipersiapkan sebelumnya melalui proses diskusi intensif diantara tim peneliti. Variabel yang digunakan dalam pedoman wawancara dipilih variabel yang dapat menjawab permasalahan penelitian secara mendalam. Hasil wawancara mendalam berupa catatan lapangan (*field note*), dan beberapa wawancara juga dibantu dengan alat perekam wawancara (*tape recorder*).

Pengumpulan data sekunder yang merupakan data kuantitatif dilakukan sebelum dan selama penelitian lapangan. Data ini diperoleh dari berbagai sumber antara lain :

BPS Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda berupa Statistik Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Timur Dalam Angka

Dinas Perkebunan baik Propinsi Kalimantan Timur maupun Kabupaten Pasir berupa Statistik Perkebunan Kabupaten Pasir Bappeda Kabupaten Pasir berupa Kabupaten Pasir Dalam Angka, Renstra dan Properda Kabupaten Pasir

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasir berupa Data Tenaga Kerja yang terserap di Perkebunan Kelapa Sawit

Universitas Mulawarman berupa laporan hasil-hasil penelitian terkait yang pernah dilakukan selama ini.

Data sekunder lainnya diperoleh berdasarkan tinjauan kepustakaan yang relevan dengan tujuan penelitian yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Hasil penelitian yang relevan seperti penelitian tentang PIR-BUN di daerah lain, diperoleh dari toko buku. Sedangkan jurnal yang relevan tentang perkebunan kelapa sawit, telah diperoleh dari Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur.

Diskusi kelompok (*semacam Focus Group Discussion*) dilakukan terhadap sekelompok pemuda setempat yang pada umumnya berpendidikan SLTA, merupakan keluarga transmigran dan yang pada umumnya bekerja membantu orang tua di kebun plasma atau sebagai buruh pada perkebunan kelapa sawit milik petani lainnya. Diskusi difokuskan pada permasalahan dinamika penyerapan ketenaga kerjaan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit, dan kegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan oleh petani plasma beserta keluarganya. Metode penelitian ini digunakan untuk lebih mengklarifikasi berbagai isu yang ditemukan di lapangan terkait dengan subyek penelitian, sehingga diperoleh obyektivitas dari suatu permasalahan atau isu yang berkembang selama penelitian.

Kajian bersama telah dilakukan terhadap beberapa informan terutama pejabat pemerintah daerah yang terdiri dari berbagai sektor terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Kajian bersama ini terselenggara atas kerja sama dengan Bappeda dan dilakukan di Kantor Bappeda. Beberapa pihak yang hadir dalam kajian bersama tersebut antara lain perwakilan dari bidang tenaga kerja Bappeda, Dinas Nakertrans, Dinas Diknas, Dinas Perkebunan, PTPN XIII, Dinas Kehutanan, dan Dinas Perindagkop. Metode ini digunakan dengan maksud dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atau

recheck terhadap informasi atau isu-isu ketenagakerjaan di perkebunan kelapa sawit yang telah kita peroleh selama penelitian. Melalui diskusi antara tim peneliti dengan para informan, dimungkinkan adanya masukan untuk melengkapi informasi atau mengklarifikasi berbagai isu dan permasalahan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan / petani plasma dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Observasi atau pengamatan dilakukan selama berada di lokasi penelitian dengan memfokuskan pada berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit (termasuk kegiatan percobaan menanam benih kelapa sawit di lokasi), fasilitas dan akses tentang kegiatan sosial ekonomi serta sarana prasarana pendukung (infra struktur), lingkungan sekitar perkebunan kelapa sawit dan kondisi kesejahteraan petani pada umumnya. Pengamatan terfokus ini untuk melengkapi informasi yang telah diperoleh sebelumnya dari wawancara..

### **1.6.3. Responden dan informan**

Responden dalam penelitian ini adalah kepala rumah tangga / kepala keluarga yang terlibat dalam pekerjaan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN sebagai petani plasma. Survei dilakukan terhadap 150 keluarga petani plasma dari 346 keluarga yang terdiri dari transmigran dan penduduk local, dipilih secara random sampling. Dalam pelaksanaan survei tim peneliti dibantu oleh 8 orang pewawancara yang diseleksi dari tenaga setempat (lulusan SLTA), dan melalui proses pelatihan sebelumnya di lapangan. Dipilihnya kepala rumah tangga sebagai responden karena dianggap lebih mengetahui dan memahami tentang semua kegiatan anggota rumah tangganya, baik di perkebunan kelapa sawit maupun kegiatan ekonomi lainnya. Informasi yang diperlukan dari responden adalah gambaran faktual tentang latar belakang sosio demografi petani, kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit serta kegiatan ekonomi keluarga lainnya yang dilakukan untuk kesejahteraan keluarga responden.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap beberapa informan yang relevan dengan subyek penelitian dan dapat memberikan informasi tentang permasalahan atau isu-isu yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dan *snow-balling*, baik di kalangan birokrasi pemerintahan daerah (kepala dinas), perusahaan (PTPN dan swasta), maupun di kalangan petani kelapa sawit (petani plasma dan swadaya).. Beberapa informan yang

telah berhasil diwawancarai secara mendalam baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten antara lain :

1. Ketua Bappeda Propinsi Kalimantan Timur
2. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur
3. Ketua Litbang Universitas Mulawarman
4. Ketua Bappeda Kabupaten Pasir
5. Sekretaris Bappeda Kabupaten Pasir
6. Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir
7. Kepala Sub Dinas Usaha Tani Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasir
9. Kepala Sub Dinas Industri Dinas Perindag Kabupaten Pasir
10. Ketua UPP Kecamatan Kuaro, Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir
11. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pasir
12. Ketua Lembaga Adat Kabupaten Pasir
13. Direktur Kebun Tajati PT Perkebunan Nusantara XIII
14. Kepala Perwakilan PT Alam Raya (Perusahaan Swasta) di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir

Adapun beberapa informan yang berhasil diwawancarai di lokasi penelitian khususnya di lokasi kebun plasma PIR-Bun antara lain :

1. Ketua KUD Desa Padang Jaya
2. Ketua salah satu Kelompok Tani di Desa Padang Jaya
3. Tokoh-tokoh masyarakat seperti mantan KUPT/ Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi, pengusaha pembibitan kelapa sawit dan tokoh agama.
4. Beberapa petani plasma dari kalangan transmigran baik yang dianggap berhasil secara ekonomi, maupun yang kurang berhasil..
5. Beberapa petani kelapa sawit plasma dari masyarakat local dan dari PIR Swadaya

#### **1.6.4. Analisa data**

Analisa data dan informasi yang telah terkumpul dilakukan secara deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan penelitian. Data primer setelah dilakukan editing baik di lapangan maupun di kantor, kemudian diolah dan ditabulasi melalui proses pengolahan data dengan sistem computer. Selanjutnya dari data-data frekuensi yang telah ada, dilakukan penggabungan beberapa variable yang relevan dan kemudian dilakukan system tabulasi silang. Hasil tabulasi dan data kualitatif kemudian dianalisa untuk mendapatkan gambaran umum tentang kondisi ketenagakerjaan dan penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit, fenomena dan isu

yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja dan prospeknya. Sedangkan data sekunder dapat memberikan gambaran tentang potensi yang ada di wilayah propinsi maupun kabupaten. Disamping itu juga dapat digunakan sebagai penunjang / pendukung dan perbandingan dalam menganalisis temuan-temuan di lokasi penelitian. Gabungan data dan informasi dari berbagai cara ini saling menunjang, sehingga dapat memperkaya analisa untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

#### **1.6.5. Pelaksanaan penelitian**

Pelaksanaan tahap-tahap penelitian dilakukan oleh tim peneliti ketenagakerjaan PPK-LIPI, yakni dari tahap penyusunan proposal, rencana penelitian, kegiatan penelitian di lapangan dan penulisan laporan. Tahap pengolahan data survei dilakukan oleh staf computer PPK-LIPI didampingi oleh peneliti yang terlibat pada lokasi penelitian bersangkutan. Untuk setiap lokasi penelitian (satu propinsi), melibatkan empat orang peneliti dengan beragam latar belakang disiplin ilmu (ekonomi, studi kependudukan, sosiologi, anthropologi dan statistik). Keragaman ini diharapkan dapat saling mengisi dalam analisa data, sehingga diharapkan studi ini dapat memperoleh hasil yang komprehensif dari beragam perspektif. Selain tim peneliti, dalam berbagai diskusi atau lokakarya/seminar juga melibatkan para pakar terkait untuk memperkaya analisa. Kegiatan lapangan dilakukan selama 14 hari kerja, yang dilakukan oleh tim peneliti PPK-LIPI dibantu oleh beberapa tenaga setempat sebagai pewawancara yang telah diseleksi sebelumnya, memperoleh pelatihan untuk memahami isi kuestioner dan melaksanakan di lapangan. Mempertimbangkan keterbatasan waktu dan tenaga di lapangan, maka dilakukan strategi pelaksanaan kegiatan lapangan secara efektif dan efisien, seperti melakukan pembagian kerja antar tim, menjaga kedisiplinan dan memelihara *team work* selama di lapangan. Disisi lain, persiapan lapangan yang dilakukan sebelumnya seperti adanya instrumen penelitian, rancangan penulisan laporan penelitian serta pengalaman sebelumnya dalam berbagai penelitian, menjadi bekal yang bermanfaat dalam mengatasi permasalahan di lapangan, dan mencari informasi dan data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **1.6.6. Organisasi penulisan**

Tulisan ini terdiri dari enam bagian. Setelah pendahuluan pada bagian pertama, bagian kedua merupakan uraian tentang seting daerah penelitian yang berisi pembahasan mengenai latar belakang daerah penelitian dari

tingkat propinsi sampai dengan tingkat desa yang menjadi lokasi penelitian. Uraian tentang seting ini menekankan pada kondisi geografis, potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana sosial ekonomi yang menunjang pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit.

Bagian ketiga berisi tentang dinamika perkebunan kelapa sawit yang menekankan pada perubahan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini baik dilihat dari segi waktu maupun ruang. Dari segi waktu dibahas mengenai perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir, meliputi kebijakan dan iklim investasi, pengelolaan perkebunan kelapa sawit baik secara makro maupun mikro (dari tingkat propinsi sampai desa). Pada bagian akhir bab ini dibahas tentang peran dan fungsi kelembagaan yang ada di perkebunan baik lembaga sosial (seperti kelompok tani) maupun lembaga ekonomi (seperti KUD dan Bank).

Bagian keempat menekankan pada penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit dan faktor-faktor yang berkaitan menurut pola pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya bagian ini membahas keadaan sosial demografi dan kegiatan yang dilakukan petani plasma di perkebunan kelapa sawit dari masa persiapan sampai masa panen/paska panen. Bab ini diakhiri dengan pembahasan tentang kesejahteraan dan strategi kelangsungan hidup petani plasma.

Bagian kelima membahas prospek penyerapan tenaga kerja dalam kaitan dengan keberlangsungan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir pada khususnya dan Kaltim pada umumnya. Pembahasan menekankan pada beberapa hal terkait dengan prospek penyerapan tenaga kerja, yaitu peran dan kondisi *stakeholder* terkait dengan keberlangsungan pengelolaan kelapa sawit, pengembangan industri perkebunan kelapa sawit dari hulu ke hilir. Bagian akhir tulisan akan membahas peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan kelapa sawit terkait dengan prospek penyerapan tenaga kerja, serta isu pokok penyerapan tenaga kerja sebagai kesimpulan.

Bagian keenam yang merupakan akhir dari tulisan berisi tentang kesimpulan dan implikasi kebijakan. Bagian ini menekankan pada benang merah dari pembahasan bab-bab sebelumnya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Sebagai penutup tulisan akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan di daerah tentang kebijakan penyerapan tenaga kerja terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir.





**GAMBARAN DAERAH PENELITIAN**

Studi tentang perkembangan perkebunan kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja merupakan dinamika penyerapan tenaga kerja terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dilihat dari perspektif makro dan mikro. Secara makro studi ini melihat permasalahan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan penyerapan tenaga kerja pada lingkup propinsi dan kabupaten. Sedangkan dari perspektif mikro menekankan pada studi kasus petani plasma yang terlibat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola PIR-BUN di daerah transmigran yaitu Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Pasir. Bagian ini mencakup faktor-faktor yang mendukung penyerapan tenaga kerja terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian seperti: kondisi geografis, potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana sosial ekonomi. Dalam hal ini, bagian ini menekankan pembahasan pada ketersediaan faktor-faktor tersebut dalam mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit dan penggunaan tenaga kerja, baik di lokasi penelitian yaitu Desa Padang Jaya maupun wilayah sekitarnya yaitu Kecamatan Kuaro dan Kabupaten Pasir pada umumnya.

**2.1. Kondisi Geografis****2.1.1. Letak dan kondisi daerah penelitian**

Propinsi Kalimantan Timur yang luasnya sekitar 1,5 kali Pulau Jawa dan Madura, merupakan wilayah yang strategis, karena letaknya yang terbuka di sepanjang pantai bagian timur Pulau Kalimantan. Wilayah ini berbatasan langsung di sebelah utara dengan Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak. Sedangkan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi dan Selat Makasar yang merupakan pintu gerbang ke Indonesia bagian Timur. Wilayah Kalimantan Timur yang luas arealnya sekitar 245.238 km<sup>2</sup> terdiri dari 12 Daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Pasir, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kertanegara, Berau, Malinau, Bulungan, Nunukan, Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Bontang.

Kabupaten Pasir dengan ibukota Tanah Grogot terletak di bagian selatan Propinsi Kaltim, berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Kutai, sebelah timur dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Selat Makasar, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan khususnya

Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tabalong. Letak Kabupaten Pasir yang tepat diperbatasan kedua propinsi Kaltim dan Kalsel, menempatkan wilayah ini sebagai pintu gerbang yang menghubungkan kedua propinsi. Posisi Kabupaten Pasir yang strategis ini didukung oleh keberadaan jalan negara yaitu Trans Kalimantan yang melalui wilayah ini tepatnya di Kecamatan Kuaro, serta keberadaan pelabuhan laut -Teluk Adang, yang memudahkan hubungan ke luar melalui transportasi laut. Dengan kedua prasarana tersebut Kabupaten Pasir merupakan wilayah yang relatif terbuka dan dapat dijangkau secara lebih efektif melalui sistem transportasi laut maupun darat.

Berdasarkan data dari Kabupaten Dalam Angka 2002, Kabupaten Pasir terdiri dari lahan yang berbukit-bukit dengan ketinggian kurang dari 500 m di atas permukaan laut. Wilayah ini juga memiliki beberapa sungai yang relatif besar dan bermuara ke Selat Makasar, antara lain Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Tekale (430 Km), Sungai Kerang (190 Km) dan Sungai Apar Besar (95 Km). Seperti halnya sungai besar lain di Pulau Kalimantan, sungai-sungai tersebut berperan strategis baik sebagai sarana perhubungan antar wilayah maupun sebagai sarana pengairan dan penangkapan ikan. Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Pasir terdiri dari dua bagian wilayah, yaitu:

- (1) Bagian Timur, luasnya mencapai hampir 70 persen dari luas kabupaten, merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang, memanjang dari arah utara hingga ke selatan. Wilayah ini terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai yang berhadapan langsung dengan Selat Makasar.
- (2) Bagian Barat yang luasnya mencapai sekitar 30 persen dari luas kabupaten, merupakan daerah yang bergelombang, berbukit dan bergunung sampai ke perbatasan Propinsi Kalimantan Selatan.

### 2.1.2. Jenis dan kondisi tanah

Jenis tanah dengan zat organik yang terkandung di dalamnya dapat berpengaruh pada kesuburan tanah dan kesesuaian tanah dengan jenis tanaman tertentu. Oleh karena itu, penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan harus disesuaikan dengan jenis tanah, luasan dan sebarannya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Pasir relatif beragam, sehingga berpengaruh terhadap kesesuaian pemanfaatannya untuk perkebunan kelapa sawit. Beberapa jenis tanah di wilayah ini seperti dijelaskan dalam Properda Kabupaten Pasir 2001-2005 dapat dikategorikan sebagai:

- *Tanah Aluvial*. Jenis tanah ini relatif subur karena komposisi mineral yang terkandung di dalamnya. Penyebaran jenis tanah alluvial terbatas pada daerah yang memungkinkan terjadinya sedimentasi dari

sungai. Jenis tanah ini sangat cocok sebagai media tanam untuk perkebunan kelapa sawit karena memiliki drainase yang baik. Di Kabupaten Pasir jenis tanah ini luasnya mencapai 182.250 Ha, menyebar pada wilayah dataran rendah, landai dan bergelombang di bagian timur pada lembah-lembah dan aliran sungai.

- *Tanah Podsolik Merah Kuning*. Jenis tanah ini dianggap kurang subur untuk pertanian. Jenis tanah ini luasnya mencapai 628.850 Ha dan terdapat pada daerah bergelombang dan berbukit pada kiri dan kanan jalan poros Penajam-Kuaro, menyebar ke bagian selatan yaitu bagian barat Kecamatan Pasir Belengkong dan bagian selatan Kecamatan Tanjung Aru.
- *Tanah Campuran*. Jenis tanah ini terdiri dari podzolik coklat/endozol, podzolik litozol, organozol/orgono gambut, podzolik dan regozol/glizol/meditem. Jenis tanah ini juga dikategorikan sebagai tanah yang kurang subur, sehingga kurang baik untuk pertanian. Penyebaran jenis tanah ini cenderung ke arah bagian barat dan utara Kabupaten Pasir.

Intensitas curah hujan di suatu wilayah juga berpengaruh terhadap kesuburan tanah yang cukup penting dalam menjaga kesinambungan dan pengembangan tanaman perkebunan, seperti kelapa sawit. Di wilayah Kabupaten Pasir, sebagian besar wilayah dapat dikategorikan mempunyai intensitas curah hujan yang dianggap cukup baik untuk pertumbuhan kelapa sawit. Suatu wilayah dengan iklim dan curah hujan antara 1500 - 4.000 mm/tahun, dianggap cukup baik untuk pertumbuhan kelapa sawit, dan mampu mencapai hasil optimal apabila curah hujan mencapai 2000 - 3000 mm/tahun. Di Kabupaten Pasir, curah hujan sangat bervariasi namun sebagian besar wilayah mempunyai intensitas curah hujan terbesar antara 1.188 sampai 2.917 mm/tahun. Curah hujan yang cukup besar terjadi pada bulan Nopember sampai dengan bulan Maret, dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan Januari. Sedangkan curah hujan terkecil terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Agustus.

### 2.1.3. Wilayah administrasi

Sampai tahun 2002, Kabupaten Penajam Pasir Utara masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Pasir. Sejak dilakukan pemekaran wilayah pada tahun 2002, Kabupaten Pasir dipecah menjadi dua bagian, yaitu Kabupaten Pasir sekarang dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Setelah pemekaran ini, luas wilayah Kabupaten Pasir menjadi 11.603.94 Km<sup>2</sup> dan mencakup 8 kecamatan. Wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Long Kali yaitu sekitar 21 persen dari wilayah Kabupaten Pasir, dan wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot sekitar 3 persen (Table 2.1). Dilihat dari jarak antara

kecamatan dengan ibukota kabupaten (Tanah Grogot), kecamatan terjauh adalah Kecamatan Muara Komam (86 Km), diikuti dengan Kecamatan Long Kali (77 Km). Sedangkan kecamatan terdekat dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Pasir Balengkong (5 Km). Kecamatan Kuaro, di mana terdapat lokasi studi Desa Padang Jaya, berjarak sekitar 28 Km dari Tanah Grogot. Semua lokasi di Kabupaten Pasir dapat ditempuh dengan transportasi darat.

Tabel 2.1  
Luas Wilayah Kabupaten Pasir Menurut Kecamatan Tahun 2002.

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Batu Sopang	1.966,63	16,95
2.	Tanjung Aru	2.221,31	19,14
3.	Pasir Balengkong	990,11	8,53
4.	Tanah Grogot	335,58	2,89
5.	Kuaro	747,30	6,44
6.	Long Ikis	1.204,22	10,38
7.	Muara Komam	1.753,40	15,11
8.	Long Kali	2.385,39	20,56
Kabupaten Pasir		11.603,94	100,00

Sumber: Kabupaten Pasir Dalam Angka, 2000.

Desa Padang Jaya merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuaro yang dipilih sebagai lokasi studi kasus penelitian ini. Lokasi desa ini berjarak sekitar 5 Km dari ibukota kecamatan dan sekitar 32 Km dari ibukota kabupaten. Desa Padang Jaya merupakan salah satu daerah penempatan transmigrasi untuk program PIR-BUN, sehingga kebanyakan penduduk terlibat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit, sebagai petani plasma kelapa sawit pola PIR-BUN, dengan PTPN XIII sebagai perusahaan inti. Wilayah Desa Padang Jaya dengan luas sekitar 12,23 Km<sup>2</sup>, berbatasan di sebelah utara dengan Desa Rangan, sebelah selatan dan timur dengan Kelurahan Kuaro, dan sebelah barat dengan Tanah Negara..Untuk menuju desa ini tersedia prasarana jalan yang sebagian sudah beraspal dan mudah dilalui kendaraan bermotor. Di sepanjang jalan ke lokasi desa, terdapat kebun plasma kelapa sawit milik penduduk baik transmigran maupun masyarakat lokal. Tersedianya akses jalan yang cukup baik ke desa, memungkinkan terjadinya mobilitas masyarakat untuk ke luar dan masuk desa dengan cukup lancar. Namun demikian akses transportasi kendaraan umum yang masuk ke desa hanya tersedia dua kali dalam seminggu. Pada umumnya masyarakat memiliki kendaraan pribadi (sepeda motor), sehingga mobilitas ke kota kecamatan cukup lancar. Demikian pula tersedianya pasar di kota Kecamatan Kuaro, juga memungkinkan berlangsungnya kegiatan ekonomi desa berjalan cukup lancar.

Sejak tahun 1987, Desa Padang Jaya ditempati oleh para transmigran yang umumnya datang dari Jawa. Sebelumnya desa ini bernama Rangan Barat I merupakan daerah pembinaan Departemen Transmigrasi yaitu UPT Rangan Barat I, dan diserahkan ke Pemerintah Daerah Tingkat II Pasir pada tahun 1993. Sejak bulan Juni 2004, Desa Rangan Barat I menjadi Desa Definitif dengan nama Desa Padang Jaya. Oleh karena status sebagai desa definitif masih relatif baru, maka kelengkapan administratif desa masih belum terartasi. Sebagai daerah penempatan transmigran, sebagian besar wilayah desa (1.117,5 Ha) diperuntukkan untuk lahan pertanian yang terdiri dari perladangan, perkebunan, persawahan. Selebihnya adalah lahan untuk perumahan, jalan dan tanah pekuburan. Desa ini masih memiliki lahan seluas 225 Ha yang potensial untuk lahan pertanian.

## 2.2. Potensi Sumber Daya Alam

Propinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu propinsi dalam kategori 'kaya' di Indonesia, karena pemilikan sumber daya alam yang cukup besar, seperti: hasil pertambangan (minyak bumi, gas alam, emas, perak, batu bara), hasil hutan, perkebunan dan perikanan. Eksploitasi sumber daya alam di wilayah Kaltim pada umumnya terutama komoditi minyak bumi dan gas alam selama ini, telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di tingkat regional maupun tingkat nasional. Hal ini dapat dilihat dari besarnya sumbangan sektor tersebut terhadap PDRB Propinsi Kalimantan Timur. Data dari BPS (2001:401) menunjukkan pada tahun 2000, sumbangan terbesar sektor ekonomi terhadap PDRB berasal dari Sektor Pertambangan dan Penggalan (33,58%) dan Sektor Industri Pengolahan (45,47%). Sementara sumbangan Sektor Pertanian hanya sebesar 5,92 persen. Kabupaten Pasir sesuai dengan kondisi wilayahnya yang terdiri dari darat dan laut, merupakan salah satu wilayah di Propinsi Kalimantan Timur yang berperan besar dalam menyumbang PDRB melalui sektor pertanian, khususnya sub-sektor perkebunan.

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Pasir dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber daya laut dan sumber daya darat, sesuai dengan kondisi wilayahnya yang terdiri dari lautan dan daratan. Hasil pertanian terutama sub-sektor perkebunan dan bahan galian seperti batu bara, menjadi andalan perekonomian di Kabupaten Pasir. Berdasarkan PDRB harga berlaku, sumbangan kedua sektor tersebut cukup besar masing-masing 31,31 persen dan 32,76 persen. Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian daerah semakin besar. Selama periode 1997-2000, sumbangan Sektor Pertanian terhadap PDRB menunjukkan peningkatan sementara sumbangan Sektor Pertambangan dan Penggalan mengalami penurunan (Lampiran 1).

Potensi sumber daya alam yang dikategorikan darat terdiri dari hasil hutan, lahan pertanian, termasuk pertanian pangan dan perkebunan, pertambangan dan pariwisata. Hutan merupakan sumber daya yang cukup dominan di Kabupaten Pasir. Berdasarkan penggunaan lahan daratan, pada tahun 2002 peruntukan lahan untuk hutan cukup besar yaitu 1.148.156,15 Ha atau 77% dari luas daratan, termasuk Penajam Pasir Utara (Pasir Dalam Angka, 2002: 15). Hasil produksi sub sektor kehutanan terdiri dari kayu dan non kayu. Hasil berupa kayu terdiri dari kayu log yang dihasilkan oleh HPH dan Non HPH, kayu gergajian, kayu ulin, dan sirap ulin. Sedangkan hasil non kayu terdiri dari semambu dan rotan. Pada saat ini produksi kehutanan mengalami penurunan baik produksi kayu maupun non kayu. Sebagai ilustrasi selama tahun 2001-2002, beberapa jenis kayu mengalami penurunan cukup tajam antara lain kayu bundar dari 374.017,54 m<sup>3</sup> menjadi 30.290,19 m<sup>3</sup>, kayu rotan turun lebih dari 80 persen yaitu dari 43,24 ton menjadi 5 ton. Bahkan sejak tahun 2002, jenis kayu sirap dan kayu ulin tidak lagi memproduksi. Jenis kayu gergajian juga menurun hasilnya meskipun tidak sedrastis lainnya yaitu dari 1.927,23 m<sup>3</sup> menjadi 1.583,36 m<sup>3</sup>. Penurunan produksi hasil kehutanan ini dapat dilihat dari distribusi sektor kehutanan yang mengalami penurunan dari 18,55 persen pada tahun 1994 menjadi 7,21 pada tahun 2000. Penurunan hasil kehutanan ini antara lain juga disebabkan semakin berkurangnya kawasan hutan untuk dikonversikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Namun dalam praktek banyak surat izin untuk perkebunan kelapa sawit, disalahgunakan pemanfaatannya oleh investor dengan hanya mengambil hasil kayu saja, kemudian hutan ditelantarkan kembali. Kasus ini terjadi pada sebagian besar daerah di Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Pasir. Menurut Kepala Dinas Perkebunan Kaltim, sebagian besar perusahaan pemegang izin hanya menjadikan perkebunan kelapa sawit sebagai dalih untuk mengincar kayu. Setelah izin dikantongi, kayu hutan habis dibabat tapi perkebunan kelapa sawit tidak pernah dibuka. Sampai saat ini terdapat 20 perusahaan perkebunan yang telah dicabut izin pemanfatannya, karena pelanggaran tersebut.

Seperti halnya hasil kehutanan, hasil produksi tanaman pangan yang terdiri dari padi dan palawija juga mengalami penurunan. Produksi padi mengalami penurunan dari 81.831 Ton menjadi 81.215 Ton selama tahun 1999- 2000. Lahan potensial untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Pasir seluas 208.913 Ha terdiri dari 493.352 Ha lahan sawah dan 159.562 Ha lahan kering (Properda, 2001-2005: 27). Hal ini disebabkan belum dikelolanya lahan secara maksimal sehingga produktivitasnya relatif rendah. Hasil palawija yang cukup menonjol di Kabupaten Pasir adalah jagung, ubi kayu, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau.

Sebagai daerah yang berbatasan dengan laut dan sungai yang cukup lebar dan panjang, wilayah ini mempunyai potensi yang cukup besar dengan sumber laut dan sungai, seperti hasil perikanan, mineral, wisata bahari, yang semuanya mempunyai nilai ekonomis bagi penduduk di sekitarnya. Usaha perikanan mempunyai prospek yang cukup bagus dan dapat diandalkan bagi pengembangan perekonomian, mengingat sumber daya tersebut bersifat dapat dipulihkan atau berkelanjutan (*renewable resources*). Demikian juga luasnya perairan laut dan darat yang dapat dimanfaatkan di wilayah ini, memungkinkan sumber daya ini dijadikan sebagai mata pencaharian penduduk yang berkelanjutan.. Hasil perikanan terdiri atas perikanan laut (seperti, ikan, udang, kepiting dan kerang-kerangan) dan perikanan darat (seperti, tambak, kolam dan keramba). Pada tahun 2002, luas perairan laut di wilayah ini sekitar 2.250.000 Ha dengan potensi jumlah produksi diperkirakan sebesar 26.100 ton/th, dan baru dieksploitasi sekitar 54,2 persen. Sedangkan wilayah perairan umum yang berupa sungai, danau dan rawa (sekitar 290.645 Ha) berpotensi menghasilkan produksi ikan sebesar 7.501 ton/th, dan baru sekitar 7,4 persen yang sudah di eksploitasi.

### 2.2.1. Sumber daya lahan

Luas wilayah Kabupaten Pasir sekitar 1.493.700 Ha, sebagian besar wilayah terdiri dari daratan (1.391.200 Ha) dan sekitar 102.500 Ha berupa perairan. Dalam usaha meningkatkan potensi dan penggunaannya, sebagian besar sumber daya lahan daratan (sekitar 1.041.071,96 Ha) dialokasikan sebagai Kawasan Budidaya, yang pemanfaatannya seperti tercantum dalam Propperda Kab Pasir 2001-2005, antara lain untuk:

- § *Kawasan Hutan Produksi Tetap*. Kawasan ini merupakan fungsi produksi yang tersebar di Kecamatan Batu Sopang bagian Tengah, Muara Komam bagian Utara, Long Ikis bagian Utara.
- § *Kawasan Hutan Produksi Konversi*. Kawasan ini tersebar di 8 (delapan) kecamatan dan mempunyai potensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan budidaya pertanian pada umumnya, meskipun dengan variasi berbeda.
- § *Kawasan Sawah Irigasi*. perencanaan irigasi ini merupakan ekstensifikasi dari sawah irigasi yang telah tersedia dan lokasinya tersebar di Kecamatan Long Kali, Pasir Balengkong dan Tanah Grogot.
- § *Kawasan Perikanan Tambak*. Rencana kawasan perikanan tambak yang dialokasikan dengan lahan sekitar 3.500 Ha, tersebar di sekitar kawasan Sempadan Pantai, tepatnya di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Tanah Grogot, Pasir Balengkong dan Tanjung Aru.
- § *Kawasan perkebunan*. Rencana alokasi untuk kawasan perkebunan adalah sekitar 151.064,36 Ha (sekitar 9 persen dari luas seluruh wilayah

daratan). Lokasinya tersebar di Kecamatan Long Ikis, Long Kali, Tanjung Aru, Tanah Grogot, Pasir Balengkong dan sebagian Kecamatan Batu Sopang dan Muara Komam. Kawasan perkebunan ini sudah tersedia dan dicadangkan peruntukannya untuk berbagai komoditi perkebunan, terutama kelapa sawit, Bahkan hak pengelolaan sebagian lahan ini telah dilimpahkan pada perusahaan-perusahaan perkebunan, terutama perkebunan negara atau PTP.

- § *Kawasan Pertambangan.* Rencana alokasi kawasan pertambangan sekitar 15.998 Ha (1,06 persen dari luas seluruh daratan), tersebar di Kecamatan Batu Sopang bagian Utara, Tanah Grogot bagian Barat, dan Tanjung Aru bagian Utara. Kawasan pertambangan merupakan kawasan pertambangan batu bara yang telah dicadangkan peruntukannya, dan telah dilimpahkan pengelolaannya pada PT. Kideco Jaya Agung di Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Tanah Grogot, serta PT. BHP Kendilo di Kecamatan Tanjung Aru.
- § *Kawasan Pemukiman Kota.* Kawasan yang luasnya sekitar 2900 Ha (0,19 persen dari luas daratan) ini mempunyai sifat dan ciri khas perkotaan, baik dalam ketersediaan sarana dan prasarana maupun variasi mata pencahariann penduduknya.
- § *Kawasan Pemukiman Transmigrasi.* Kawasan dengan luas sekitar 84.300,00 Ha (5,59 persen dari luas wilayah daratan) ini merupakan kawasan yang ditetapkan peruntukannya untuk menampung para transmigran, dengan lokasi yang tersebar di Kecamatan Tanah Grogot dan Tanjung Aru bagian tengah
- § *Kawasan Pariwisata.* Kawasan ini dianggap mempunyai daya tarik untuk dijadikan obyek wisata di wilayah Kabupaten Pasir.

Berdasarkan pemanfaatannya, Tabel 2.2 menunjukkan bahwa sebagian besar atau sekitar 84 persen lahan di Kabupaten Pasir masih berupa hutan. Sedangkan lahan untuk sub-sektor perkebunan yang menempati urutan terbesar kedua dialokasikan sekitar 8 persen. Hal ini mencerminkan adanya prioritas dalam pengembangan sub-sektor perkebunan sebagai bagian dari pembangunan wilayah ini. Komoditi unggulan dari pengembangan sub-sektor perkebunan di wilayah Kabupaten Pasir adalah kelapa sawit, yang memperoleh dukungan baik dari segi kebijakan pemerintah daerah maupun segi ketersediaan potensi sumber daya lahan seperti lahan hutan maupun lahan kosong/tidak produktif. Sedangkan lahan yang digunakan untuk pertanian tanaman pangan dan perumahan relatif kecil, masing-masing sekitar 4 persen dan sekitar 1 persen. Dengan komposisi pemanfaatan lahan tersebut, wilayah Kabupaten Pasir merupakan daerah dengan hamparan perkebunan kelapa sawit dan hutan yang luas, namun memiliki penduduk yang relatif jarang.



Tabel 2.2  
Alokasi Pemanfaatan dan Luas Lahan Daratan di Kabupaten Pasir

Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Pemukiman	25.041,6	1,08
Pertanian	53.561,2	3,85
Perkebunan	114.217,5	8,21
Perikanan tambak/kolam	5.147,4	0,37
Hutan	1.173.746,8	84,37
Lahan kosong/tdk produktif	29.594,1	2,13
Jumlah	1.391.200,0	100,00

Sumber: Properda Kabupaten Pasir, 2001-2005.

### 2.2.2. Sub-sektor perkebunan

Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas merupakan salah satu prioritas pembangunan di Propinsi Kalimantan Timur disamping pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur. Hasil pertanian yang dikembangkan antara lain komoditi kelapa sawit, kakao, lada, karet, coklat, mete, teh, dan hasil perikanan udang dan hasil laut lainnya. Diantara komoditi tersebut, kelapa sawit merupakan komoditi yang sangat potensial untuk dikembangkan di Kalimantan Timur, dengan areal untuk perkebunan kelapa sawit paling luas dibandingkan areal untuk komoditi perkebunan lainnya. Pada tahun 2002, luas areal perkebunan kelapa sawit sekitar 132.178,5 Ha atau 41,8 persen dari luas perkebunan di Kalimantan Timur. Selama periode 1998-2002 pertumbuhan areal perkebunan kelapa sawit cukup tinggi yaitu 11,08 persen (Lampiran 2). Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit dapat dilihat dari perumusan visi pembangunan '*1 juta hektar kelapa sawit*' untuk Propinsi Kaltim yang akan dilaksanakan selama 15 tahun (2003-2018).

Sub-sektor perkebunan merupakan sektor ekonomi yang berperan cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Pasir. Komoditi perkebunan yang dihasilkan antara lain, kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kopi, lada, kakao. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB mengalami peningkatan dari 2,69 persen menjadi 5,89 persen selama tahun 1994 – 2000. Hal ini menunjukkan pentingnya peran sub-sektor perkebunan dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, sehingga sub-sektor perkebunan menjadi prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Pasir. Hal ini didukung oleh Visi Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir yaitu "*Menjadikan komoditas perkebunan sebagai andalan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasir*". Pembangunan sektor perkebunan di Kabupaten Pasir didukung oleh adanya Perusahaan Besar Negara (PBN) dan Perusahaan Besar

Swasta (PBS) yang menanamkan investasi pada perkebunan kelapa sawit, kakao dan karet.

Kelapa sawit merupakan komoditi yang sangat penting bagi perkebunan di Kabupaten Pasir. Hal ini tercermin dari luas lahan yang menempati urutan teratas, sedangkan lada menempati urutan paling rendah dengan luas 249,6 Ha atau 0,4 persen dari luas lahan perkebunan (Tabel 2.3). Luas areal perkebunan kelapa sawit mencapai 52.226,2 Ha atau 73,6 persen dari total luas perkebunan di Kabupaten pasir. Dominannya areal perkebunan kelapa sawit, disebabkan kelapa sawit merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Pasir sehingga pembangunan perkebunan diarahkan pada pembukaan lahan besar-besaran untuk kelapa sawit..

Tabel 2.3  
Distribusi dan Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Komoditas di  
Kabupaten Pasir Tahun 2002.

Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
Kelapa Sawit	52.226,2	73,6
Karet	8.474,5	12,0
Kelapa Dalam	4.952,3	7,0
Kopi	3.314,9	4,7
Lada	249,6	0,4
Kakao	1.217,0	1,7
Lain-lain	479,6	0,6
Jumlah	70.914,0	100,0

Sumber: Statistik Perkebunan, Kab. Pasir 2002.

Pada saat ini (tahun 2004), perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir merupakan areal terluas di Kalimantan Timur, karena lebih dari separuh perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kaltim berada wilayah Pasir (Kabupaten Pasir dan Penajam Pasir Utara). Tanaman kelapa sawit sudah dikembangkan di beberapa wilayah kabupaten di Kalimantan Timur seperti Kabupaten Pasir termasuk Penajam Pasir Utara, Nunukan, Berao, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Kutai Barat dan Tarakan. Luas areal perkebunan kelapa sawit di wilayah Pasir (termasuk Kabupaten Penajam Pasir Utara) adalah 64.059,5 Ha, diikuti Kutai Timur seluas 31.186 Ha, dan luas lahan terkecil terdapat di Kabupaten Tarakan (12 Ha) (Lampiran 3). Sebagian areal tanaman kelapa sawit sudah mulai memproduksi dan sebagian lain masih dalam tahap penanaman. Tanaman Kelapa sawit yang sudah mulai memproduksi ada di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kutai Timur dan Kabupaten Pasir dan produksi terbesar terdapat di Kabupaten Pasir sebesar 482.021,5 selama periode 1998-2002.

Selama periode 1998-2002, luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir meningkat dari 46.680,19 Ha menjadi 52.226,2 Ha atau meningkat sekitar 12 persen. Areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir tersebar di semua kecamatan, dengan areal kelapa sawit terluas (39,5 persen) terdapat di Kecamatan Long Ikis, dan areal paling kecil terdapat di Kecamatan Muara Komam yaitu 4,00 Ha (0,0%) (lihat Tabel 2.4)

Tabel 2.4  
Distribusi dan Luas Areal Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasir Tahun 2002.

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Persentase
1.	Batu Sopang	310,00	0,59
2.	Tanjung Aru	6.535,00	12,51
3.	Pasir Balengkong	9.880,00	18,91
4.	Tanah Grogot	820,00	1,57
5.	Kuaro	8.281,56	15,86
6.	Long Ikis	20.663,14	39,56
7.	Muara Komam	4,00	0,00
8.	Long Kali	5.732,50	11,00
	Kab. Pasir	52.226,20	100,00

Sumber: Kabupaten Pasir Dalam Angka, 2002.

Salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap produksi kelapa sawit adalah luas lahan yang benar-benar dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit. Perbedaan luas lahan yang dikuasai oleh masing-masing pelaku, di samping faktor lain berpengaruh terhadap komposisi hasil produksi kelapa sawit pada masing-masing pola perkebunan. Sebagian besar produksi kelapa sawit (sekitar 47 persen) dihasilkan oleh Perkebunan Rakyat yang menguasai lahan terluas. Namun produksi kelapa sawit terbesar kedua (32,4%) dihasilkan oleh Perkebunan Besar Negara (PBN) yang menguasai lahan terkecil sesudah Perkebunan Besar Swasta (PBS). Hasil produksi PBS menempati posisi terkecil (20,3%persen), meskipun memiliki luas lahan terbesar kedua sesudah Perkebunan Rakyat. Relatif rendahnya hasil produksi dari PBS, kemungkinan karena pengelolaan kebun yang relatif baru, sehingga belum menghasilkan, atau belum dimanfaatkannya semua lahan yang dikuasai perusahaan swasta. Dengan demikian, perkebunan rakyat masih dominan dalam memberi kontribusi pada perekonomian, meskipun produktivitas kelapa sawit masih lebih rendah dari produktivitas PBN. Data dari dinas Perkebunan Pasir menunjukkan bahwa produktivitas kelapa sawit perkebunan rakyat adalah 12.519,76 Kg/Ha dan produktivitas perkebunan besar negara mencapai 13.367,16 Kg/Ha. Rendahnya produktivitas kelapa sawit pada Perkebunan Rakyat kemungkinan dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang kurang memenuhi standar perusahaan inti, serta kemungkinan penggunaan bibit yang kurang baik.

Pemilihan bibit merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Bibit yang kurang bagus akan menghasilkan buah sawit yang kurang bagus yaitu buah sawit dengan cangkang besar tetapi isinya kecil. Cangkang yang besar memiliki sabut yang tipis sehingga CPO yang dapat dihasilkan relatif sedikit. Demikian pula isi kelapa sawit yang kecil juga menghasilkan minyak inti relatif sedikit.

### 2.3. Potensi Sumber Daya Manusia

Penduduk suatu wilayah merupakan sumber daya manusia yang dapat menjadi penggerak sekaligus kendala dalam pembangunan. Tersedianya sejumlah penduduk merupakan sumber yang potensial dalam menyediakan tenaga kerja yang diperlukan sebagai penggerak dalam pembangunan. Namun jumlah penduduk yang besar dan tidak berkualitas juga dapat menjadi kendala bagi pembangunan di wilayah tersebut. Jumlah penduduk Kalimantan Timur mengalami peningkatan pesat sejak tahun 1990 yaitu dari 1,8 juta menjadi 2,5 juta jiwa pada tahun 2000, meskipun kepadatan penduduk masih relatif rendah yaitu sekitar 12 orang per km<sup>2</sup>. Selama periode 1990-2000 tingkat pertumbuhan penduduk cukup tinggi yaitu diatas 4 persen per tahun (BPS, 1990, 2000). Penyebaran penduduk tidak merata di Daerah Tingkat II, dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam dan kegiatan ekonominya. Pada tahun 2000, jumlah penduduk paling besar terdapat di Kotamadya Samarinda yaitu sebanyak 531.912 jiwa (21%) dan paling kecil terdapat di Kabupaten Malinau yaitu 37.237 jiwa (1,5%).

Kabupaten Pasir termasuk wilayah dengan kepadatan penduduk rendah, yaitu sekitar 15 orang per km<sup>2</sup> (Pasir Dalam Angka, 2002: 43). Pada tahun 2000, jumlah penduduk Pasir (sebelum pemekaran) adalah sebesar 268.761 jiwa atau 10,7 persen dari total penduduk Propinsi Kalimantan Timur, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 4,4 persen per tahun. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup besar ini selain karena faktor kelahiran, kemungkinan besar karena dipengaruhi oleh faktor migrasi masuk (*in migration*). Kabupaten Pasir sudah lama merupakan daerah penerima transmigran, terutama untuk program PIR-BUN. Sebagai daerah yang terbuka dan mempunyai kegiatan di bidang pertambangan, juga merupakan daya tarik bagi pencari kerja dari luar kabupaten atau propinsi. Setelah pemekaran pada tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Pasir terbagi dengan penduduk Kabupaten Penajam Pasir Utara (PPU), yaitu kini menjadi 168.521 jiwa atau mengalami penurunan lebih dari 100.000 jiwa. Penyebaran penduduk untuk masing-masing kecamatan menunjukkan proporsi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tanah Grogot (25,2%) yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten.

Sedangkan proporsi penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Muara Komam (5,8%).

Penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasir terdiri dari penduduk asli/setempat dan pendatang. Jumlah pendatang di kabupaten ini cukup besar karena daerah ini merupakan salah satu daerah tujuan migran yang berasal dari Banjar, Bugis, Jawa, Madura, dan Sumatera (Batak dan Minang) dan daerah lainnya. Disamping itu Kabupaten Pasir merupakan daerah penempatan transmigran yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan daerah lainnya. Berdasarkan informasi dari Kepala Lembaga Adat Pasir, keberadaan orang dari Jawa cukup besar sehingga proporsinya hampir sama dengan proporsi penduduk Pasir asli/lokal (sekitar 40 persen), sedangkan sisanya 20 persen merupakan pendatang dari daerah lainnya.

Penduduk lokal adalah penduduk asli yang merupakan orang Pasir dan sebagian keturunan Bugis. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Lembaga Adat Pasir, keberadaan penduduk keturunan Bugis yang diakui sebagai penduduk lokal berawal dari sejarah pada masa lalu, yaitu adanya perkawinan orang Pasir dengan orang Bugis, sehingga bahasa yang dipakai adalah campuran bahasa Pasir dengan bahasa Bugis. Masyarakat asli yang berasal dari keturunan raja mempunyai title 'Aji' atau 'Andi' bagi yang keturunan Bugis. Dikotomi antara penduduk asli dan pendatang tidak menjadi hal yang perlu dipermasalahkan, karena penduduk yang tinggal di Kabupaten Pasir dianggap sebagai masyarakat Pasir, meskipun tidak semua termasuk Etnis Pasir.

Menurut Iqbal (MI, 2000), Etnis Pasir berasal dari perpaduan 5 (lima) etnis, yaitu Etnis Lembuyat (bagian Barat), Etnis Migi (bagian Utara), Etnis Tajur (bagian Timur), Etnis Bukit Sunggit Buro Mato (bagian Selatan) dan Etnis Pematang (bagian Tengah). Kelima etnis tersebut mempunyai 10 (sepuluh) tanah ulayat, yaitu: (1) Balikpapan; (2) Pagatan; (3) Tanjung Aru; (4) Telakei (Panajam)–Longkali–Kuaro; (5) Batu Kajang–Batu Aji; (6) Sungai Biu daerah Sunggit–Sungai Samu–Kerang Batu Angau; (7) Sungai Batu Kajang–Muara Lusan–Tewei; (8) Sungai Batu Kajang ke ilir disebut daerah setio; (9) Sungai Samu sampai ke Lempesu; (10) Lempesu Ilir–Muara Paser (Muara Kendilo)-Paser Benuwo-Belengkong.

Masalah tanah ulayat di Kabupaten Pasir muncul seiring dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini, yang menyebabkan lahan perkebunan lebih bernilai ekonomi dibandingkan waktu pembukaan lahan. Menurut Kepala Lembaga Adat Pasir, sebagian lahan yang diklaim sebagai tanah Negara merupakan hak adat atau ulayat, tapi pemerintah belum mengakuinya. Seiring dengan diakuinya hak adat atau ulayat, sebagai

buah reformasi, masyarakat lokal menuntut pengembalian lahan yang sudah dikuasai perusahaan. Hal ini terjadi pada kasus 10 desa pada tahun 2000, yang merupakan tuntutan masyarakat terhadap PTPN XIII, untuk mengembalikan perkebunan kelapa sawit seluas 2000 Ha (kebun inti) sebagai tanah ulayat mereka. Tanah ulayat biasanya dikuasai secara turun-temurun, sebagian ada yang masih berupa 'ongko' atau lahan hutan. Kasus ini diselesaikan selama 2 tahun, setelah terjadi konflik sosial yang hampir melumpuhkan ekonomi Pasir. Masalah tanah ulayat juga terjadi antara sesama masyarakat Pasir, terutama antara masyarakat keturunan raja (Kerajaan Pasir) dengan masyarakat biasa. Dalam hal ini, masyarakat keturunan raja meyakini sebagian wilayah adalah tanah kerajaan dengan bukti adanya tulisan bersegel dari Belanda dengan cap mahkota, sehingga mereka mengklaim bahwa tanah tersebut ada hak ulayat mereka. Sementara menurut masyarakat Pasir lainnya, tanah tersebut adalah tanah milik masyarakat Pasir yang bukan keturunan raja. Sengketa tanah ulayat ini menjadi pelajaran penting untuk diperhatikan Pemda pada waktu mengurus izin untuk pembukaan lahan kelapa sawit selanjutnya, agar konflik sosial dapat dihindarkan.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Pasir pada tahun 2002 mencapai 108.825 jiwa atau sekitar 65 persen dari penduduk di Kabupaten Pasir (berusia 15 tahun atau lebih). Sebagian besar angkatan kerja ini menurut konsep/definisi yang berlaku termasuk dalam status bekerja. Berdasarkan data ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pasir, pengangguran terbuka yang biasa diprosikan sebagai pencari kerja, lebih banyak dialami oleh angkatan kerja yang relatif berpendidikan. Sebagai contoh pada tahun 2002 terdapat sebanyak 3.475 orang yang terdaftar sebagai pencari kerja, dan hanya sekitar 15 persen yang berhasil ditempatkan untuk bekerja, selebihnya masih menunggu untuk ditempatkan atau menganggur. Sebagian besar pencari kerja yang terdaftar di Disnakertrans adalah pemuda berusia 20-29 tahun dengan tingkat pendidikan minimal SMA. Hal ini menunjukkan perluasan kesempatan kerja masih dibutuhkan di Kabupaten Pasir, terutama untuk memenuhi kebutuhan angkatan kerja yang relatif berpendidikan. Sedangkan setengah pengangguran (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), biasanya banyak terjadi di sektor pertanian, karena sifat pekerjaan yang fluktuatif sesuai dengan irama kegiatan. Di perkebunan kelapa sawit, misalnya, kegiatan petani yang paling menonjol hanya pada waktu panen, karena dilakukan secara serentak dalam satu hamparan kebun oleh kelompok petani.pemiliknya. Sedangkan kegiatan lainnya seperti pemeliharaan dan pemupukan, kurang mendapat perhatian dari para petani, dan biasanya merupakan kegiatan individual, tergantung kemauan petani. Kemungkinan rendahnya produktivitas di perkebunan rakyat dibandingkan perkebunan

Negara, dipengaruhi oleh kurang optimalnya pemeliharaan di perkebunan rakyat, sehingga hasilnya kurang memenuhi standar pengelolaan yang ideal.

Dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pasir tergolong relatif rendah. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir, pada tahun 2002 Angka Partisipasi Kotor (APK) yang relatif tinggi hanya terdapat pada tingkat pendidikan SD/MI (jumlah siswa SD/MI dibagi jumlah penduduk usia sekolah SD/MI 7-12 tahun), yaitu sebesar 102 persen. Ini berarti pada tingkat pendidikan SD/MI jumlah siswa yang sekolah di SD/MI lebih banyak dari jumlah anak usia sekolah SD/MI karena sebagian murid ada yang tinggal kelas atau tidak lulus sekolah. Makin tinggi tingkat pendidikan yaitu SLTP/MTs dan SLTA/MA, tingkat partisipasi sekolah semakin rendah. APK tingkat pendidikan SLTP/MTs adalah 75,2 persen dan di tingkat SLTA/MA sekitar 35 persen. Hal ini berarti siswa yang bersekolah di SLTP/MTs dan SLTA/MA lebih rendah dari jumlah penduduk pada usia sekolah SLTP (13-15 tahun) dan usia sekolah SLTA (16-18 tahun). Rendahnya partisipasi sekolah di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mungkin disebabkan kurang meratanya fasilitas sekolah sampai ke daerah pedalaman, dan/atau kurang kesediaan orang tua dalam menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik karena faktor ekonomi atau faktor lain.

Perbedaan tingkat partisipasi sekolah dapat dilihat pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Pasir. Pada tingkat pendidikan SD/MI, partisipasi sekolah yang relatif rendah (dibawah 100 persen) terdapat di Kecamatan Pasir Balengkong (85,39 %), Kuaro (91,27 %) dan Long Kali (98,81 %) (Tabel 2.5). Ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah perkebunan kelapa sawit dimana banyak transmigran ditempatkan antara lain di Desa Padang Jaya di Kecamatan Kuaro, UPT. Sebakung IV, UPT. Sebakung V dan UPT Muara Adang II di Kecamatan Long Kali. Kemungkinan hal ini berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi sekolah di tingkat SD/MI. Pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu tingkat SLTP/MTs, semua kecamatan mempunyai tingkat partisipasi rendah yaitu dibawah 100 persen, dan tingkat paling rendah terdapat di Kecamatan Muara Komam (sekitar 53 persen) dan paling tinggi di Tanah Grogot (sekitar 92 persen).

Tabel 2.5:  
 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SLTP/MTs Menurut Kecamatan di  
 Kabupaten Pasir Tahun 2002.

Kecamatan	SD/MI			SLTP/MTs		
	Anak Usia 7-12 th	Murid SD/MI	Angka Partisipasi	Anak Usia 13-15 th	Murid SLTP/MTs	Angka Partisipasi
Batu Sopang	1.802	2.031	112,71	848	615	72,52
Tanjung Aru	1.922	2.201	114,52	864	523	60,53
Pasir	3.038	2.594	85,39	1.321	978	74,03
Balengkong						
Tanah Grogot	5.651	5.780	102,28	2.576	2.374	92,16
Kuaro	3.001	2.739	91,27	1.241	893	71,96
Long Ikis	4.793	5.411	112,89	2.022	1.581	78,19
Muara Komam	1.376	1.426	103,63	623	328	52,65
Long Kali	3.543	3.501	98,81	1.471	958	65,13
Kab. Pasir	25.126	25.683	102,22	10.966	8.250	75,23

Sumber: Kabupaten Pasir Dalam Angka, 2002.

Kecamatan Kuaro sebagai salah satu daerah penerima transmigran mempunyai jumlah penduduk 18.093 jiwa atau 10,7 persen dari total penduduk Pasir, diantaranya sebanyak 1.402 jiwa (346 KK) merupakan penduduk di Desa Padang Jaya. Sebagai desa penempatan transmigran PIR-BUN, sebagian besar penduduk desa ini berasal dari Jawa, baik yang datang pada awal pembukaan kebun kelapa sawit maupun yang datang kemudian dengan membeli lahan perkebunan. Sebagian kecil penduduk lainnya merupakan penduduk lokal dari Pasir atau daerah di sekitarnya. Berdasarkan profil desa (tahun 2000), sebagian besar penduduk di desa ini mempunyai mata pencaharian pokok sebagai petani plasma kelapa sawit (264 orang), buruh (66 orang), pedagang (23 orang), industri rumah tangga (14 orang), tukang (15 orang) dan pegawai negeri (18 orang) dan swasta (47 orang). Penduduk Desa Padang Jaya tergolong penduduk yang produktif, karena lebih dari dua pertiga berusia di atas 15 tahun. Sedangkan penduduk pada usia sekolah SD dan SLTP (6-16 tahun) sebanyak 385 jiwa (sekitar 27 persen), penduduk usia sekolah SLTA dan PT (17-25 tahun) sebanyak 232 (sekitar 16 persen), usia 26-60 tahun sekitar 43 persen, dan selebihnya adalah penduduk manula (60 tahun atau lebih), sekitar 3 persen

Berdasarkan tingkat pendidikan, lebih dari separuh penduduk Desa Padang Jaya berpendidikan SD yaitu sebanyak 798 orang. Pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti kondisi Kecamatan Kuaro pada umumnya, proporsinya makin kecil, yaitu jumlah penduduk dengan pendidikan SLTP sebanyak 288 orang (sekitar 20 persen), tingkat SLTA sebanyak 164 orang (sekitar 12 persen) dan Perguruan Tinggi hanya 5 orang. Rendahnya tingkat



pendidikan penduduk di Desa Padang Jaya, dipengaruhi olehnya banyaknya transmigran yang berpendidikan rendah. Sarana pendidikan yang tersedia sangat terbatas yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-Kanak (TK). Sedangkan untuk sarana sekolah yang lebih tinggi terdapat di kota Kecamatan Kuaru atau di ibukota Kabupaten yaitu Tanah Grogot.. Disamping sekolah umum, di Desa Padang Jaya juga terdapat sekolah keagamaan informal seperti Taman Pengajian Alquran (TPA).

Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pertanian dan perkebunan di Kabupaten Pasir, telah dibangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK2) dan Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER). SMK 2 yang dibangun dengan pembiayaan dari bantuan luar negeri, memiliki sarana penunjang, seperti lahan praktek, kebun percontohan, asrama untuk siswa. Program studi yang diadakan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan pertanian seperti (1) Budidaya Tanaman, termasuk Kelapa Sawit; (2) Perikanan; (3) Peternakan; (4) Teknologi Pertanian, termasuk teknologi tanaman kelapa sawit. Untuk Teknologi Pertanian yang baru akan dibuka dan sudah ada MOU dengan PT. Astra yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit berlokasi di Waru Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dukungan Astra terhadap SMK cukup besar disamping kerjasama dalam mengadakan Program Studi Teknologi Pertanian, juga dalam bentuk pemagangan siswa SMK di kebun milik Astra. Sebagian lulusan sekolah ini terserap di perusahaan Astra. Sementara dukungan PTPN XIII sebagai perusahaan negara dalam pembinaan sumber daya manusia di bidang pertanian/perkebunan masih kurang, baik dalam pembinaan kurikulum maupun dalam hal penyerapan tenaga kerja lulusan SMK 2 di PTPN XIII.

Meskipun sarana sekolah untuk meningkatkan sumber daya manusia dibidang pertanian telah tersedia di Kabupaten Pasir, namun permasalahannya adalah rendahnya minat siswa untuk masuk ke sekolah tersebut dibandingkan minat ke sekolah umum. Data pada Diknas Pendidikan Kejuruan Kabupaten Pasir menunjukkan jumlah siswa di SMK 2 semakin berkurang dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin banyak jumlah sekolah menengah umum (SMU) yang tersebar sampai ke tingkat kecamatan. Salah satu faktor penyebab adalah kurang adanya kepastian lapangan kerja di perkebunan untuk lulusan sekolah kejuruan ini. Di samping itu, lapangan pekerjaan di perusahaan perkebunan kelapa sawit makin terbatas, serta lulusan sekolah kejuruan yang belum siap untuk langsung bekerja di lahan pertanian. Tampaknya kurikulum di sekolah kejuruan dipersiapkan untuk mengarahkan siswa mandiri di bidang pertanian terutama perkebunan, sedangkan minat generasi muda cenderung masih terbatas menjadi karyawan di perusahaan besar perkebunan dan perusahaan pertambangan batu bara yang terdapat di kabupaten Pasir dan sekitarnya.

Mata pencaharian pokok masyarakat Pasir adalah bertani atau berladang. Secara tradisional masyarakat Pasir memperoleh penghasilan dengan cara menggarap ladang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka mengumpulkan hasil hutan seperti kayu dan rotan dan membukan lahan untuk di jadikan ladang tanaman pangan dan palawija. Mereka percaya bahwa lahan yang sudah lama di pakai untuk bercocok tanam, lama kelamaan tidak subur lagi, sehingga mereka pindah mencari lahan baru. Pada saat PTP XIII membuka perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN, masyarakat lokal banyak yang menolak untuk menjadi petani plasma, karena belum terbiasa dengan perkebunan kelapa sawit. Minat mereka untuk berkebun sawit timbul setelah melihat kehidupan transmigran yang lebih berhasil sebagai petani kelapa sawit. Keinginan masyarakat lokal untuk memanfaatkan lahannya untuk perkebunan kelapa sawit diakomodasi oleh pemerintah daerah dengan mengembangkan Program PIR-Swadaya di bawah pembinaan Dinas Perkebunan Tingkat I dan II.

## **2.4. Sarana Dan Prasarana**

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerah pedesaan seperti Padang Jaya, tidak terlepas dari dukungan berbagai sarana dan prasarana seperti sarana transportasi, perbankan (BRI), KUD dan Kelompok Tani. Ketersediaan dan kondisi jalan dapat mempengaruhi kelancaran pemasaran hasil kelapa sawit dari kebun ke pabrik pengolaha hasil kelapa sawit. Begitu juga lembaga keuangan seperti BRI dan KUD membantu petani dalam mengatasi masalah keuangan dan masalah yang berhubungan dengan usaha tani kelapa sawit.

### **2.4.1. Jalan dan transportasi**

Prasarana berupa jalan merupakan penunjang kelancaran transportasi darat, yang berperan sangat penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian masyarakat, mempermudah mobilitas orang dan barang serta membuka isolasi suatu wilayah. Berdasarkan statusnya, jalan dibedakan atas 3, yaitu: Jalan Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten. Pada tahun 2003, panjang Jalan Nasional atau jalan negara yang berada di wilayah Kabupaten Pasir adalah 235,44 km, Jalan Propinsi sepanjang 176,75 km dan dan Jalan Kabupaten 980,59 km. Bila dibandingkan dengan tahun 2002, panjang jalan nasional dan jalan propinsi tidak mengalami perubahan, sedangkan panjang jalan kabupaten mengalami penambahan dari 967,89 km menjadi 980,59 km. Dilihat dari kondisi jalan tersebut, 24 persen dalam keadaan baik, 15 persen dalam keadaan sedang dan selebihnya rusak. Sejauh ini transportasi jalan telah mampu menghubungkan seluruh ibu kota kecamatan dengan

ibu kota kabupaten, dan sebagian besar desa/kelurahan dengan ibu kota kecamatan. Untuk daerah pedalaman yang belum memiliki prasarana jalan dan jembatan yang layak untuk dilalui transportasi darat, maka alternatif yang dipilih adalah transportasi sungai dan penyeberangan. Jalan Trans Kalimantan, yaitu Jalan Lintas Poros Selatan sepanjang 1.102 km<sup>2</sup> dari Simanggaris-Tanjung Selor-Tanjung Redeb-Sanggata, Bontang-Samarinda-Balikpapan-Banjarmasin dapat memperlancar mobilitas orang dan barang antar kabupaten dan propinsi. Dengan adanya sarana penyeberangan sungai/laut dari Penajam Pasir Utara ke Balikpapan maka mobilitas dari dan ke Kabupaten Pasir semakin lancar dan efisien.

Tersedianya prasarana jalan dan sarana transportasi yang dapat menjangkau perkebunan kelapa sawit sangat penting dalam mendukung kelancaran pengelolaan perkebunan kelapa sawit, terutama dalam hal pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS) dari perkebunan ke pabrik CPO. Hal ini disebabkan pengangkutan ini membutuhkan waktu cepat untuk menjaga kualitas produksi. (maksimum 8 jam). Untuk pengangkutan TBS milik petani plasma PTPN XIII, transportasi dikelola oleh KUD, sementara bagi petani PIR-Swadaya yang menjual TBS perusahaan swasta, seperti ke PT. Alam Raya, perusahaan yang menyediakan transportasinya.

#### **2.4.2. Lembaga keuangan**

Lembaga keuangan seperti BRI atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memberikan layanan dibidang keuangan seperti tabungan, deposito, kredit dan sebagainya kepada masyarakat. Keberadaan BRI dan BPR sudah dapat menjangkau masyarakat sampai ke tingkat kecamatan dan dapat dimanfaatkan oleh petani untuk keperluan simpan pinjam terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Namun petani di Desa Padang Jaya belum banyak memanfaatkan lembaga keuangan ini dalam pengembangan usaha kelapa sawitnya. Lembaga perbankan hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil petani yang memiliki skala usaha yang cukup besar, terutama dalam hal menyimpan uang, Rendahnya pemanfaatan lembaga perbankan disebabkan karena para petani tidak terbiasa dan tidak berani berhutang dalam jumlah besar. Bagi sebagian besar petani plasma di Desa Padang Jaya keberadaan KUD di desa sudah dianggap mencukupi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi petani. KUD berperan penting baik dalam memperlancar pemasaran hasil ke pabrik CPO, maupun dalam mengatasi kesulitan keuangan, termasuk peminjaman uang dalam jumlah kecil.

### 2.4.3. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Koperasi yang menurut bentuknya dibedakan atas KUD dan Non KUD tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten pasir. Di Desa Padang Jaya terdapat sebuah KUD yang bernama KUD Rangan Jaya, dengan jumlah anggota 381 orang. KUD ini melayani petani dalam hal keuangan (simpan pinjam), penjualan barang kebutuhan sehari-hari, pemasaran atau memfasilitasi penjualan hasil TBS petani ke pabrik sekaligus melakukan pembayaran TBS. Ada beberapa unit usaha, yaitu: Unit Waserda, Unit Plasma (Perkebunan), Unit Jasa Angkutan, Unit Simpan Pinjam, Unit Penggilingan Padi dan Unit Saprodi. Selama ini petani sangat tergantung pada KUD baik dalam memasarkan TBS maupun dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan jumlah pendapatan rata-rata yang diperoleh petani dari hasil penjualan TBS dari 2 Ha lahan kebun sawitnya, pada umumnya petani masih mengandalkan bantuan KUD untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan memanfaatkan peminjaman uang, kredit barang kebutuhan sehari-hari, dan membayar kembali secara kredit pada setiap menerima pembayaran TBS dari perusahaan.

### 2.4.4. Kelompok tani

Dalam mengelola kebun plasma di Desa Padang Jaya, para petani tergabung dalam 14 Kelompok Tani dengan jumlah anggota kelompok yang bervariasi antara 17 sampai 33 orang. Setiap kelompok tani mempunyai seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Semua anggota kelompok tani adalah anggota KUD, sehingga KUD berfungsi juga membina semua kelompok tani. Sebagai ketua Kelompok Tani bertanggung jawab untuk membantu panen para anggota kelompok, baik dalam menetapkan waktu panen, mencatat jumlah anggota yang akan panen sampai memberi informasi pada anggota. Selain itu, ketua juga menguasai lokasi 'hamparan' atau lokasi perkebunan kelapa sawit para anggota kelompok, sehingga mempermudah pengaturan transportasi dari lokasi hamparan ke pabrik. KUD juga berperan mengkoordinir kelompok tani dalam pembinaan usaha tani mulai dari penyediaan kebutuhan sarana produksi (seperti pupuk dan obat-obatan) sampai ke memfasilitasi penjualan TBS ke pabrik.

## 2.5. Kesimpulan

- Tanaman kelapa sawit merupakan komoditi unggulan bagi Propinsi Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Pasir sehingga pengembangan

sub sektor perkebunan kelapa sawit menjasi prioritas bagi pembangunan di propinsi ini yang didukung dengan *Visi "1 juta hektar kelapa sawit"*. Kabupaten Pasir merupakan *leading* bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan dengan areal kelapa sawit terluas dibandingkan kabupaten lainnya dimana separuh dari areal perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Timur terdapat di kabupaten ini. Pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir didukung oleh ketersediaan sumber daya lahan untuk ditanam kelapa sawit. Sekitar 72 persen dari seluruh Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang ada adalah potensial untuk dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit.

- Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar merupakan perkebunan kelapa sawit milik rakyat kurang didukung oleh sumber daya manusia. Secara kuantitas sumber daya manusia yang ada dapat mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit meskipun pada awal pengembangannya tahun 1986/87, tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit didatangkan dari Jawa. Akan tetapi, dengan kualitas SDM yang relatif rendah dan kurangnya minat generasi muda pada pekerjaan usahatani kelapa sawit maka hal ini dapat menjadi kendala bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit pada masa yang akan datang. Selain itu, masalah hak ulayat terhadap kepemilikan lahan merupakan potensial menjadi kendala bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit.
- Sejalan ini, sarana dan prasarana yang ada seperti transportasi, lembaga keuangan, KUD dan sebagainya dapat mendukung kegiatan usahatani perkebunan kelapa sawit. Kondisi sarana jalan dan ketersediaan alat transportasi dapat memperlancar pemasaran hasil produksi kelapa sawit dari kebun kelapa sawit ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Lembaga keuangan yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal oleh petani kelapa sawit sehingga dalam mengatasi masalah keuangan petani memanfaatkan keberadaan KUD. Disamping membantu petani mengatasi masalah keuangan (simpan-pinjam), peranan KUD cukup besar. Bersama dengan kelompok tani, KUD membantu pemasaran hasil kelapa sawit ke pabrik pengolahan kelapa sawit.

**Lampiran 1:**

**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 1994- 2000 (Persen).**

Lapangan Usaha	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Pertanian	31,24	27,77	27,90	26,63	28,26	31,26	31,31
Pertambangan dan Penggalian	15,10	22,82	24,09	27,02	37,65	32,64	32,76
Industri Pengolahan	19,81	17,71	16,67	16,03	11,95	11,97	11,90
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,13	0,19	0,13	0,12	0,12	0,14	0,14
Bangunan	7,84	6,98	6,80	6,18	4,21	4,41	4,42
Perdagangan, Hotel dan Restoran	16,37	15,61	15,75	15,65	10,82	12,86	12,79
Pengangkutan dan Komunikasi	2,80	2,94	2,90	2,84	2,47	2,74	2,74
Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan	3,05	2,85	2,64	2,50	2,08	1,82	1,81
Jasa-Jasa	3,67	3,12	3,12	3,01	2,07	2,16	2,14
Produk domestik regional Bruto	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Properda Kabupaten Pasir 2001-2005.

**Lampiran 2:**

**Perkembangan Luas Areal Perkebunan di Propinsi  
Kalimantan Timur Tahun 1998 s/d 2002.**

Jenis Tanaman	Luas (Ha)					Pertumbuhan Rata-rata (%)
	1998	1999	2000	2001	2002	
Karet	50.253,5	52.129	63.162	54.503	60.766,5	5,06
Kelapa	48.385,5	49.872,5	51.584,5	53.564,5	53.588,5	2,68
Kelapa Sawit	91.571	116.887,5	116.887,5	117.055	132.178,5	11,08
Kopi	14.799	15.315,5	16.022,5	16.158	16.857	3,47
Kakao	29.057	29.887	29.367	33.830,5	31.697,5	2,27
Lada	8.778,5	9.348,5	10.547,5	10.788,5	13.828,5	14,38
Cengkeh	290	343	354,5	328,5	341,5	4,43
Lain-lain	3.544,5	4.254	5.229,5	5.911,5	6.758,5	22,66
Jumlah	246.949	278.037	295.155	292.139,5	316.016,5	6,89

Sumber: Statistik Perkebunan Kabupaten Pasir Tahun 2002.

### Lampiran 3:

#### Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur, Tahun 2002.

Kabupaten	Kelapa Sawit	
	Luas Areal (Ha)	Produksi tahun 1998-2000 (Ton)
Samarinda	-	-
Balikpapan	-	-
Kutai Kertanegara	19.899	212.432
Kutai Barat	5.371	-
Kutai Timur	31.186	65.793
Bontang	-	-
Pasir (+PPU)	64.059,5	482.021,5
Berau	6.547	-
Bulungan	-	-
Malinau	-	-
Nunukan	5.104	-

Sumber: Statistik Perkebunan Kabupaten Pasir Tahun 2002.





Pengembangan sub-sektor perkebunan dengan pola PIR-BUN merupakan program nasional yang bertujuan terutama untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam pelaksanaannya, pola PIR-BUN biasanya menggunakan tenaga kerja yang dikaitkan dengan program transmigrasi, sehingga pola yang juga biasa disebut PIR-TRANS, bermanfaat dalam membantu pemerataan penduduk ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa, yang umumnya masih relatif jarang. Pola PIR-BUN melibatkan dua pihak utama yaitu perusahaan perkebunan sebagai inti dan petani sebagai plasma. Perbedaan fungsi kedua pihak (inti dan plasma) menandakan adanya pembagian tanggung jawab antara perusahaan besar (inti) dan petani (plasma). Perusahaan inti bertanggung jawab dalam pengembangan teknologi, pemasaran hasil, manajemen pengelolaan kebun, sedangkan petani plasma bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebun, penyediaan tenaga kerja dan melaksanakan panen hasil produksi sesuai dengan standar yang ditentukan. Dengan demikian perusahaan inti berkewajiban mempersiapkan dan melakukan pembinaan terhadap petani plasma, sehingga menjadi pekebun kelapa sawit sesuai dengan standar yang diperlukan. Demikian pula perusahaan berkewajiban melakukan alih teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta pengolahan hasil produksi lebih lanjut. Perusahaan inti juga berperan penting dalam pemasaran hasil produksi kelapa sawit, sehingga perkembangan perekonomian yang terkait dengan kelapa sawit diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Petani sebagai pihak yang mengelola perkebunan plasma, bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya produksi kelapa sawit sesuai dengan standar yang dibutuhkan pabrik. Sikap dan motivasi petani dalam mengelola kebun secara baik, akan menentukan sukses dan gagalnya usaha perkebunan kelapa sawit selanjutnya. Apabila masing masing pihak baik perusahaan inti maupun petani plasma dapat melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya, maka usaha perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat mencapai tujuan pokoknya yaitu menyediakan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani. Demikian pula tinggi rendahnya produktivitas, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemilihan bibit unggul, manajemen pengelolaan kebun, pemupukan dan pemeliharaan serta umur pohon sawit.

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur khususnya di Kabupaten Pasir yang diawali dengan pola PIR-BUN, sudah berlangsung

sekitar 20 tahun. Bagaimana perkembangannya selama ini apakah cukup berhasil dalam mencapai tujuannya? Bagian ini akan membahas dinamika perkembangan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di daerah ini, sehingga diharapkan dapat melengkapi analisis penyerapan tenaga kerja terkait dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit. Dinamika di sini dapat diartikan sebagai suatu perkembangan dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit baik dilihat dari segi waktu maupun ruang gerak. Dari segi waktu dinamika merupakan gambaran perubahan dari waktu ke waktu, sedang dari ruang gerak menggambarkan perkembangan sesuai dengan tahapan yang hendak dicapai. Oleh sebab itu analisis dinamika perkebunan kelapa sawit akan meliputi perkembangan perkebunan kelapa sawit, kebijakan dan investasi, perkembangan pengelolaan perkebunan kelapa sawit serta peran lembaga sosial ekonomi.

### 3.1. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit

Di Indonesia perkembangan perkebunan kelapa sawit skala besar sudah cukup lama berlangsung yaitu sejak masa penjajahan (Belanda maupun Inggris). Perkebunan-perkebunan besar berkembang dengan pesat di berbagai daerah di Indonesia terutama di luar pulau Jawa seperti Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan. Pada masa kolonial, perkembangan perkebunan sangat terkait dengan politik ekonomi penjajah yang memanfaatkan daerah jajahan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pembangunan ekonomi di negara asalnya. Petani pada masa penjajahan umumnya berstatus sebagai buruh/kuli kontrak yang lebih cocok disebut buruh paksa karena seringkali memperoleh perlakuan yang tidak adil. Buruh kontrak tersebut banyak didatangkan dari Pulau Jawa yang penduduknya lebih banyak dan lebih padat dibandingkan daerah lain di luar Pulau Jawa yang umumnya masih jarang. Di samping perkebunan besar, masyarakat sekitar juga mengembangkan perkebunan rakyat dengan skala kecil. Namun perkebunan rakyat ini sulit berkembang karena masih dikelola secara tradisional dan harus bersaing dengan perusahaan besar yang dikelola secara lebih profesional.

Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih perkebunan kelapa sawit besar yang sebelumnya dikuasai penjajah, di bawah koordinasi departemen terkait. Pada waktu itu perusahaan perkebunan besar dan perkebunan rakyat berjalan dan berkembang sendiri sendiri, sehingga terdapat ketimpangan yang besar antar kedua pola perkebunan tersebut. Banyak perkebunan besar yang berkembang sebagai raja di antara perkebunan rakyat yang kondisinya masih sangat memprihatinkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pemerintah melakukan perubahan

dalam sistem usaha perkebunan yang dapat meningkatkan usaha perkebunan rakyat. Sejak Repelita II (1974/75-1979/80), pemerintah mengembangkan program PIR-BUN, yang bertujuan untuk memadukan perusahaan perkebunan dan perkebunan rakyat. Pelaksanaan pola PIR dimulai tahun 1977/78 (NES I) yang berlokasi di D.I. Aceh dan Sumatra Selatan (Dirjen Perkebunan, 1982).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur yang pembukaannya dimulai sejak tahun 1982/1983, merupakan realisasi pengembangan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN ke arah Indonesia bagian Timur, terutama Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir dengan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR-BUN), adalah perkebunan kelapa sawit pertama yang melibatkan Perusahaan Negara yaitu PTPN XIII sebagai perusahaan inti dan melibatkan transmigran sebagai petani plasma. Pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir disiapkan sejak tahun 1982, dan beroperasi melibatkan transmigran sejak tahun 1987. Kerjasama antara Departemen Perkebunan dengan Departemen Transmigrasi, berhasil menempatkan sekitar 8500 KK transmigran dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebagai petani plasma yang ditempatkan di Unit Penempatan Transmigran (UPT) Kabupaten Pasir. Dari jumlah tersebut, sekitar 350 kepala keluarga ditempatkan di UPT Kecamatan Muara Kuaro yaitu tepatnya di Desa Padang Jaya (semula bernama Desa Ranah Jaya).

Program PIR-Transmigrasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengelola kebun kelapa sawit yang baru dibuka di Kabupaten Pasir, dan kemudian menjadi petani plasma (Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim. 2003). Pada waktu itu masyarakat lokal umumnya tidak tertarik menjadi petani plasma perkebunan kelapa sawit. Pada tahap permulaan, kelapa sawit merupakan tanaman yang asing bagi penduduk Kaltim pada umumnya, bahkan juga bagi para transmigran yang umumnya sebagai petani tanaman pangan di tempat asalnya. Selama masa tanam (sebelum pohon berproduksi) para petani plasma yang masih berstatus 'buruh' perusahaan, memperoleh pembinaan atau bimbingan pengelolaan kelapa sawit sesuai standar perusahaan. Selama masa bimbingan, mekanisme pekerjaan telah diatur sesuai standar perusahaan, antara lain kegiatan pemupukan, pengobatan tanaman, pemeliharaan, panen bahkan pemasarannya. Setelah kelapa sawit menghasilkan TBS (setelah 5 tahun masa tanam), masing-masing petani bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan yang menjadi bagiannya (2 Ha), namun beberapa kegiatan masih dilakukan secara kolektif bersama kelompok masing-masing, terutama waktu panen dan pemasaran hasil ke pabrik, serta penerimaan hasil penjualan. Panen yang dilakukan secara periodik (setiap 2 minggu -1 bulan), menjadikan petani plasma tetap menganggap hasil penjualan TBS miliknya sebagai "bayaran atau gaji", karena biasanya hasil panen dibayar perusahaan secara serentak, setelah

sebulan hasil TBS diserahkan ke pabrik. Hal ini berbeda dengan petani tanaman pangan yang memperoleh hasilnya setelah satu musim tanam-panen, dan tidak terikat pada kegiatan kelompok tani.

Sebelum masyarakat mengenal perkebunan kelapa sawit, kebanyakan penduduk setempat adalah petani pangan tradisional yang bercocok tanam dengan cara ladang berpindah. Pada waktu itu mereka belum tertarik dengan cara bertani yang modern dan menetap, karena pemilikan lahan masih luas, dan penduduk relatif jarang. Di samping petani pangan, mereka juga memanfaatkan hutan yang masih luas untuk berburu binatang dan mengambil hasil hutan seperti damar, rotan dan buah-buahan. Penduduk setempat baru tertarik dengan perkebunan kelapa sawit, setelah petani plasma (PIR-BUN) menghasilkan dan mengalami perbaikan kehidupan sosial ekonomi di Pasir. Timbulnya keinginan masyarakat setempat untuk memanfaatkan lahan sendiri menjadi kebun kelapa sawit, kemudian mendapat respon dari pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten dengan melaksanakan program PIR-Swadaya yang dimulai sejak tahun 1992 dengan bantuan dari APBD I (Tingkat Propinsi), kemudian dilanjutkan dengan APBD II (tingkat kabupaten) pada tahun 2002.

Selama tahun 1998-2002, luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir meningkat dari 46.680,19 menjadi 52.226,2 Ha (atau meningkat sekitar 12 persen). Dilihat dari pola penguasaan lahan, perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir dapat dikelompokkan pada 3 pola yaitu : (1) Perkebunan Rakyat; (2) Perkebunan Besar Negara atau PTPNXIII dan (3) Perkebunan Besar Swasta (PBS). Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir, luas lahan perkebunan kalapa sawit yang ada di Kabupaten Pasir (termasuk Penajam Pasir Utara) seluas 64.059,5 Ha, proporsi terbesar merupakan areal Perkebunan Rakyat ( 45,5%), dan proporsi terkecil adalah Perkebunan Besar Negara (PBN) yaitu 23,4%) (Tabel 3.1).

Tabel 3.1

Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Menurut Pola Kepemilikan Lahan di Kabupaten Pasir (termasuk Penajam Pasir Utara) Tahun 2002.

Kepemilikan	Luas Areal		Produksi	
	Luas Ha)	Persentase (%)	Produksi (Kg)	Rata-rata Produksi/Ha (Kg)
Perkebunan Rakyat	29.187,7	45,5	227.348.133	12.519,76
PBN/ PTPXIII	14.987	23,4	156.395.772	13.367,16
PBS	19.884,8	31,1	98.277.743	7.705,52
Jumlah	64.059,5	100	482.021.648	

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir, 2003

Seperti halnya luas lahan, produksi kelapa sawit di Kabupaten Pasir sebagian besar dihasilkan oleh Perkebunan Rakyat yaitu 227.348.133 Kg atau 47 persen dari total produksi sebanyak 482.021.648 Kg pada tahun 2002. Produksi terbesar kedua dihasilkan oleh perusahaan negara sebesar 156.395.772 Kg atau 32,4% dan perusahaan swasta sebanyak 98.277.743 Kg atau 20,3% (Tabel 3.1 ). Dengan demikian, perkebunan rakyat masih dominan dalam memberi kontribusi pada perekonomian. Akan tetapi produktivitas kelapa sawit perkebunan rakyat 12.519,76 Kg/Ha lebih rendah dari perkebunan besar negara sebesar 13.367,16 Kg/Ha. Rendahnya produktivitas kelapa sawit milik rakyat kemungkinan disebabkan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang masih kurang serta penggunaan bibit yang kurang baik. Pemilihan bibit sawit merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam perkebunan kelapa sawit, karena sangat mempengaruhi kualitas hasil produksi. Bibit yang kurang bagus akan menghasilkan buah sawit yang kualitasnya juga kurang bagus yaitu bercangkang besar, sabut tipis dan isi kecil, sehingga hasil CPO juga relatif sedikit.

Perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan pola PIR-Swadaya dimaksudkan untuk mengakomodasi keinginan masyarakat lokal menjadi petani plasma. Program ini dimulai pada tahun anggaran 1991/1992 dengan dana sebesar Rp.3.364.600.000,- untuk pembangunan kebun seluas 4.324 Ha yang melibatkan 2.877 orang (Dinas Perkebunan Prop. Kaltim, 2003)..Program PIR Swadaya baru dapat diselesaikan setelah berjalan selama lebih kurang 12 tahun. Hal ini disebabkan adanya gangguan pendanaan dari APBD Propinsi pada periode anggaran tahun 1996/1997 sampai tahun 2001/2002. Sejak tahun anggaran 2002 Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir melanjutkan program ini dengan menambah luas areal sebesar 100 HA. Jumlah ini masih jauh dari rencana target seluas 10.000 Ha. Semua petani yang terlibat pada PIR-Swadaya adalah petani lokal yang memanfaatkan lahan milik sendiri, dan mendapat pembinaan dari Dinas Perkebunan Tk I dan II, dan pembiayaan dari APBD I dan APBD II. Setiap petani yang terlibat dalam pola PIR-Swadaya memperoleh bantuan berupa paket bibit, pupuk, obat-obatan dan bantuan uang (setengah biaya) untuk pembukaan lahan. Perkembangan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Swadaya di Kabupaten Pasir sejak awal sampai sekarang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit PIR-Swadaya di Kabupaten Pasir  
Menurut Tahun Anggaran 1991/1992- 2002/2003.

Tahun Anggaran	Luas Areal (Ha)	Jumlah Petani (KK)
1991/1992	272,69	203
1992/1993	1.194,20	877
1993/1994	752,24	520
1994/1995	855,46	548
1995/1996	1.150,33	729
2002	100,00	67
Jumlah	4.324,92	2.937

Sumber: Dinas Perkebunan, Kabupaten Pasir, 2003

Perkebunan kelapa sawit milik rakyat merupakan perkebunan yang kini dimiliki petani plasma PTPN XIII, perkebunan petani PIR- Swadaya dan petani swadaya murni. Petani plasma dari PTPN XIII di Kabupaten Pasir yang berjumlah 8500 KK memperoleh kebun plasma seluas 17.000 Ha, sehingga masing-masing keluarga memperoleh lahan kelapa sawit seluas 2 Ha. Sebagian besar petani plasma (sekitar 80 persen) adalah transmigran dari Jawa, selebihnya merupakan transmigran lokal. Dalam proses pengelolaan kebun sawit, disinyalir banyak petani plasma dari masyarakat lokal yang meninggalkan lokasi begitu saja, atau digantikan oleh pendatang dengan harga murah. Sedangkan perkebunan rakyat pada PIR-Swadaya dan swadaya murni sesuai dengan maksud pembangunannya, hampir semua dimiliki oleh penduduk lokal (Pasir).

### 3.2. Kebijakan Daerah Dan Iklim Investasi

Perkembangan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit baik di tingkat propinsi maupun kabupaten diharapkan dapat menggambarkan dinamika perkebunan kelapa sawit di daerah penelitian. Demikian pula perkembangan iklim investasi yang diciptakan oleh pemerintah agar dapat menarik investor dalam maupun luar negeri dalam rangka perluasan perkebunan kelapa sawit juga dapat memberikan dinamika perkembangan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan khususnya di Kabupaten Pasir.

### 3.2.1. Kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit

Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya dan Kabupaten Pasir khususnya masih memiliki lahan yang cukup luas sebagai cadangan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Luas kawasan budi daya non-kehutanan (KBNK) di Kabupaten Pasir adalah 348.625,00 Ha, dan sekitar 252.265,40 Ha dicadangkan untuk perkebunan kelapa sawit. Dengan luas areal perkebunan kelapa sawit yang sudah dikembangkan di Kabupaten Pasir mencapai sekitar 64.059. 50 Ha (atau sekitar 27, 64 persen), maka potensi kawasan untuk pengembangan perkebunan masih cukup luas yaitu sekitar 72,36 persen dari total kawasan.

Berdasarkan potensi lahan yang dimiliki Kabupaten Pasir, pemerintah daerah Kabupaten Pasir menekankan kebijakan pembangunan daerah untuk mengembangkan sektor perkebunan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan beberapa komoditi perkebunan, terutama kelapa sawit. Hal ini sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang antara lain menekankan pada :

*“Terwujudnya ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi kerakyatan dengan mengedepankan keberpihakan kepada petani, pengusaha kecil, menengah dan koperasi, serta kemitraan dengan usaha besar dalam upaya peningkatan lapangan kerja “*

Sejalan dengan sasaran pembangunan yang mengutamakan ekonomi kerakyatan, maka dalam kaitan dengan perkebunan rakyat pemerintah daerah juga mempunyai VISI dan Misi Pembangunan sebagai berikut :

*“ Terciptanya Kabupaten Pasir sebagai daerah pengembangan Agro industri yang berwawasan lingkungan dan masyarakat Pasir yang mandiri, bertaqwa dan berakhlak mulia, berkualitas, berdaya saing tinggi yang hidup dalam suasana damai demokratis dan adil “*

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Swadaya di Kabupaten Pasir, tidak terlepas dari strategi untuk mencapai visi atau sasaran pembangunan tersebut. Perkebunan dengan pola PIR-swadaya ini merupakan kebijakan propinsi dan daerah, dengan lokasi perkebunan yang tersebar pada lima kecamatan yaitu Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Grogot dan Ps. Belengkong. Kebijakan pemda dalam pengembangan pola PIR Swadaya

sangat penting karena dimaksudkan antara lain untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kehidupan petani plasma (PIR- PTPN) dengan masyarakat di sekitarnya (petani lokal). Animo masyarakat untuk mengikuti jejak petani plasma dalam mengelola perkebunan kelapa sawit dan terbatasnya kemampuan PTPN dalam menampung petani lokal (hanya 20%), menyebabkan upaya Pemda mendapat sambutan positif dari masyarakat Pasir. Apalagi Kabupaten Pasir masih memiliki potensi lahan KBNK yang cukup luas untuk merealisasikan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Program PIR-Swadaya dinilai strategis oleh berbagai pihak karena dapat mengurangi kecemburuan sosial antara penduduk setempat dan para pendatang (transmigran). Keadaan ini sangat penting karena keamanan dalam berusaha bagi para investor sangat diperlukan. Dengan pengembangan PIR-Swadaya berarti pemerintah daerah telah memprioritaskan keterlibatan petani dalam pengembangan ekonomi kerakyatan, dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan petani. Setelah program PIR-Swadaya mulai menghasilkan, kebutuhan perluasan pasar TBS dilakukan Pemda Kabupaten dengan menjalin kemitraan dengan pengusaha besar. Kebijakan tersebut telah membantu petani untuk memperbaiki pendapatannya, karena adanya persaingan harga antara PTPN (yang selama ini memonopoli pemasaran) dengan perusahaan swasta.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Swadaya, sangat dipengaruhi oleh kebijakan Pemda dan menjadi bagian langsung dari kebijakan pembangunan daerah, khususnya sub-sektor perkebunan. Hal ini berbeda dengan kebijakan Pemda dalam menghadapi perkembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN. Keadaan ini disebabkan adanya perbedaan secara substansial antara PIR-BUN dan swadaya, baik dalam sumber pendanaan maupun penanggung jawab pengelolaannya. Pada pola PIR-BUN, merupakan bagian dari kebijakan PIR-nasional yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat yaitu Departemen Perkebunan. Demikian pula sumber dana berasal dari bank dunia dan BRI. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir sebagai pihak penerima proyek, menyediakan lahan melalui program transmigrasi nasional, dan bekerja sama dengan Departemen Perkebunan melalui PTPN menyiapkan lahan tersebut sebagai hamparan kebun sawit, di samping menyiapkan kebun inti di beberapa lokasi (Tajati dan Longkali). Semua paket untuk persiapan awal pengelolaan kelapa sawit disediakan oleh perusahaan inti (PTPN) yaitu bibit, pupuk, obat-obatan, yang akan dibayar kembali oleh petani setelah kelapa sawit menghasilkan. Penguasaan lahan perkebunan oleh PTPN dengan pola PIR-BUN merupakan bagian dari program nasional, yang melibatkan Departemen Perkebunan dan Departemen Transmigrasi. Sebelum otonomi daerah, semua izin untuk pemanfaatan lahan negara menjadi wewenang pemerintah pusat.



Perbedaan sifat kedua pola tersebut, berdampak dalam proses selanjutnya. Pada PIR-Swadaya, peran Pemda sangat dominan terhadap pembinaan petani lokal dan pemasaran hasilnya, karena sumber dana berasal dari APBD propinsi dan kabupaten. Petani peserta menyediakan lahan sendiri, dan dilibatkan dalam pelaksanaan sejak awal yaitu persiapan lahan, penanaman bibit, pemeliharaan dan seterusnya. Untuk pembiayaan selama persiapan, petani menerima paket berupa bibit, pupuk, obat-obatan, dan pembinaan dari Dinas Perkebunan propinsi atau kabupaten. Sebagian paket ini harus dibayar kembali secara kredit oleh petani swadaya, setelah kebun menghasilkan. Sebagai manager pengelola PIR swadaya adalah Ketua UPP PIR swadaya yang mendapat wewenang dari Disbun Propinsi dan dibantu oleh KUD di setiap kecamatan. Selain memimpin pengelolaan kebun kelapa sawit, kepala UPP juga berperan sebagai penghubung dalam pemasaran hasil ke pihak perusahaan pengolahan CPO atau ke perusahaan swasta yang berinvestasi di lokasi perkebunan.

Kebijakan pengembangan agro industri dengan basis perkebunan rakyat, sejalan dengan visi pembangunan yang apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh diharapkan mampu mengembangkan perekonomian rakyat dan meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk tercapainya tujuan tersebut salah satu kondisi yang diperlukan adalah sinkronisasi berbagai pihak sesuai dengan bidang masing masing dalam mencapai tujuan tersebut. Kerja sama antara pihak pemerintah dan Perkebunan Besar/Swasta an Petani perkebunan kecil sangat perlu untuk dibina.

Dalam kaitan dengan kebijakan pengembangan industri pengolahan terkait dengan kelapa sawit Pemda Kabupaten Pasir masih terbatas pada perencanaan tambahan pembukaan tiga pabrik pengolahan CPO oleh investor swasta, untuk menampung hasil kelapa sawit, khususnya dari PIR-Swadaya. Selama ini pengolahan CPO masih dikuasai oleh PTP XIII, sehingga dalam menentukan harga kurang menguntungkan petani lokal. Upaya pembangunan pabrik CPO oleh Pemda menghadapi kendala, karena adanya peraturan pemerintah pusat bahwa untuk pendirian pabrik CPO prasyarat yang harus dipenuhi adalah pemilikan kebun inti oleh investor. Penyiapan kebun inti bagi pabrik CPO memerlukan lahan yang luas, sementara yang diperlukan saat ini adalah pabrik pengolahan untuk menampung hasil TBS di luar PIR-BUN. Jalan keluar yang ditempuh sementara adalah pemda mengeluarkan izin bagi investor swasta untuk menampung hasil TBS, lengkap dengan sarana penimbangan, tanpa harus memiliki pabrik CPO di Pasir. Pada tahap berikutnya pemda bekerja sama dengan perusahaan swasta sedang mempersiapkan pendirian tiga buah pabrik CPO untuk memenuhi kebutuhan penampungan hasil produksi yang ada sekarang.

### 3.2.2. Investor dan iklim investasi

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan, strategi dan program pengembangan sektor perkebunan yang berbasis ketenagakerjaan. Pemda sebagai daerah otonom dapat memberikan berbagai kemudahan baik terhadap investor maupun masyarakat petani, antara lain kemudahan izin, keringanan pajak dan peningkatan sarana dan prasarana, pemberian subsidi atau paket kredit untuk petani pemula. Melalui kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam rangka mengembangkan ekonomi kerakyatan, Pemda melalui program pembangunan ekonomi rakyat juga dapat memberi dukungan berupa kemudahan untuk mengakses modal bagi petani plasma yang memerlukan dana untuk replanting atau perluasan lahan. Sebagai daerah otonom, Pemda kabupaten dengan melibatkan lembaga adat juga lebih berwenang untuk mengklarifikasi status tanah, sebagai tanah negara atau tanah adat, sehingga investor mempunyai kepastian status hukum penguasaan lahan sebelum mengelola perkebunannya. Kerancuan mengenai status tanah dikuatirkan dapat menimbulkan keresahan sosial, sehingga dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di sub-sektor perkebunan.

Propinsi Kalimantan Timur telah merencanakan untuk mengembangkan perkebunan Kelapa Sawit dengan target seluas satu juta HA. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilakukan berbagai upaya menarik investor baik domestik maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Timur. Beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan antara lain berkaitan dengan letaknya yang strategis terutama karena Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Malaysia, Brunei Darusalam, Filipina sehingga memungkinkan untuk mengembangkan jalur perdagangan internasional. Sumber daya alam yang melimpah dan tersedianya sarana komunikasi (transportasi telepon, bandara dan pelabuhan internasional ) dapat melancarkan proses investasi.

Berbagai pertimbangan yang juga dinilai kondusif untuk melakukan investasi kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur antara lain:

- Kondisi politik dan keamanan yang relatif stabil
- Dukungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Kemudahan prosedur perijinan dan insentif yang menarik berupa pembebasan dan pengurangan dari pungutan impor atas proyek-proyek yang memperoleh persetujuan PMDN dan PMA
- Penangguhan pembayaran PPn dan PPnBM serta penundaan pelunasan PBB sampai 5 tahun pertama.
- Penyediaan lahan yang relatif luas untuk perkebunan kelapa sawit

Faktor-faktor tersebut di atas diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka perkebunan kelapa sawit di wilayah Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia bagian timur pada umumnya. Dalam rangka untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi telah menyiapkan kawasan budidaya non-kehutanan (KBNK) seluas 5,32 juta HA. Berdasarkan potensi lahan KBNK tersebut, telah dikeluarkan izin lokasi terhadap 188 Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan areal seluas 3,146 juta HA. Akan tetapi realisasi tanam selama ini baru mencapai seluas 315.803 HA pada tahun 2003 atau sekitar 10 persen dari keseluruhan areal di Kaltim. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim, areal KBNK yang disediakan wilayah Kabupaten Pasir (termasuk PPU) seluas 609.015 HA dan telah dikeluarkan ijin lokasi sebanyak 219.460 HA atau sekitar 35 persen dari luas KBNK yang telah disediakan. Sedangkan realisasi tanam baru pada tahun 2003 mencapai 96.281 Ha atau sekitar 45 persen (Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur, 2003).

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten telah mencoba untuk meningkatkan upaya menarik investor dengan mengeluarkan izin lokasi pada sejumlah PBS namun realisasi tanam masih jauh dari harapan karena secara keseluruhan masih rendah. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengapa realisasi tanam rendah sedangkan lahan yang sudah memperoleh izin lokasi cukup luas?. Informasi dari berbagai pihak menunjukkan adanya dua kemungkinan yaitu: (1) pembukaan perkebunan memerlukan dana yang besar dan para investor belum siap untuk merealisasikan semua areal perkebunan kelapa sawit sesuai dengan izin lokasi. (2) Kemungkinan para investor lebih tertarik memanfaatkan kawasan hutan untuk kepentingan lain seperti penebangan kayu, daripada untuk perkebunan kelapa sawit. Diperoleh informasi bahwa banyak lokasi hutan di Kaltim telah ditebang kemudian dibiarkan dan tidak ditanami tanaman pengganti. Keadaan ini berakibat semakin meluasnya kawasan hutan yang gundul dan menimbulkan banjir pada musim hujan untuk daerah tertentu. Penyimpangan pemanfaatan lahan tersebut selama ini kurang mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang, sehingga dapat menjadi kendala serius untuk mencapai target pengembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini. Dalam upaya untuk mengurangi penyimpangan tersebut, beberapa kabupaten telah melakukan pencabutan izin lokasi terhadap investor yang tidak serius menggunakan lahan sesuai dengan izin lokasi, dan menyediakannya bagi investor yang lebih serius.

Pada saat ini Perusahaan Besar Swasta yang telah beroperasi di daerah Kabupaten Pasir (termasuk wilayah Penajam Pasir Utara) berjumlah 10 perusahaan dengan luas areal 19.884,8 HA, dan jumlah produksi pada tahun 2002 sebesar 98,277,743 Kg. Daftar perusahaan beserta luar areal dan produksi masing-masing sebagai berikut:

Tabel 3.3  
 Nama Perusahaan Kelapa Sawit, Luas Areal dan Produksi di  
 Kabupaten Pasir.

Nama Perusahaan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Kg)
PT. Waru Kaltim Plantation (Kec. Waru)	6.030,6	48.102.000
PT. Buana Wira Subur (Kec. Long Kikis)	1.400,0	11.062.300
PT. Setia Farm (Kec. Kuaro)	100,0	142.000
PT. Indo Karya Sakti (Kec. Kuaro Batu Sopang)	200,0	630.000
PT. Sukses Tani Nusa Subur. (Kec. Babulu)	4.199,2	25.040.030
PT. Sebatin (Kec. Tanjung Aru)	1.775,0	1.548.153
PT. Tehnik Kalimantan Abadi. (Kec. Penajam)	833,0	10.213.153
PT. Dwi Mekar Persada (Kec. Penajam)	647,0	1.504.153
PT. Pradiksi Gunatama (Kec. Tanjung Aru)	4.000,0	-
PT. Langgeng (Kec. Tanjang Aru)	700,0	-
Jumlah	19.884,8	98.277.743

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir, 2002.

### 3.3. Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola PIR-BUN

Tujuan pengembangan pembangunan perkebunan pola PIR-BUN adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumberdaya alam, lahan, tenaga dan modal melalui penerapan teknologi dan manajemen. Secara spesifik tujuan pembangunan perkebunan pola PIR-BUN seperti dikemukakan oleh Nuhung (2003), antara lain:

1. meningkatkan produksi komoditi perkebunan baik kualitas maupun kuantitas sebagai penghasil devisa dari ekspor nonmigas
2. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani perkebunan
3. mempercepat proses alih teknologi budidaya perkebunan dan manajemen usaha tani dari inti ke plasma.
4. membantu pemerataan penyebaran penduduk secara nasional/regional
5. merangsang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah
6. meningkatkan penyediaan lapangan kerja mendorong perkembangan industri hulu dan industri hilir
7. upaya pemanfaatan sumberdaya lahan dan manusia secara optimal

Untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan upaya yang cukup serius karena program ini diharapkan dapat berdampak multi dimensi. Untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi komoditi perkebunan kelapa sawit diperlukan pendekatan baik dari segi teknologi tanam dan pemeliharaan maupun sikap petani terhadap budi daya perkebunan yang lebih profesional. Bila terjadi peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi dapat berdampak ganda baik terhadap peningkatan kesejahteraan petani maupun pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan daerah termasuk penyediaan kesempatan kerja.

Untuk mendapatkan gambaran dinamika/perkembangan pengelolaan kelapa sawit maka berturut akan dianalisis pola dan sistim pengelolaan, perkembangan produksi Kelapa Sawit, Dinamika Pemasaran Produksi dan Harga serta Peranan lembaga Sosial dan Ekonomi

### 3.3.1. Pola dan sistem pengelolaan

Pola dan sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit PIR-Bun dimulai sejak pembangunan kebun untuk pesertanya sampai dengan peserta terachir lunas membayar kreditnya (satu siklus proyek) (Dirjen. Perkebunan, 1982). Dalam satu siklus proyek terdapat dua (2) tahapan yaitu tahap pertama pembangunan kebun peserta dan tahap kedua pembayaran kredit. Antara dua tahap ini dibatasi tahap konversi yaitu penyerahan kebun kepada peserta dengan ditandai penandatanganan akad kredit dengan Bank. Dengan keadaan ini maka pola dan sistem pengeloaan baru dapat dimulai secara penuh setelah dilakukan konversi.

Pada tahap persiapan pembangunan perkebunan kelapa sawit, tanggung jawab pelaksanaan sepenuhnya pada perusahaan inti, sementara petani peserta (petani plasma) masih berstatus sebagai 'buruh' kebun. Sebelum tanaman kelapa sawit menghasilkan, petani peserta memperoleh upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dalam masa pembukaan, penanaman dan pemeliharaan perkebunan. Biaya pembukaan perkebunan ini merupakan komponen kredit yang harus dibayar oleh petani. Dalam tahap ini proses pengalihan teknologi kepada petani peserta sudah dimulai, karena petani diharuskan bekerja sesuai dengan standar perusahaan inti. Untuk mendapatkan gambaran dinamika pola dan sistim pengelolaan kelapa sawit, maka perlu dipahami beberapa hal seperti pola hubungan inti-plasma, sistim dan pelaku.

### 3.3.2. Pola hubungan inti-plasma

Tujuan utama pembangunan perkebunan dengan pola PIR-Bun adalah meningkatkan kesejahteraan petani plasma yang menjadi pesertanya. Tujuan ini dapat tercapai apabila petani berhasil dalam mengembangkan produksi tanaman pokoknya (kelapa sawit). Jadi keberhasilan tanaman kelapa sawit ini merupakan tujuan utama proyek PIR-BUN, sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Sedangkan pengembangan wilayah di sekitarnya merupakan dampak dari keberhasilan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduknya.

Pada prinsipnya pembangunan perkebunan dengan pola PIR-Bun merupakan upaya untuk memadukan antara perusahaan perkebunan dengan perkebunan rakyat dalam suatu proses produksi. Perusahaan perkebunan sebagai inti dan petani sebagai plasmanya. Sebagai perusahaan inti bertanggung jawab pada proses produksi, pengolahan hasil dan pemasarannya. Sedangkan sebagai plasma bertanggung jawab terhadap hasil produksi TBS, sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut (antara lain CPO). Prinsip hubungan inti dan plasma adalah kerja sama yang saling menguntungkan.

Secara lebih rinci tanggung jawab perusahaan inti selama proses hubungan inti-plasma masih berlangsung (sebelum kredit lunas), mencakup dua tahapan yaitu sebagai pelaksana dan sebagai perusahaan inti. Sebagai pelaksana perusahaan perkebunan (PTPN XIII) berkewajiban mempersiapkan kebun kelapa sawit sampai dengan siap konversi menurut standar teknis, membangun rumah tinggal dan lahan pertanian pangan, mengatur penempatan peserta dan melaksanakan konversi. Sebagai perusahaan inti, PTPN XIII bertanggung jawab untuk membantu petani plasma menyediakan sarana produksi, membimbing petani dalam pemeliharaan dan proses produksi, membeli dan mengolah hasil produksi termasuk menetapkan harga TBS dan membantu penyaluran kredit ke bank yang ditunjuk. Apabila tahapan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai suatu kesatuan usaha dapat berjalan lancar, maka diharapkan dapat mencapai hasil produksi sesuai dengan tujuan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya perusahaan masih menghadapi kendala, terutama berkaitan dengan pengelolaan perkebunan, baik oleh staf perusahaan maupun petani, terutama yang terkait dengan kegiatan pemupukan. Hal ini dapat mempengaruhi hasil produksi kelapa sawit, baik jumlah maupun kualitasnya. Hal ini berlanjut, ketika tanggung jawab pengelolaan kebun sudah sepenuhnya di tangan petani plasma. Penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan perkebunan seperti pupuk dirasakan petani kurang lancar dan relatif mahal, sehingga mengurangi minat petani

untuk melaksanakan sesuai dengan standar. Pihak perusahaan dianggap tidak membantu petani plasma dalam mengatasi permasalahan pupuk, sehingga setelah konversi, pemupukan jarang dilakukan oleh petani.

Pada awal kegiatan sebelum konversi, banyak kegiatan pemeliharaan perkebunan kelapa sawit yang tidak efisien, baik dari segi penggunaan sarana pertanian (pupuk dan obat-obatan) maupun teknologi pemeliharannya. Para instruktur (mandor) dari pihak PTPN kurang mengawasi pelaksanaan kerja para petani dan kurang memberikan bimbingan teknis sehingga petani bekerja kurang profesional, sekedar mengejar target. Kegiatan pemupukan sering tidak merata, pembersihan dilakukan hanya pada bagian yang berdekatan dengan jalanan dan cenderung kurang bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Petani hanya mengejar upah yang akan didapatkan dari hasil kerjanya, sedangkan para mandor mengejar target pemupukan, tanpa memeriksa hasil pekerjaan petani. Keadaan ini berdampak pada menurunnya kualitas tanaman sebelum waktunya, sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi. Kurang seriusnya petani dalam memelihara tanaman sawitnya berlangsung terus sampai tahapan setelah konversi dan akad kredit. Akibatnya hasil produksi tidak dapat optimal, dan berdampak langsung terhadap penghasilan yang diperoleh. Ketidakpedulian petani dipicu oleh pemilikan lahan plasma yang belum jelas (karena belum dibagi), sehingga mereka lebih merasa sebagai buruh perkebunan daripada pemilik kebun plasma. Hal ini juga dipengaruhi oleh rendahnya upah petani yang diterima dari perusahaan inti, sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun selama 3 tahun pertama petani juga menerima jaminan hidup berupa beras dan uang lauk, namun jumlahnya relatif kecil, sehingga kurang mencukupi dalam memenuhi kehidupan petani bersama keluarganya.

### 3.3.3. Sistem dan pelaku

Dari analisis sebelumnya terlihat bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun adalah pihak pemerintah, petani dan perbankan. Hubungan dari ketiga pihak harus harmonis untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan kesejahteraan petani peserta. Pihak pemerintah, melalui PTP XIII selaku perusahaan inti mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan petani plasma, petani plasma berkewajiban untuk memelihara kebun agar dapat berproduksi dengan baik untuk mensuplai bahan baku di perusahaan CPO. Perbankan berperan untuk menyediakan dana serta menerima dan mengatur pengembalian cicilan kredit. Bila hubungan ini dilakukan dengan baik maka akan timbul hubungan yang saling menguntungkan (Dirjen Perkebunan, 1982)

Pembinaan perkebunan kelapa sawit PIR-Bun dilaksanakan dengan pola pembangunan pedesaan. Pembinaan petani peserta dilakukan dengan pembangunan yang menyeluruh baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dari aspek sosial, pengelolaan peserta PIR-Bun dilakukan dengan meningkatkan pendidikan, ketrampilan, kesehatan dan pengorganisasian masyarakat. Dari aspek ekonomi pengelolaan perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun dilakukan dengan pembinaan sistem usaha tani (pembangunan pertanian) dengan sasaran peningkatan kualitas petani (profesional) dan produksi pertanian. Oleh sebab itu sebagai petani yang profesional harus dapat mengelola usahanya secara baik dan efisien. Dengan pendekatan semacam ini maka pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan akan semakin banyak baik dari instansi pemerintah maupun swasta/LSM.

Ilustrasi hubungan inti-plasma dalam perkebunan pola PIR-Bun kelapa sawit dapat dilihat pada daerah perkebunan kelapa sawit di Desa Padang Jaya. Peranan PTP XIII dalam pembinaan perkebunan pola PIR-BUN Kelapa sawit telah dimulai sejak petani peserta masih menjadi buruh pada tahap persiapan perkebunan plasma. Untuk menambah pendapatan petani peserta, mereka dilibatkan dalam kegiatan perkebunan sekaligus sebagai masa pembimbingan untuk pengelolaan kebun kelapa sawit. Namun banyak petani yang merasakan kurang mendapatkan pembinaan secara baik, karena pada umumnya mereka banyak bekerja sendiri di kebun dan kurang mendapatkan pengawasan oleh mandor yang bekerja di pihak PTP. Sebagai contoh dalam kegiatan pemupukan tanaman, seringkali pemupukan dilakukan tidak merata, bahkan banyak sisa pupuk yang kemudian ditumpuk di suatu tempat atau dibuang di sungai. Petani berani melakukan hal ini, karena pengawasan lemah dan bukti pemupukan hanya berdasarkan jumlah bungkus plastik pupuk yang dipakai. Lagipula pada masa persiapan ini petani bekerja secara kolektif pada hamparan lahan, sehingga lebih merasa sebagai 'buruh' daripada sebagai petani plasma yang bakal menjadi pemilik lahan perkebunan sawit. Disamping itu para petani merasa dieksploitasi oleh perusahaan, karena upah buruh relatif kecil, sehingga mereka bekerja tidak sepenuhnya. Keadaan ini tidak menguntungkan semua pihak, baik dalam perkembangan tanaman maupun proses alih teknologi. Akibatnya hasil produksi kurang optimal dan berpengaruh terhadap penghasilan petani maupun perusahaan.

Sesudah konversi, sikap petani cenderung mulai berubah karena mereka mengerjakan lahan yang sudah menjadi milik masing-masing (2 Ha). Akan tetapi dalam hal pemeliharaan tanaman, sikap tidak serius mereka cenderung tidak berubah. Pihak PTP juga kurang membantu KUD/kelompok tani dalam memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau. Demikian pula pembinaan dan bimbingan terhadap petani oleh perusahaan makin berkurang, sejalan dengan konversi lahan ke petani plasma, akibatnya petani



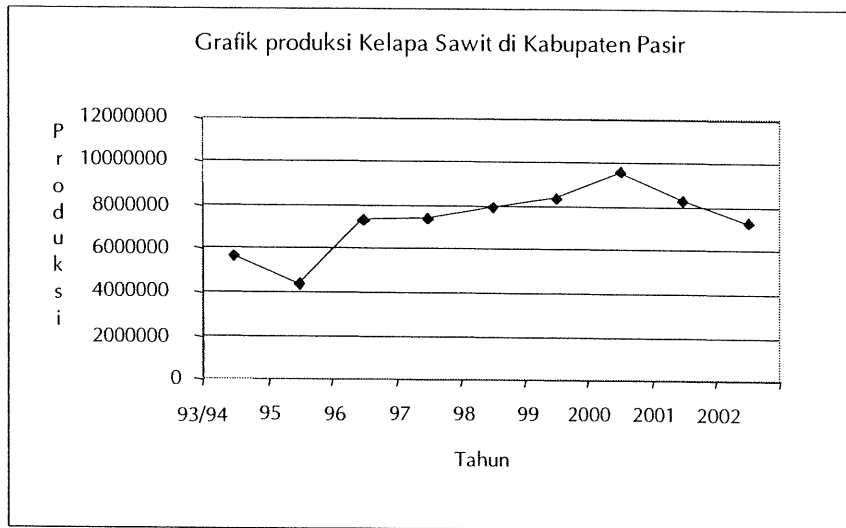
kurang profesional dalam pengelolaan kebun sawitnya. Petani cenderung memelihara tanaman dan pemupukan sebatas kemampuan keuangannya.

Dampak dari pengelolaan kebun yang kurang profesional mulai dirasakan petani pada tahun terakhir yaitu hasil produksi yang mulai menurun dan panen semakin jarang dilakukan (sebulan sekali). Penurunan hasil juga dipengaruhi oleh umur pohon yang semakin tua, di samping pemeliharaan yang tidak optimal.

#### **3.3.4. Perkembangan produksi kelapa sawit**

Dinamika perkebunan kelapa sawit juga dapat dilihat dari perkembangan produksi kelapa sawit selama 10 tahun terakhir (tahun 1993-2003). Dinamika produksi kelapa sawit dapat dilihat berdasarkan hasil produksi tahunan dari perkebunan di Desa Padang Jaya yang dikelola oleh KUD setempat. Sampai pada batas umur tanaman tertentu, produksi kelapa sawit menunjukkan trend yang meningkat yaitu dari tahun 1993 - 2000. Pada tahun 1996-1998 hasil produksi relatif tidak berubah, mungkin sebagai dampak kurangnya pemeliharaan kebun sebelumnya. Pada 4 tahun berikutnya (2000-2003), produksi cenderung menurun, yang menunjukkan semakin rendahnya kualitas pemeliharaan kebun. Hasil produksi kelapa sawit menunjukkan posisi tertinggi pada tahun 2000 yaitu 9.535.440 Kg atau rata rata 23.371 Kg/ unit/ 2 Ha. Menurut pihak KUD, hasil produksi ini tergolong relatif rendah apabila dibandingkan dengan produksi yang seharusnya dihasilkan. Pada umur tanaman lebih dari 15 tahun, seharusnya produksi paling rendah sekitar 30.000 kg/unit/2 Ha.

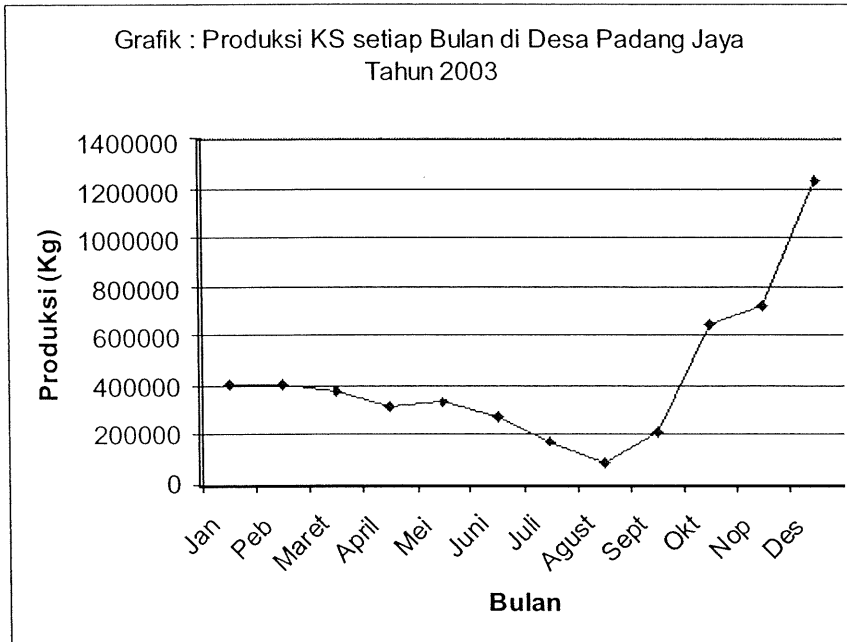
Grafik 1 : Produksi Kelapa Sawit di Kabupaten Pasir



Sumber: diolah dari data KUD, 2003

Fluktuasi produksi kelapa sawit setiap bulan yang dihasilkan oleh petani juga dapat digambarkan dalam grafik produksi kelapa sawit tahun 2003. KUD bersama dengan pihak PTP mencoba meningkatkan produktivitas petani peserta yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dari kelapa sawit. Penghasilan petani dari kelapa sawit sangat ditentukan dari produksi kelapa sawit yang diperoleh dari kebun plasmanya. Dari data yang diperoleh produksi kelapa sawit petani selama tahun 2003, untuk luas areal 700 Ha milik petani rata rata produksi pada tahun itu sebesar 437.583 kg/ bulan atau 625 kg/Ha/bulan. Produksi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2003 yaitu sebesar 1.230.430 Kg atau 1.757 Kg/Ha dan produksi terendah pada bulan Agustus 2003 sebesar 90.680 Kg atau 129 kg/Ha. Keadaan ini menggambarkan rendahnya produksi kelapa sawit didaerah ini Dengan harga kelapa sawit sebesar Rp.522,10/kg pada bulan Agustus 2003 maka pendapatan petani di desa ini sebesar Rp 67.350,-/ Ha Penghasilan tertinggi dari kelapa sawit terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar Rp.1.106.772,-/Ha dimana harga kelapa sawit relatif lebih tinggi yaitu Rp.694,14/kg .(KUD. 2003)(Lihat Grafik 2)

Grafik 2 : Produksi Kelapa Sawit Per Bulan di Desa Padang Jaya Tahun 2003



Sumber: diolah dari data KUD, 2003

### 3.3.5. Dinamika pemasaran produksi dan harga

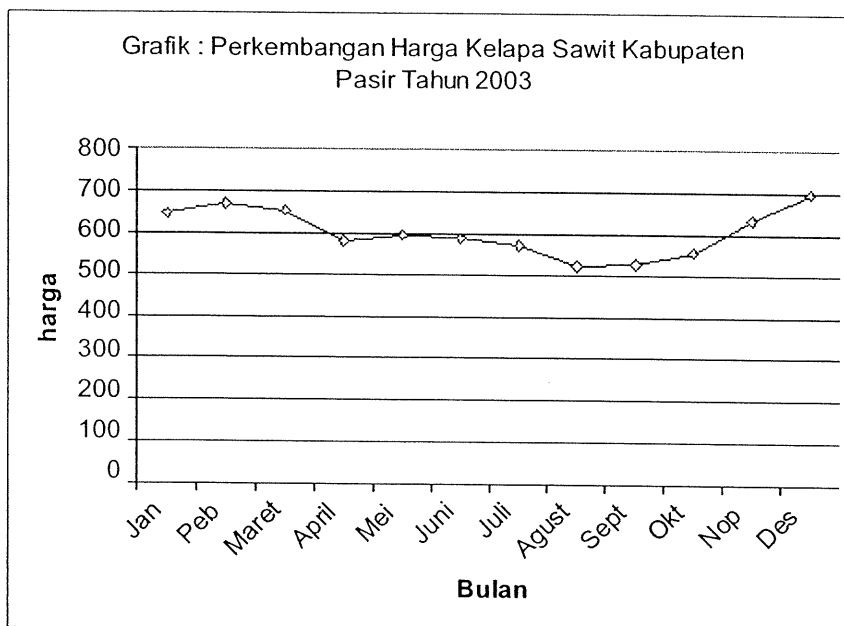
Pemasaran kelapa sawit (TBS) dalam pola PIR-Bun merupakan tanggung jawab dari pihak pemerintah khususnya PTP XIII. Ketentuan ini berlaku selama kredit pinjaman petani belum lunas. Sesuai dengan ketentuan proyek PIR-Bun hubungan inti-plasma dalam pemasaran akan berakhir bila petani telah melunasi angsuran kreditnya. Di Kabupaten Pasir sebagian perkebunan plasma masih belum lunas oleh sebab itu mereka harus menjual hasil produksi kelapa sawit kepada pihak PTP. Bagi perkebunan yang telah lunas, misalnya desa Padang Jaya sesuai dengan ketentuan dapat bebas menjual kelapa sawit kemana saja, akan tetapi dalam kenyataan mereka masih tergantung pada PTP XIII karena keterbatasan perusahaan yang bersedia membeli hasil produksinya.

Pola pemasaran yang berlangsung selama ini dilakukan melalui KUD kemudian disalurkan ke pabrik PTP. Bagi petani yang sudah melunasi kreditnya pada saat ini KUD dapat menjual produk anggotanya kepada pihak perusahaan Swasta. Perkembangan pendapatan petani disamping ditentukan

jumlah produksinya juga perkembangan harga TBS yang ditetapkan. Harga Kelapa sawit ditentukan oleh sebuah konsortium yang diputuskan oleh Bupati Kepala daerah berdasarkan peraturan menteri.

Harga kelapa sawit (TBS) untuk tanaman berumur 10s/d20 tahun setiap bulan di Kabupaten Pasir pada tahun 2003 menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada bulan Desember yaitu Rp.694,14, dan terendah pada bulan Agustus yaitu sebesar Rp.522,10. Keadaan ini menunjukkan bahwa harga kelapa sawit di Kabupaten pasir tidak terlalu berfluktuasi meskipun dalam nilai harga yang relatif rendah yaitu dibawah Rp.700,-. bila dibandingkan dengan harga TBS di Langkat sebesar Rp.829,- (lihat Grafik 3)

Grafik 3: Perkembangan Harga Kelapa Sawit Kabupaten Pasir Tahun 2003.



Sumber: Diolah dari data Dinas Perkebunan Kab. Pasir, 2003

### *Proses Penentuan Harga Kelapa Sawit*

Harga tandan buah segar (TBS) di Kabupaten Pasir pada saat ini ditentukan melalui sebuah konsorsium yang dibentuk berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Pasir ( KPTS Bupati Pasir no 210 Tahun 2004). Dalam keputusan tersebut pertimbangan yang diambil adalah

*“ bahwa didalam ketetapan rumus harga pembelian tandan buah segar (TBS) kelapa sawit terhadap beberapa komponen variable yang selalu berubah dan secara langsung akan menentukan perbedaan besarnya harga pembelian TBS kelapa sawit produksi petani tersebut sehingga untuk penetapan besarnya variable-variabel tersebut perlu adanya pemantauan dan pengkajian secara berkala maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penghitung dan Penetapan Harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Kabupaten Pasir”.*

Dengan pertimbangan semacam ini sebenarnya pihak pemerintah mempunyai kemauan baik untuk dapat menguntungkan semua pihak terutama petani sebagai produsen kelapa sawit.

Pertimbangan yang dipakai dalam keputusan baru ditetapkan pada bulan April 2004. keadaan ini mengandung pengertian bahwa SK ini dikeluarkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses penentuan harga TBS selama ini yang oleh berbagai pihak dinilai kurang transparan. Dalam Keputusan Bupati no, 210 tahun 2004 tugas kelompok kerja penghitungan dan penetapan harga pembelian TBS Kelapa Sawit antara lain membantu tugas teknis tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit yang berada di Propinsi Kalimantan Timur. Hal hal yang disampaikan kepada tim penetapan yang berada di Propinsi Kaltim adalah :

1. Perhitungan dan penetapan faktor “K”
2. Data pengeluaran Pabrik Minyak Sawit (PMS)
3. Rendemen CPO dan inti kelapa sawit
4. Hasil perhitungan pembelian TBS kelapa sawit di Kabupaten Pasir.

Dari ketentuan tersebut diatas menunjukkan secara jelas bahwa harga pembelian TBS untuk Kabupaten Pasir masih harus di ajukan dan ditetapkan oleh Tim Kerja di Tingkat Propinsi Kalimantan Timur. Dari Keputusan Bupati Pasir pihak pihak yang dilibatkan dalam kelompok kerja penghitungan dan penetapan harga pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Kabupaten Pasir adalah :

Penasehat	: Sekretaris Daerah Kabupaten Pasir
Ketua	: Asisten Pembangunan Ekonomi dan Kesra Sekertaris Daerah Kabupaten Pasir
Ketua Harian	: Kepala Sub. Dinas Usaha Tani Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir

- Anggota :
1. Kepala Bagian Perekonomian Sekertaris Daerah Kabupaten Pasir
  2. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir
  3. Kasubag. Produksi 1 Bagian Perekonomian Sekertaris Daerah Kabupaten Pasir.
  4. Distrik Manager PTPN XIII Wilayah Kal.Tim
  5. Manager PMS Samuntai PTPN XIII
  6. Manager PMS Samuntai PTPN XIII
  7. Manager PMS Samuntai PTPN XIII
  8. Manager PMS Samuntai PTPN XIII
  9. Manager PMS Samuntai PTPN XIII
  10. Manager PMS Samuntai PTPN XIII
  11. Pimpinan PT Pradiksi Guntama
  12. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Kabupaten Pasir
  13. Pimpinan PT. Sebatin

Dari daftar anggota kelompok kerja tersebut diatas sebenarnya cukup banyak pihak pihak yang terkait baik dari pemerintah, PTP, Perusahaan dan Asosiasi Petani terlibat dalam penentuan harga TBS. Yang menjadi masalah apakah mereka cukup mempertimbangkan kepentingan masing masing pihak hingga terjadi suasana yang saling menguntungkan. Misalnya apakah Asosiasi petani cukup tahu dan menyadari kepentingan dan kebutuhan petani.

Proses penetapan harga TBS ditingkat kabupaten Pasir (tim kerja) dapat datang dari penerapan rumus yang ditetapkan dalam penghitungan harga TBS, sebagai berikut:

$$HTBS = K(Hcpo \times Rcpo + His \times Ris)$$

Dengan pengertian :

- HTBS : harga TBS yang diterima oleh Petani ditingkat Pabrik dinyatakan dalam Rp/Kg.  
 K : Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh petani dinyatakan dalam persentase (%)  
 Hcpo : Harga rata-rata tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) minyak Kelapa sawit kasar (CPO) masing masing perusahaan selama 1 (satu) bulan sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg.  
 Rcpo : Rendemen minyak sawit, dinyatakan dalam persentase (%)  
 His : Harga rata-rata tertimbang realisasi penjualan ekspor dan lokal Inti sawit selama 1 (satu) bulan sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg  
 Ris : Rendemen inti sawit dinyatakan dalam persentase (%)

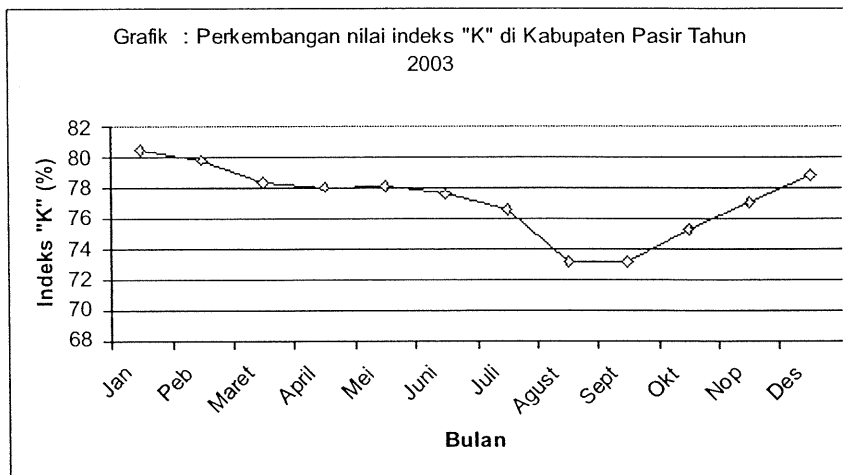
Perhitungan besarnya indeks "K" berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak dan inti sawit serta biaya penyusutan. Rumus perhitungannya adalah :

$$K = \frac{HTBS}{(Hcpo \times Rcpo) + (His \times Ris)} \times 100 \%$$

Dari rumus perhitungan diatas terlihat bahwa peranan indeks "K" dalam penentuan harga TBS yang akan diterima sangat penting. Komponen biaya

pengolahan ikut menentukan besarnya persentase harga yang harus diterima petani. Biaya pengolahan ini dipengaruhi oleh tingkat efisiensi dan proses manajemen yang baik. Disamping itu biasanya pihak perusahaan menghadapi masalah komponen "high cost" yang memperbesar komponen biaya. Bila hal ini terjadi maka yang akan banyak dirugikan adalah petani, karena akan berakibat pada harga TBS yang dihasilkan petani. Kelemahan lain dari penentuan harga TBS adalah kurang disepakatinya ketetapan harga yang telah di bahas secara bersama sama dari banyak pihak. Namun dalam 2 bulan terakhir sejak Pemda memberi izin kepada sebuah perusahaan swasta untuk menampung hasil TBS dari PIR-Swadaya, cenderung terjadi perang harga antara perusahaan swasta dengan PTPN. Perusahaan swasta berani membeli dengan harga di atas harga yang telah di tentukan tersebut. Keadaan ini sebenarnya menguntungkan pihak petani, akan tetapi hal ini juga menunjukkan bahwa harga yang telah ditetapkan dalam Pokja bukan harga mati, karena apabila perusahaan lain diberi kesempatan untuk menampung hasil TBS, akan berdampak positif bagi penetapan harga pasar, karena lebih kompetitif. Hal ini terjadi di daerah lain seperti Sumatera Utara, harga TBS benar-benar ditentukan oleh pasar yang lebih kompetitif, sehingga lebih menguntungkan petani.

Grafik 4: Perkembangan nilai indeks "K" Kabupaten Pasir, 2003



Sumber: diolah dari data Dinas Perkebunan Kab. Pasir, 2003

Bila keadaan diatas tidak diwaspadai maka harga kelapa sawit akan tidak menjadi daya tarik petani untuk meningkatkan produksinya. Hal ini disebabkan karena kepentingan petani kurang terakomodir terutama dalam upaya untuk mendapatkan pupuk yang murah untuk menekan biaya

pemeliharaan kelapa sawit. Bila harga TBS relatif rendah sementara biaya pemeliharaan tinggi maka petani merasa dirugikan

### 3.4. Peranan Lembaga Ekonomi dan Sosial

Seperti telah dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Bun melalui dua pendekatan yaitu pertama pendekatan pembangunan masyarakat pedesaan (*Community Development*) untuk dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pencapaian tujuan pembangunan. Pendekatan kedua melalui peningkatan perekonomian masyarakat petani melalui pengelolaan usaha tani perkebunan kelapa sawit yang lebih profesional. Untuk pelaksanaan ke dua pendekatan tersebut diperlukan peningkatan pembinaan kelembagaan yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat baik dalam pembangunan sosial kemasyarakatan maupun peningkatan perekonomian masyarakat.

Bagian ini akan menganalisis peranan lembaga sosial-ekonomi di Desa Padang Jaya, sebagai desa transmigrasi (PIR-Trans) perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Bun. Beberapa kelembagaan sosial ekonomi tersebut adalah KUD, kelompok tani dan lembaga keagamaan yang berperan dalam pembangunan masyarakat Desa Padang Jaya.

#### 3.4.1. Peran KUD dalam pengelolaan kelapa sawit

Hampir semua desa di Kabupaten Pasir telah mempunyai KUD terutama desa yang terbentuk dari daerah transmigrasi perkebunan pola PIR-Bun. Meskipun demikian perannya berbeda satu sama lain tergantung kepengurusan dan partisipasi aktif dari anggotanya. Peranan KUD dalam pengelolaan kelapa sawit di Desa Padang Jaya cukup besar terutama dalam pengembangan perekonomian masyarakat desa.

Koperasi Unit Desa (KUD) di lokasi penelitian merupakan satu dari 7 KUD di Kecamatan Kuaro, yang didirikan sejak tahun 1992, sebagai pengganti dari Badan Koordinasi Tani Hambaran (BKTH). Pada tahun pertama pendirian KUD pelayanan kepada anggota lebih dikonsentrasikan pada proses penjualan/ pemasaran produksi kelapa sawit petani ke PTP XIII. Sebagai koperasi yang berada di tengah masyarakat pekebun, selain berperan dalam bidang pemasaran hasil, juga mempunyai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan produksi kelapa sawit. Penyediaan sarana pupuk dan obat-obatan (pestisida) juga dapat dilayani dengan harga yang bersaing. Dalam tahapan dimana petani belum melunasi kreditnya, kegiatan KUD merupakan



kepanjangan tangan dari PTPN dalam pengelolaan kelapa sawit dan proses pengembalian kreditnya. KUD merupakan tangan pertama yang berhubungan dengan petani dan menerima keluhan petani anggotanya dalam hubungannya dengan pola hubungan inti-plasma.

Dalam tahapan ini nampaknya KUD masih berperan sebagai kepanjangan tangan atau lembaga yang menjembatani antara pemerintah (PTPN XIII), Bank dan petani. Peranan ini sebenarnya sangat sentral dan penting, namun kenyataan selama ini KUD masih belum berdaya sepenuhnya untuk mencukupi kebutuhan petani dalam peningkatan produksi kelapa sawit. Penyediaan pupuk misalnya masih belum seperti diharapkan, selain kelancaran persediaan juga harga yang ditetapkan masih cukup tinggi dan hampir sama dengan harga pasaran. PTPN sebagai bagian dari peranan pemerintah belum berhasil untuk mendekatkan KUD dengan pihak pertama (pabrik pupuk) agar mendapatkan harga yang cukup baik. Selama ini baik pada saat petani masih dibawah pembinaan langsung PTPN maupun setelah konversi, KUD menerima pupuk dari pihak kedua sehingga bagi kebanyakan petani harga pupuk yang ditetapkan kurang dapat dijangkau. Padahal pabrik pupuk terbesar berada di Kaltim, sehingga seharusnya KUD mampu mendapatkan harga dari tangan pertama agar cukup murah.

KUD mempunyai jumlah staf yang terbatas yaitu beberapa petani pekebun, sehingga proses pembinaan petani melalui kelompok tani yang telah dibentuk kurang berjalan dengan baik karena setelah konversi, pembinaan dari pihak PTPN sangat berkurang. Hubungan petani plasma dan inti secara formal boleh dikatakan berakhir, bersamaan dengan lunasnya cicilan kredit petani pada perusahaan. Penanggung jawab pembinaan petani pekebun sebelum secara definitif ditetapkan menjadi desa, berada di tangan KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi). Nampaknya diperlukan campur tangan yang intensif dan terpadu antara Dinas terkait Kabupaten Pasir dengan PTPN dalam pembinaan petani selanjutnya, terutama menjelang peremajaan tanaman (replanting), sekitar 5 tahun mendatang.

Peran utama KUD Padang Jaya tidak hanya terbatas pada hal yang berkaitan dengan kelapa sawit. Pelayanan lainnya sejak berdirinya KUD ini antara lain Warung Serba Ada (Waserda), penggilingan padi, dan simpan pinjam. Kegiatan Waserda masih berlangsung sampai sekarang dan merupakan kegiatan yang sangat populer dan dirasakan menolong kehidupan sehari-hari terutama kebutuhan pangan. Sebagian besar petani memanfaatkan kesempatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari melalui pinjaman dan kemudian dibayar dengan memotong penghasilan petani dari penjualan hasil produksi kelapa sawitnya. Keadaan ini berlangsung terus setiap bulan, terutama pada saat pendapatan petani kelapa sawit menurun

dalam beberapa bulan terakhir. Pola kehidupan petani dengan sistim meminjam kepada KUD lebih dulu dan membayar kemudian, seringkali berdampak sisa penghasilan kecil atau bahkan minus, terutama apabila penghasilan rendah. Keadaan semacam ini menjadikan peran KUD melalui kegiatan Waserda semakin penting dan sangat diharapkan karena banyak menolong anggota dalam kesulitan keuangan.

### 3.4.2. Peranan Organisasi Sosial

#### *Kelompok Tani*

Masyarakat di Desa Padang Jaya umumnya tergabung dalam beberapa kelompok tani, yang dibentuk berdasarkan kesamaan hamparan kebun sawit. Setiap hamparan kebun luasnya bervariasi sekitar 50-60 Ha dan dikelola oleh sekelompok petani (25-30 orang), dengan rata-rata garapan seluas 2 Ha per anggota kelompok. Pembentukan kelompok tani dalam pola PIR-Bun semula bertujuan terutama untuk mempermudah pengorganisasian petani peserta oleh PTP XIII. Sehingga proses awal pembentukan bukan merupakan kehendak masyarakat, tetapi dibentuk oleh pihak Pembina yaitu perusahaan inti. Pembentukan lebih didasarkan pada satuan hamparan kebun yang merupakan hasil dari undian petani sewaktu konversi. Cara ini ditempuh untuk mempermudah pembinaan petani maupun pengelolaan kebunnya. Di seluruh Desa Padang Jaya sudah terbentuk 14 kelompok tani, tiap kelompok tani memiliki kepengurusan sendiri (ketua, sekretaris dan bendahara), dan mempunyai nama yang berbeda.

Pada tahap sebelum petani melunasi kredit pada perusahaan, kelompok tani berfungsi mempermudah KUD maupun PTP XIII berkomunikasi dengan petani peserta PIR-BUN. Penyampaian pembinaan maupun informasi dapat dilakukan melalui ketua kelompok tani. Ketua kelompok tani kemudian mengadakan pertemuan dengan anggotanya untuk menyampaikan informasi atau merencanakan kegiatannya. Pola hubungan semacam ini terus berlangsung sampai saat ini dan telah tersosialisasi dengan baik di kalangan petani. Hampir tidak ada petani yang tidak menjadi anggota kelompok tani.

#### *Lembaga Keagamaan*

Mayoritas penduduk di Desa Padang Jaya beragama Islam. Kehidupan beragama di Desa Padang Jaya berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya kegiatan beragama yang rutin, seperti pengajian, sholat Jumat dan kegiatan keagamaan lainnya, yang diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan

pemuda melalui pemuda masjid, ibu-ibu pengajian serta kaum bapak nampak berjalan selama ini. Kegiatan keagamaan yang banyak diikuti masyarakat, berdampak positif terutama dalam menjembatani hubungan sosial antar etnis yang berbeda di masyarakat transmigran. Hubungan yang harmonis juga dapat terjadi dengan penduduk setempat melalui kegiatan agama yang mereka lakukan secara bersama.

Salah satu bentuk kongkrit dari hasil kegiatan mereka adalah dibangunnya tempat ibadah yaitu mesjid sebagai hasil kerjasama antara masyarakat yang berbeda etnis, baik pendatang maupun penduduk setempat. Keadaan ini tampaknya menjadi kebanggaan masyarakat Desa Padang Jaya. Dalam pembukaan dan peresmian mesjid tersebut yang bertepatan dengan kegiatan peneliti di lapangan, tampak dihadiri oleh Bupati Kepala Daerah bersama stafnya, dan peristiwa ini merupakan prestasi yang membanggakan masyarakat Desa Padang Jaya. Diharapkan kegiatan selanjutnya dapat berdampak pada sikap moral yang baik dalam masyarakat menuju masyarakat sejahtera baik moral maupun ekonomi. Usaha ini sangat penting karena sebagai daerah yang mulai berkembang secara ekonomi, tidak menutup kemungkinan adanya pengaruh negative dari luar seperti kegiatan perjudian dan minuman keras terutama di kalangan pemuda. Masyarakat juga cenderung mulai terpengaruh dengan kehidupan yang konsumtif, yaitu mengutamakan konsumsi yang berlebihan yang dikuatirkan akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat umumnya.

#### 3.4. Kesimpulan

- Perkebunan Kelapa Sawit Pola PIR-BUN di Kalimantan Timur dan khususnya di Kabupaten Pasir relatif baru ( 1982-2004) dibandingkan dengan Propinsi lain di Indonesia.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir secara positif menanggapi keinginan masyarakat setempat untuk ikut serta dalam perkebunan kelapa sawit pola PIR-Bun dengan mencanangkan program/proyek PIR-Swadaya dengan dana dari Pemda Kabupaten dan Propinsi.
- Tawaran kemudahan investasi di Kalimantan Timur cukup menarik, akan tetapi realisasi tanam relatif rendah. Secara keseluruhan baru 10 persen (Kaltim) dan Kabupaten Pasir mencapai sekitar 45 persen. Perlu dicari solusinya.
- Hubungan antara Plasma-Inti semasa persiapan dan setelah konversi kurang menunjukkan hubungan yang saling menguntungkan. Keadaan ini berakibat buruk pada produktivitas dan sikap petani dalam pengelolaan kebunnya.
- Penetapan harga TBS masing dirasakan kurang transparan karena petani dan berbagai pihak terkait merasa kurang diikuti sertakan. Meskipun

demikian Pemda Kabupaten telah menerbitkan SK Bupati No. 220 Tahun 2004 untuk membentuk tim penetapan harga TBS yang lebih transparan.

**PENYERAPAN TENAGA KERJA  
DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

Pengembangan sub sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Pasir. Selain untuk mendukung perekonomian daerah, pengembangan perkebunan kelapa sawit juga bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, baik lapangan pekerjaan yang disediakan oleh perkebunan itu sendiri maupun kesempatan kerja yang dapat diciptakan oleh industri hilir yang menggunakan hasil kelapa sawit sebagai bahan bakunya. Perkebunan kelapa sawit mulai dikembangkan di Kabupaten Pasir pada tahun 1982/1983, oleh perusahaan milik negara yaitu PTPN XIII, dengan pola Perusahaan Inti Rakyat – Perkebunan (PIR-BUN). Dalam pola PIR-BUN ini PTPN XIII sebagai perusahaan inti dan sebagai plasma adalah masyarakat /petani. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir kemudian tidak hanya didominasi oleh perusahaan negara tetapi juga dilakukan oleh perusahaan swasta dan masyarakat setempat. Pada bagian ini akan dilihat bagaimana penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir menurut pola pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit seperti PTPN XIII, Perkebunan Plasma, dan PIR- Swadaya) serta penyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan kelapa sawit (CPO). Untuk mengetahui penyerapan tenaga kerja dan latar belakang sosial ekonomi pekerja yang terserap di perkebunan kelapa sawit, digunakan data primer terutama dari hasil survei terhadap 150 petani plasma PIR-BUN di Desa Padang Jaya. Sumber data lainnya adalah wawancara mendalam terhadap staf perusahaan PTPN XIII, pengelola PIR-Swadaya, dan perusahaan swasta yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir.

**4.1. Dinamika Penyerapan Tenaga Kerja**

Salah satu tujuan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir adalah menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Lapangan pekerjaan yang dapat diciptakan bukan hanya terbatas pada usaha perkebunan kelapa sawit, akan tetapi juga kesempatan kerja dari industri pengolahan hasil kelapa sawit (CPO). Besarnya tenaga kerja yang terserap sangat ditentukan oleh perkembangan perkebunan kelapa sawit dilihat dari peningkatan areal tanaman kelapa sawit. Dilain pihak jumlah maupun karakteristik tenaga kerja dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit mengalami perubahan baik dilihat dari dimensi waktu dan ruang/ tempat. Dari sisi waktu dinamika merupakan gambaran perubahan tenaga kerja yang

terserap di perkebunan kelapa sawit dari waktu ke waktu. Kemudian dari sisi ruang, penyerapan tenaga kerja berbeda menurut pola pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

#### 4.1.1. Tenaga kerja pada perusahaan Inti PIR-BUN

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir yang pertama yaitu pada tahun 1982/1983 merupakan perkebunan dengan pola PIR-BUN dengan PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) sebagai perusahaan inti. Tenaga kerja yang terlibat dalam awal pembangunan kebun kelapa sawit terdiri dari pekerja kebun inti dan pekerja kebun plasma. Pekerja kebun inti merupakan hasil kesepakatan bersama antara Serikat Pekerja dan Direksi BUMN. Sedangkan pekerja kebun plasma merupakan hasil kerja sama Dirjen Transmigrasi dan Dirjen Perkebunan, sehingga pola perkebunan demikian juga disebut sebagai pola PIR-Trans. Tenaga kerja yang terserap di PTPN XIII terdiri dari tenaga kerja yang bekerja di kebun inti kelapa sawit dan pekerja di pabrik pengolahan kelapa sawit (CPO). Pada saat ini di Kabupaten Pasir, PTPN XIII memiliki tiga lokasi perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN yaitu Kebun Tajati, Kebun Tabara dan Kebun Long Kali. Sedangkan pabrik pengolahan kelapa sawit CPO juga berjumlah 3 buah yaitu Pabrik Minyak Sawit (PMS) Long Pinang, PMS Long Kali dan PMS Semuntai. Tenaga kerja yang bekerja di PTPN XIII ini terdiri dari tenaga kerja tetap (staf) dan tenaga kerja harian lepas (pekebun)..

Berdasarkan wawancara mendalam dengan staf perusahaan PTPN XIII dan data sekunder dari bagian personalia yang tersedia, secara keseluruhan tenaga kerja yang terserap di PTPN XIII berjumlah 2.258 orang, terdiri dari tenaga kerja di kebun inti sebanyak 1.749 orang, di pabrik sebanyak 495 orang dan sebagai staf perusahaan sebanyak 14 orang (distrik manager). Sebagai tenaga pelaksana di perusahaan, sekitar separuhnya merupakan tenaga kerja harian lepas atau tenaga kerja musiman. Sistem pengupahan untuk kelompok pekerja kebun yang berstatus harian lepas ini, biasanya menerima upah sesuai dengan jumlah hari kerja yang dilakukan dan besarnya disesuaikan dengan besarnya UMR (Upah Minimum Regional) di daerah tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan oleh pekerja kebun kelapa sawit sejak masa penanaman sampai sekarang adalah menanam bibit, mendongkel, nunas, memupuk, menyangi / membersihkan gulma, menyemprot obat anti hama, panen dan mengantar hasil panen yaitu tandan buah segar (TBS) ke pabrik CPO segera sesudah dipetik.

Sebagai tenaga kerja harian lepas dan musiman ini biasanya adalah penduduk yang tinggal di sekitar kebun kelapa sawit, baik mereka yang

sudah bekerja sejak awal pembangunan kebun maupun yang dibutuhkan pada saat panen atau penyemprotan obat anti hama. Sebagian pekerja ini sudah bekerja di kebun sejak masa persiapan kebun dan dilanjutkan sebagai pekerja kebun inti milik perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang bekerja di PTPN XIII, tampaknya tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti, mengingat umur tanaman yang semakin tua dan jenis kegiatan yang dilakukan tidak sebanyak pada masa persiapan dan penanaman. Penambahan tenaga kerja biasanya dilakukan pada musim-musim tertentu seperti panen atau apabila perusahaan akan memperluas areal perkebunan inti kelapa sawit. Namun melihat perencanaan perkembangan areal kebun kelapa sawit di Kabupaten Pasir yang cenderung ke perkebunan rakyat dan perkebunan swasta besar (PBS), maka penyerapan tenaga kerja di PTPN XIII akan lebih terbatas dibandingkan penyerapan tenaga kerja pada pola perkebunan swasta. Bahkan kasus tanah perkebunan yang semula merupakan kebun inti milik PTPN XIII seluas 2000 Ha, dan kemudian beralih menjadi milik rakyat dari 10 desa, kemungkinan dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja di kebun inti. Sampai sekarang upaya PTPN untuk mengganti kebun inti dengan pembukaan kebun inti baru sedang dalam proses pengurusan izin lokasi. Penyiapan kembali dan pemeliharaan selama belum menghasilkan, akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap di perusahaan..

Keberadaan 3 buah pabrik pengolahan minyak sawit (PMS) atau CPO milik PTP XIII juga merupakan industri hilir terkait dengan perkembangan perkebunan kelapa sawit. Pabrik CPO tersebut juga mampu menyediakan tambahan lapangan kerja bagi penduduk setempat, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit. Jumlah tenaga kerja yang terlibat di pabrik CPO ini mencapai sebanyak 495 orang. Penyerapan tenaga kerja di pengolahan kelapa sawit pasca panen masih potensial untuk ditingkatkan, karena masih belum terpenuhinya kebutuhan pabrik CPO, yang bidealnya berjumlah 6 buah. Demikian pula di Kabupaten Pasir dan Kaltim pada umumnya industri pengolahan hasil kelapa sawit masih terbatas pada industri CPO, belum mengarah pada perkembangan industri hilir turunan CPO lain, seperti minyak goreng dan olein seperti di daerah lain. Rencana pemerintah daerah untuk menambah 3 buah pabrik CPO dalam memenuhi kebutuhan pengolahan hasil TBS yang ada, dapat diharapkan akan menyerap lebih banyak pekerja di pabrik CPO, minimal sejumlah pekerja di pabrik CPO yang ada yaitu 495 orang.

#### **4.1.2. Tenaga kerja pada perkebunan plasma pola PIR-BUN**

Pada awal pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir yaitu pada tahun 1982/1983, kegiatan utama di perkebunan

adalah menyiapkan lahan perkebunan dan penanaman bibit kelapa sawit baik di kebun inti maupun kebun plasma. Kegiatan perkebunan pada masa ini sepenuhnya dilaksanakan oleh PTPN XIII dengan melibatkan masyarakat sebagai buruh di perusahaan. Namun pengelolaan kebun plasma selanjutnya, dibutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai petani plasma. Sebagian besar kebutuhan tenaga kerja sebagai pengelola kebun plasma dengan mendatangkan transmigran dari Pulau Jawa pada tahun 1987. Masyarakat lokal yang dilibatkan sebagai petani plasma relatif kecil, yaitu sekitar 20 %, karena waktu itu belum banyak yang tertarik untuk mengelola perkebunan kelapa sawit. Kegiatan pada awal dimulai dengan pembibitan dan penanaman pohon kelapa sawit baik pada kebun inti maupun plasma. Dalam mengembangkan proyek perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, Departemen Perkebunan bekerja sama dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mendatangkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan proyek, dalam hal ini "transmigrasi menjadi proyek derivatifnya sebagai penyedia tenaga kerja terampil" Transmigrasi dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun pusat pertumbuhan baru untuk memperluas kesempatan kerja ( Swasono, dikutip dari Purwono dan Siregar, 2004).

Salah satu lokasi penempatan transmigran pada awal pengembangan perkebunan di Kabupaten Pasir adalah Desa Padang Jaya (semula Desa Rangan Jaya), Kecamatan Kuaro. Lokasi ini merupakan UPT yang menampung rombongan angkatan pertama yang datang pada tahun 1987 dan berjumlah 350 keluarga, terdiri dari 300 KK transmigran dari Jawa, dan 50 KK transmigran lokal. Transmigran berasal dari Jawa Barat 200 KK dan Jawa Tengah 100 KK. Sesuai dengan konsep program PIR-BUN, selain memperoleh lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2 Ha per KK, petani juga memperoleh hak-hak lainnya yaitu : lahan pangan seluas 0,75 ha, lahan pekarangan seluas 0,25 Ha dan rumah tinggal, serta jaminan hidup selama setahun berupa beras dan lauk pauk melalui Departemen Transmigrasi. Selama kebun kelapa sawit belum menghasilkan, petani plasma melakukan kegiatan di kebun plasma secara berkelompok dengan mendapatkan upah kerja dari perusahaan inti yaitu PTPN XIII. Berdasarkan data dari PTPN XIII pada tahun 2004, luas areal kebun inti milik PTPN XIII mencapai 13.270 Ha dan luas kebun plasma mencapai 17.640 Ha yaitu 9.146 Ha di Samuntai dan 8494 Ha di Long Pinang. Kebun plasma ini melibatkan sekitar 8.820 KK petani. Apabila masing-masing keluarga mempunyai jumlah anggota rumah tangga rata-rata 2 orang (suami dan isteri) untuk mengerjakan kebun plasma, maka jumlah tenaga kerja yang terserap di perkebunan plasma kelapa sawit sekitar 17.640 orang .

Jumlah tenaga kerja yang terserap di perkebunan plasma, terutama pada masa panen kemungkinan lebih besar dari 17.640 orang, karena sebagian



petani plasma menggunakan tenaga kerja di luar anggota keluarga sebagai buruh untuk mengerjakan kebun kelapa sawit mereka. Hal ini juga terjadi di Desa Padang Jaya, dimana pada masa panen banyak petani mempekerjakan buruh paling sedikit 2 orang terutama pada waktu panen. Sebagai buruh pada waktu panen biasanya diambil dari pecahan KK yang umumnya tidak memiliki lahan kebun kelapa sawit. Tenaga kerja sebagai buruh pada waktu panen mudah diperoleh, karena pada umumnya para pemuda tidak memiliki pekerjaan tetap di luar perkebunan kelapa sawit milik orang tuanya. Seiring dengan anak-anak keluarga petani yang makin dewasa, orang tua juga semakin tua, sehingga memerlukan bantuan keluarganya di lokasi.

Pada awal pengelolaan kebun kelapa sawit, terutama sejak tahun kedua dimana jaminan hidup selesai diberikan, banyak petani plasma menghadapi kesulitan hidup sehingga banyak petani meninggalkan lokasi perkebunan, dengan menelantarkan kebunnya. Faktor lain yang mendorong mereka meninggalkan lokasi adalah upah yang tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarganya. Menurut informasi dari informan (petani plasma), upah yang semula diterima dengan sistem harian, berubah menjadi sistem borongan, yang nilainya lebih kecil dari sebelumnya. Upah harian sebesar Rp1500 sehari juga dinilai terlalu kecil untuk hidup bersama keluarganya. Akibatnya penghasilan yang diperoleh tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut dikemukakan oleh beberapa informan, antara lain Kepala Unit Pelaksana Proyek (KUPP) sebagai berikut :

*“Pada tahun 90 an belum konversi, masih konsolidasi ,padahal jatah hidup habis, upah kecil. Pada saat itulah banyak yang pulang, yang masih bertahan membuka lahan pangan dengan cara membakar. Kemudian ditanami padi atau palawija dengan peralatan sederhana” .*

Pada saat itu merupakan kondisi yang penuh dengan ‘perjuangan hidup’, meskipun demikian untuk kesehatan masih ditanggung oleh perusahaan.. Mereka yang tidak tahan dengan kondisi tersebut, meninggalkan lokasi, sebagian pulang ke daerah asalnya. Kemungkinan mereka memutuskan pulang karena ‘harapan untuk merubah nasib’ tidak terpenuhi. Hasil survei terhadap 150 responden petani plasma menunjukkan mayoritas petani plasma memutuskan pindah bekerja di perkebunan kelapa sawit, dengan alasan utama ‘ingin merubah nasib’ (50%) dan ‘ingin meningkatkan taraf hidup / penghasilan’ ( 40 persen) (Tabel 4.1).

Tabel 4.1.  
Alasan Responden Pindah Bekerja ke Kebun Kelapa Sawit

Alasan Pindah	Persen
Merubah Nasib	49,6
Meningkatkan penghasilan/ taraf hidup	40,3
Mengikuti program transmigrasi	2,5
Mencari pengalaman	2,5
PHK	0,8
Ikut Orang tua/ keluarga	2,5
Ingin memiliki Lahan sendiri	1,7
Jumlah	100
	(N =150)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit di Pasir, Kaltim PPK – LIPI, 2004

Alasan seseorang meninggalkan daerah asal karena didorong oleh harapan meningkatkan kesejahteraan, sejalan dengan teori migrasi yang dikemukakan Todaro, yaitu harapan kesejahteraan merupakan pertimbangan utama seseorang untuk bermigrasi (dikutip dari Nuhung, 2003).

Pada tahun-tahun berikut, bahkan setelah konversi yaitu tanaman sawit sudah menghasilkan, masih banyak petani yang kembali ke daerah asal di Jawa., terutama yang berasal dari Jawa Barat. Kemungkinan dipengaruhi oleh latar belakang mereka yang di daerah asal sebagai petani lahan pangan, bukan sebagai petani perkebunan. Pekerjaan di kebun mungkin dirasakan lebih berat bila dibandingkan kegiatan di lahan pangan. Hal ini juga disampaikan oleh mantan KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) bahwa :

*“ Yang banyak meninggalkan lokasi itu orang Jawa Barat karena pindahan dari Proyek Cirata (proyek bendungan), mereka biasa bertani di sawah. Pada waktu itu persyaratannya hanya kesehatan, surat nikah dan umur maksimal 50 tahun. Memang tidak ada persyaratan berasal dari petani perkebunan, makanya mereka kaget kerja di kebun”.*

Pada saat ini petani plasma yang merupakan transmigran asli hanya tinggal sekitar 50 persen dari jumlah transmigran yang datang pada tahun 1987. Sebagai transmigran asli nama mereka terdaftar di KUD sejak awal hingga saat ini. Sedangkan petani pengganti biasanya namanya sudah berbeda dan datang sesudah tahun 1997. Menurut pendapat salah satu informan (mantan KUPT), pola demikian yaitu meninggalkan lokasi dan digantikan orang lain, biasa terjadi di setiap kebun plasma. Adanya peraturan tentang pencabutan hak yang diperoleh petani transmigran, apabila meninggalkan

pencabutan hak yang diperoleh petani transmigran, apabila meninggalkan lokasi selama 3 bulan berturut-turut, tidak menghalangi petani untuk meninggalkan kebun plasma, dan menggantikan dengan pemilik lainnya.

Motif lainnya petani meninggalkan kebun plasmanya, adalah nilai jual kebun yang makin meningkat setelah kebun menghasilkan. Motif memperjual belikan kebun yang menjadi jatah petani transmigran, dilakukan oleh beberapa petani yang terbiasa menyalahgunakan haknya, tanpa mau memenuhi kewajibannya. Setelah hak-hak sebagai transmigran diperoleh, mereka kembali ke daerah asal dengan membawa hasil penjualan lahannya. Wawancara mendalam dengan beberapa informan dari KUD dan keluarga petani plasma, menunjukkan beberapa kasus petani menjual kebun yang menjadi haknya, dengan motif penjualan untuk memenuhi persyaratan perkawinan, yang diminta keluarga pengantin perempuan, atau untuk membayar hutang yang semakin banyak baik kepada KUD atau lainnya.

Kasus petani plasma meninggalkan lokasi kebunnya juga dialami transmigran lokal yang berada di Desa Padang Jaya. Adapun yang dimaksud dengan transmigran lokal pada penelitian ini adalah petani plasma yang merupakan penduduk asli Pasir, baik yang berasal dari desa di sekitar lokasi, atau bahkan juga berasal dari luar Kabupaten Pasir, tapi orang asli Kalimantan. Jumlah transmigran lokal yang semula berjumlah 50 KK di Desa Padang Jaya, kini hanya tinggal 30 KK. Seorang informan menjelaskan, bagi transmigran lokal, meninggalkan lokasi transmigran merupakan hal yang biasa, karena mereka memiliki juga tempat tinggal dan lahan di lokasi asalnya. Petani lokal juga biasa hidup dengan ladang berpindah, apabila di suatu lokasi ladang yang digarapnya sudah tidak menghasilkan, mereka akan pindah untuk mencari ladang baru. Kemungkinan mereka meninggalkan kebun plasmanya hanya bersifat sementara, mengikuti pola gilir balik yaitu "mengistirahatkan" satu lokasi *pahumanan*, dan beberapa tahun kemudian mereka akan kembali (*pahumanan* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut daerah perladangan) (Kompas, 2004). Kebiasaan seperti ini juga dilakukan di lokasi PIR –Trans Padang Jaya, terutama sejak tahun kedua yaitu sesudah jatah hidup habis. Meskipun mereka telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai petani plasma, namun kebanyakan petani lokal tidak mau dianggap telah meninggalkan lokasi. Perbedaan transmigran lokal dengan transmigran dari Jawa, ketika meninggalkan lokasi transmigran lokal biasanya meninggalkan begitu saja dan tidak menjual lahannya. Menurut informan (mantan KUPT) transmigran lokal pada umumnya tidak melaporkan waktu meninggalkan lokasi, karena takut harus mengembalikan uang. "*Orang lokal banyak yang pergi meninggalkan plasma begitu saja, karena bayangannya takut kalau disuruh bayar sekian juta*".

Berdasarkan status kepemilikan lahan, sebagian kebun plasma yang ada di Padang Jaya, sudah berpindah tangan ke pihak lain. Berpindahnya hak pemilikan kebun plasma ini juga didukung oleh catatan nama-nama anggota KUD maupun hasil survei. Berdasarkan tahun kedatangan responden ke lokasi, dapat dikatakan mereka yang datang sesudah tahun 1987, adalah petani plasma pengganti. Transmigran sebagai petani plasma yang asli datang ke lokasi berombongan sebagai peserta PIR-Trans atau PIR-BUN tahun 1987. Data survei menunjukkan sekitar 44 persen responden datang sesudah tahun 1987, dan lebih dari separuhnya datang sesudah tanaman menghasilkan (sesudah tahun 1990). Hal ini berarti petani plasma yang asli tinggal 56 persen, dan selebihnya merupakan petani pengganti (Tabel 4.2). Data pemilikan lahan terkait dengan tahun kedatangan petani pada Tabel 4.2, juga menunjukkan petani pengganti terutama yang datang sesudah tahun 1990, sebagian besar (sekitar 64%) memiliki lahan perkebunan di atas 3 Ha. Sementara transmigran yang asli mayoritas (di atas 60%) hanya memiliki lahan plasma dan pekarangan sesuai dengan jatah petani plasma (maksimal 3 Ha). Keadaan ini makin meyakinkan bahwa sebagai petani plasma pengganti mereka mendapatkan lahan perkebunan dengan jalan membeli kebun plasma. Pemilikan lahan kebun plasma para pengganti ini relatif lebih besar dari jatah transmigran (2 Ha), cenderung mereka umumnya datang dengan membawa modal, sehingga kemungkinan sebagai investor, bukan sebagai petani. Hal ini dapat dilihat dari para pengganti transmigran yang umumnya melaksanakan kegiatan kebun plasma, terutama waktu panen, dengan jalan diupahkan atau menggunakan tenaga di luar keluarga.

Tabel 4.2.

Luas Pemilikan Lahan Menurut Tahun Kedatangan di Desa Padang Jaya

Luas Pemilikan Lahan	Th 1987	Th 1988 - 1990	Th > 1990	Jumlah
2 - 3 Ha	60,7	68,7	36,4	57,0
3,01 - 7 Ha	28,6	15,6	48,5	30,2
7,01 + Ha	10,7	15,6	15,2	12,7
Jumlah	100 (84)	100 (32)	100 (33)	100 (149)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, PPK - LIPI 2004.

Harapan untuk 'perubahan taraf hidup' yang merupakan alasan petani untuk pindah bekerja atau memilih menjadi petani plasma kelapa sawit, masih dirasakan belum terpenuhi sampai sekarang, meskipun petani plasma sudah memanfaatkan hasil kelapa sawit sejak tahun 1990 (mulai panen). Hasil survei menunjukkan proporsi terbesar responden (44 persen) menyatakan bahwa keadaan ekonomi rumah tangga sekarang ini 'sama saja' bila

dibandingkan dengan keadaan ekonomi pada sekitar tahun 1997 (Tabel 4.3). Hanya sekitar sepertiga responden merasakan keadaan ekonomi lebih baik (28,7 persen) dari keadaan sebelum krisis, bahkan sekitar 27 persen merasa keadaannya lebih buruk. Namun demikian pada umumnya petani plasma yang masih bertahan merasakan keadaan sekarang lebih baik daripada perjuangan hidup mereka di tahun awal kedatangan mereka ke lokasi. Kesulitan hidup mulai dirasakan kembali setelah hasil produksi kelapa sawit mulai menurun dan kebutuhan hidup makin meningkat sejalan dengan kebutuhan anak-anak yang meningkat untuk pendidikan. Hal ini dirasakan oleh beberapa petani plasma yang menganggap kepindahan mereka ke lokasi tidak banyak mengalami perubahan taraf hidup.

Tabel 4. 3.  
Perbandingan Perekonomian Rumah Tangga Responden  
Saat ini dan Sebelum Krisis Ekonomi (1997)

Keadaan ekonomi RT	Persen
Sama saja	44,0
Lebih baik	28,7
Lebih buruk	27,3
Jumlah	100 (N =150)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, PPK – LIPI 2004.

#### 4.1.3. Tenaga kerja di koperasi (KUD)

Didalam konsep PIR-BUN, petani plasma merupakan mitra kerja (*partner*) perusahaan inti. Petani diharapkan dapat menjadi petani yang mandiri dan mampu mengelola dan mengembangkan usahanya. Dalam mengembangkan usahanya tersebut petani plasma membentuk kelompok tani yang dikoordinir oleh KUD setempat. Di Desa Padang Jaya terdapat sebuah KUD dengan nama 'KUD Rangan Jaya' yang dibentuk pada tahun 1992, sebagai badan usaha yang mempunyai fungsi pokok untuk mengidentifikasi kebutuhan anggota yaitu petani plasma. Sesuai dengan fungsinya yaitu melakukan kegiatan manajemen dan kegiatan usaha, maka KUD di desa ini mengikuti prinsip dasar dan cara-cara seperti yang biasa dilakukan pada badan usaha pada umumnya. Hal ini wajar karena dibentuknya KUD dengan tujuan sebagai penghubung antara petani dengan perusahaan, terutama sesudah kebun kelapa sawit menghasilkan.

Pembentukan organisasi KUD tersebut tidak terlepas dari strategi perusahaan dalam memudahkan koordinasi petani plasma. Baik pengurus maupun anggota KUD adalah petani plasma di daerah tersebut. Sebagai gambaran, susunan organisasi KUD terdiri dari 5 orang pengurus, yaitu Ketua, Wakil

susunan organisasi KUD terdiri dari 5 orang pengurus, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, II dan Bendahara, kemudian 3 orang pengawas serta 12 orang karyawan mengelola unit-unit usaha, antara lain (Unit Waserda 3 orang, Unit Plasma 1 orang, Unit Simpan Pinjam 1 orang, Unit RMU 2 orang, Unit Angkutan 3 orang, Unit Saprodi 1 orang, Penjaga 1 orang). Hal ini berarti selain kegiatan mereka sebagai petani plasma, mereka juga dapat merangkap melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengelolaan kelapa sawit milik bersama. Kegiatan yang dilakukan pengurus KUD bervariasi antara lain kegiatan di Waserda, mengurus angkutan dari kebun ke pabrik, menerima pembayaran dari pabrik CPO, mengurus cicilan petani, penyaluran pupuk dari agen ke petani, dan sebagai perantara dari petani ke PTPN atau swasta dalam penjualan tandan buah segar. Dengan kata lain petani plasma masih mempunyai waktu untuk melakukan kegiatan di luar pekerjaan sebagai petani plasma, apabila tersedia kesempatan kerja lain di luar pekerjaan sebagai pekebun. Apabila dapat diciptakan kesempatan kerja lain, baik dengan perluasan kebun kelapa sawit, maupun di luar kebun (off farm), petani dapat meningkatkan penghasilannya, sehingga dapat mempercepat perubahan taraf hidup yang diharapkan.

#### 4.1.4. Tenaga kerja pada PIR- Swadaya

Sesudah tahun 1990, animo masyarakat setempat semakin besar untuk terlibat sebagai petani kelapa sawit, sementara proyek PIR-BUN sudah tidak mampu melibatkan lebih banyak petani plasma. Untuk mengantisipasinya pengembangan kelapa sawit dilanjutkan dengan pola PIR-Swadaya yang dikelola oleh Pemda Kabupaten Pasir dengan dana dari APBD I dan APBD II. Proyek PIR-Swadaya yang dimulai sejak tahun 1991/1992, memanfaatkan lahan petani setempat seluas 4.324 Ha (APBD I) dan 1.499 Ha (APBD II), dan 1.147 Ha (swadaya murni), dengan melibatkan masyarakat lokal sebanyak 3863 orang (Disbun Kaltim, 2003). Lokasi PIR-Swadaya mencakup 5 Kecamatan, yaitu Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot serta Kecamatan Pasir Belenkong.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Swadaya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi pembangunan perkebunan yang memprioritaskan pengembangan perkebunan rakyat. Apabila pada pola BIR-BUN mayoritas petani peserta adalah transmigran, pada pola PIR-Swadaya semua peserta adalah penduduk lokal, yang belum pernah berkebun kelapa sawit. Pembinaan pada petani peserta proyek dilakukan oleh petugas UPP (Unit Pelaksana Proyek) yang merupakan aparat pemerintah (Dinas Perkebunan Propinsi). Untuk memudahkan bimbingan dan pembinaan,

petugas UPP juga membentuk kelompok tani dan koperasi sebagai penghubung antara petani dan petugas UPP. Melalui upaya tersebut diharapkan petani dapat membangun kebunnya dan mengelola usaha mereka secara berkesinambungan dan menguntungkan sehingga menjadi petani mandiri. Dalam proses awal proyek PIR-Swadaya, petani secara kelompok diwajibkan memiliki lahan berupa satu hamparan minimal 10 Ha dilengkapi dengan sertifikat, tidak bermasalah / sengketa. Kemudian mendaftarkan ke petugas perkebunan di desa dan kemudian diseleksi pihak UPP. Seleksi calon peserta antara lain diutamakan lahan berupa satu hamparan, lokasinya tidak mengganggu kelancaran (seperti di pinggir jalan), tanah tidak sedang dalam sengketa dengan pembuktian sertifikat, umur petani juga menjadi pertimbangan seleksi.

Pembinaan dan pelayanan kepada petani dilakukan oleh petugas UPP mulai dari pengolahan tanah sampai pemungutan hasil. Jenis pembinaan antara lain *land clearing* / pembukaan lahan dengan cara berkelompok, pembuatan rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Fasilitas / hak yang diperoleh petani berupa paket kredit lengkap antara lain dalam bentuk bibit, obat-obatan untuk pengendalian hama dan rumput, serta pupuk. Sedangkan kewajiban petani setelah panen yaitu mengembalikan biaya bibit tergantung dari banyaknya bibit yang diambil. *"1 ha diperlukan 128 pohon x harga bibit Rp 2.500."*

Kegiatan panen dan pemasaran hasil produksi dilakukan oleh kelompok tani dan koperasi masyarakat setempat bekerjasama dengan pihak perusahaan baik swasta atau PTPN (melalui KUD). Karena keberadaan perusahaan swasta belum lama (baru 3 bulan yang lalu), maka petani PIR-Swadaya ini sebagian besar masih menjual ke pabrik CPO milik PTPN. Kendala utama penjualan hasil PIR-Swadaya ke PTPN adalah antrian terlalu panjang dan dihargai lebih rendah dibandingkan dengan produksi dari PIR-BUN. Alasannya karena usia kebun relatif muda sehingga rendemen rendah. Hal ini menunjukkan adanya pihak swasta yang bersedia menampung hasil TBS PIR-Swadaya berdampak positif terhadap petani karena harga TBS lebih kompetitif. Hal dapat berpengaruh terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Pasir. Sejalan dengan penambahan luas areal perkebunan, sebagai konsekuensi logis adalah adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan usaha perkebunan tersebut. Bahkan banyak petani lokal yang mengupahkannya pada pekerja di luar keluarga, karena tidak terbiasa mengelola kebun kelapa sawit.

Pengembangan kebun kelapa sawit dengan pola PIR-Swadaya juga dimaksudkan untuk mengurangi kecemburuan sosial dengan pendaatang

(transmigran), yang lebih dulu berhasil dengan kebun plasmanya. Dikuatirkan adanya kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat dapat menimbulkan gangguan-gangguan sosial yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian wilayah. Peristiwa yang pernah terjadi pada tahun 2000 – 2001, tentang status pemilikan lahan perkebunan inti milik PTPN XIII yang diklaim sebagai milik masyarakat lokal, menimbulkan ketegangan sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di wilayah tersebut.

## **4.2. Karakteristik Sosial Demografi**

Pekerjaan pada sektor pertanian atau disebut juga sektor tradisional pada umumnya merupakan pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian dan tingkat pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu pekerjaan pada sektor pertanian atau perkebunan lebih mudah melibatkan tenaga kerja tanpa persyaratan keahlian dan pendidikan tertentu. Dengan mengetahui latar belakang sosial demografi petani yang terlibat di perkebunan kelapa sawit, diharapkan dapat menambah pemahaman tentang ketenagakerjaan di perkebunan sawit, sehingga kebijakan ketenagakerjaan terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit, dapat lebih mengarah pada sasaran. Penduduk desa yang merupakan sampel penelitian, sebagian besar mempunyai pekerjaan utama sebagai petani plasma kelapa sawit. Untuk perbandingan juga akan dilihat karakteristik penduduk Desa Padang Jaya antara lain dilihat dari umur, jenis kelamin dan pendidikan .

### **4.2.1. Jumlah penduduk, jenis kelamin dan umur**

Berdasarkan data penduduk dari profil desa. pada tahun 2000 jumlah penduduk Desa Padang Jaya sebanyak 1.402 jiwa (346 KK), yang terdiri dari 725 orang laki-laki dan 677 orang perempuan, atau rasio jenis kelamin di atas 100 (sekitar 100,7). Jumlah penduduk laki-laki mengatasi penduduk perempuan terutama pada umur relatif muda atau usia sekolah (di bawah 25 tahun) (Tabel 4.4). Jumlah 346 KK ini sudah berkurang, karena semula berjumlah 350 KK, dan sebagian besar merupakan pendatang dari Jawa, termasuk petani plasma yang merupakan pengganti transmigran asli. Berdasarkan komposisi penduduk menurut umur, mayoritas penduduk Desa Padang Jaya (sekitar 60 %) berada pada usia produktif atau usia kerja (di atas 15 tahun), dan hanya sekitar 4 persen yang berusia di atas 60 tahun, atau sekitar 8 persen yang berusia di atas 50 tahun. Hal ini wajar karena biasanya umur menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan pada waktu seleksi transmigran.



Tabel 4. 4  
Jumlah Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin, Desa Padang Jaya

Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 5	10,5	10,5	10,5
6 - 16	27,9	27,0	27,5
17 - 25	16,8	16,2	16,5
26 - 40	25,4	30,1	27,7
41 - 50	10,8	8,4	9,6
51 - 60	4,8	6,0	5,4
60 +	3,9	1,6	2,8
Jumlah	100 (725)	100 (677)	100 (1.402)

Sumber : Profil Desa Padang Jaya (Rangan Barat I), Tahun 2000.

Besarnya proporsi penduduk pada usia produktif sangat menguntungkan, dilihat dari dampaknya pada beban tanggungan keluarga yang menjadi relatif rendah, dibandingkan komposisi penduduk muda. Penduduk pada umur produktif juga diharapkan mempunyai beberapa kelebihan, karena dapat meningkatkan produktivitas kerja, dibandingkan dengan mereka yang umurnya lebih tua. Produktivitas ini dapat kita lihat pada penghasilan rumah tangga mereka.

#### 4.2.2. Tingkat pendidikan

Berdasarkan data pada profil desa, tingkat pendidikan penduduk Desa Padang Jaya relatif rendah, karena mayoritas (sekitar 72 persen). berpendidikan SD kebawah, baik untuk laki-laki maupun perempuan (Tabel 4.5). Diantara penduduk yang berpendidikan rendah, sekitar 15 persen belum atau tidak sekolah. Relatif rendahnya tingkat pendidikan penduduk yang umumnya petani ini wajar, karena sebagai petani tidak diperlukan keahlian dan ketrampilan tertentu serta persyaratan pendidikan. Demikian pula seleksi untuk menjadi transmigran pada saat itu, tidak memerlukan persyaratan pendidikan tertentu. Dilihat dari perspektif jender, kecenderungan rata-rata laki-laki lebih tinggi tingkat pendidikannya dari perempuan, tampak untuk pendidikan ditingkat SLTP ke atas yaitu laki-laki sekitar 31 dan perempuan sekitar 26 persen (Tabel 4.5).

Tabel 4.5  
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan,  
Desa Padang Jaya

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tdk / Blm Sek	15,3	14,1	14,7
SD	52,9	59,5	56,9
SLTP	18,0	14,3	16,3
SLTA	13,2	11,5	11,6
PT	0,4	0,2	0,1
Jumlah	100 (725)	100 (677)	100 (1.402)

Sumber : Profil Desa Padang Jaya (Rangan Barat I), tahun 2000

Data tentang karakteristik responden berdasarkan hasil survei menunjukkan keadaan yang tidak jauh berbeda dengan data profil desa di atas, yaitu mayoritas responden berada pada kelompok usia produktif. Namun demikian proporsi responden yang berusia tidak lagi produktif (65 tahun ke atas) lebih kecil dari data profil desa, baik untuk laki-laki maupun perempuan (Tabel 4.6). Demikian juga untuk tingkat pendidikan responden pada umumnya relatif rendah, yaitu mayoritas berpendidikan SD kebawah (sekitar 70 persen). Hal ini menunjukkan bahwa petani di desa ini pada umumnya tamatan SD saja. Data survei juga menunjukkan proporsi laki-laki yang berpendidikan lebih tinggi (SLTP ke atas) jauh lebih tinggi dari perempuan yaitu masing-masing sekitar 36,5 dan 22 persen (Tabel 4.6)

Tabel 4.6  
Jumlah Anggota Rumah Tangga Responden Menurut Umur, Jenis Kelamin

Tk Pendidikan/ Jenis Kelamin	Umur			Total
	6-14 th	15-64 th	65 th keatas	
Laki-laki				
SD Kebawah	98,3	52,7	100,0	63,5
SLTP	1,7	29,9	0,0	23,2
SLTA	0,0	17,4	0,0	13,3
Total	100 (60)	100 (224)	100 (9)	100 (283)
Perempuan				
SD Kebawah	95,1	72,5	100,0	78,1
SLTP	4,9	14,4	0,0	12,0
SLTA	0,0	13,0	0,0	9,9
Total	100 (62)	100 (208)	100 (4)	100 (274)
L + P				
SD Kebawah	96,7	62,3	100,0	70,5
SLTP	3,3	22,5	0,0	17,8
SLTA	0,0	15,3	0,0	11,6
Total	100 (122)	100 (432)	100 (13)	100 (567)
	21,5	76,2	23	100

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, PPK – LIPI 2004.

Rendahnya pendidikan petani sebenarnya secara tidak langsung dapat mempengaruhi hasil produksi, karena akan memperlambat adopsi teknologi . Adopsi teknologi dalam hal ini sangat penting bagi petani kebun, karena dalam kegiatan perkebunan memerlukan pelatihan-pelatihan yang belum pernah diperoleh di daerah asal. Pelatihan-pelatihan ini bias saja tertulis atau praktek di kebun.

Responden yang berusia 50 tahun ke atas, dan berpendidikan SLTP ke atas hanya pada responden laki-laki. Kemungkinan mereka adalah pengganti petani plasma yang pulang / meninggalkan lokasi, yang umumnya bukan petani, tetapi ex pegawai negeri atau karyawan swasta yang memiliki modal untuk mengelola perkebunan kelapa sawit. Sedangkan di daerah asal latar belakang ketrampilan yang mereka miliki (bertani di lahan pangan baik sawah maupun palawija) berbeda dengan di perkebunan. Mengenai ketrampilan berkebun yang telah dimiliki para petani, pada umumnya mereka mengakui bisa berkebun kelapa sawit karena belajar sendiri (42 persen), ada juga sebagian petani ( 26 persen) yang mengaku belajar bersama kelompok tani dan dari perusahaan (15 persen).

Karakteristik responden berdasarkan daerah asal menunjukkan bahwa sebagian besar berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (85

persen). Selebihnya berasal dari masyarakat setempat (Kalimantan), yaitu termasuk dalam kategori transmigran lokal. Kondisi ini mendukung pernyataan sebelumnya tentang adanya transmigran lokal yang telah meninggalkan lokasi, sehingga jumlahnya berkurang dari jumlah pada awal pengelolaan kebun plasma di lokasi.

### **4.3. Kegiatan di Perkebunan Kelapa Sawit**

Konsep perkebunan dengan pola PIR-BUN merupakan pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan plasma sebagai pelaksana dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan. Perusahaan inti di Kabupaten Pasir ini adalah perusahaan perkebunan besar milik negara yaitu PTPN XIII. Perusahaan inti berkewajiban membina petani plasma dalam mengelola perkebunan kelapa sawit.

Beberapa tahap kegiatan yang biasa dilakukan dalam proses pengelolaan perkebunan kelapa sawit meliputi 5 tahapan kegiatan yaitu :

1. Persiapan dan Pengolahan Lahan
2. Penanaman
3. Pemeliharaan
4. Masa Panen
5. Pasca Panen

#### **4.3.1. Persiapan dan penanaman**

Pada tahap ini pemerintah berperan dalam pembentukan proyek dengan penentuan wilayah tertentu dan lengkap dengan pengorganisasian serta penyediaan dana. Secara administrasi dalam persiapan ini dibutuhkan beberapa ketentuan sebagai dasar hukum pelaksanaan proyek PIR (Ditjen Perkebunan, 1986). Ketentuan tersebut antara lain :

- Surat Keputusan dari Menteri Pertanian
- Penyediaan lahan berdasarkan SK Gubernur KDH Tk I
- Pengesahan anggaran proyek oleh Menteri Keuangan dan Bappenas
- Kontrak / perjanjian kerja antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan perusahaan inti.
- Perjanjian antara perusahaan inti dan petani plasma.

Pembiayaan untuk kegiatan proyek PIR-BUN terdiri dari :

- Biaya lapangan yang disediakan dengan dana kredit perbankan.

- Biaya non kredit yang disediakan dengan anggaran pemerintah.  
Meliputi : pembangunan sarana pemukiman, jalan, studi kelayakan.

Pada tahap persiapan saat itu lokasi ditetapkan terletak di daerah terpencil dan diarahkan untuk membuka areal yang belum dimanfaatkan. Penetapan areal ditentukan oleh Gubernur / KDH Kalimantan Timur yang menjabat pada saat itu, dan dibebaskan dari rencana penggunaan yang lain. Dengan demikian areal itu digunakan khusus untuk pelaksanaan perkebunan kelapa sawit. Hingga saat ini areal tersebut merupakan wilayah pemukiman petani perkebunan plasma yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana jalan, sarana sosial. Untuk kepentingan petani plasma diberikan tempat pemukiman, lahan pekarangan, lahan kebun kelapa sawit, dan lahan pangan. Sarana / fasilitas sosial disediakan bangunan balai desa, sekolah SD, tempat ibadah. Pada tahap ini, yang dilakukan oleh pihak inti berupa pembersihan lahan kemudian dilanjutkan penanaman. Pada tahap ini pihak inti hanya menerima lokasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dijadikan areal PIR, kemudian menyiapkan unit-unit pengolahan produk, meliputi pabrik pengolahan, gudang penyimpanan, dan alat transportasi.

Dalam pengembangan perkebunan plasma di Kabupaten Pasir, tahap penanaman kelapa sawit merupakan tugas dan kewajiban perusahaan inti. Penanaman kebun kelapa sawit di Kabupaten Pasir dimulai sejak tahun 1982/1983, dilaksanakan oleh perusahaan dengan menggunakan tenaga kerja lepas, sebelum petani peserta datang ke lokasi kebun. Jumlah pohon kelapa sawit yang ditanam di kebun plasma sebanyak 256 pohon untuk setiap 2 Ha lahan. Pada pola PIR-Swadaya, petani peserta dilibatkan pada semua tahap kegiatan, sejak persiapan sampai paska panen, dengan bimbingan petugas dari Dinas Perkebunan Pemda Kabupaten Pasir.

#### 4.3.2. Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan kebun kelapa sawit pada pola PIR-BUN mulai melibatkan petani peserta yang didatangkan setelah masa penanaman pohon selesai. Dalam persiapan menerima kebun plasma setelah konversi, petani diwajibkan untuk memelihara kebun kelapa sawit sesuai dengan bimbingan perusahaan melalui mandor-mandor yang bertugas. Adapun kegiatan dalam masa pemeliharaan kebun kelapa sawit antara lain meliputi :

- Pengendalian gulma
- Pemupukan
- Pengendalian hama penyakit
- Pemeliharaan jalan, gorong-gorong dan parit-parit drainase.

Dalam kegiatan pemeliharaan kebun kelapa sawit termasuk kegiatan pengadaan sarana produksi (pupuk, pestisida), beban biaya pemeliharaan sebelum tanaman menghasilkan dibiayai oleh perusahaan inti, yang dibayar kemudian waktu konversi. Sedangkan setelah tanaman sawit menghasilkan, sepenuhnya dibiayai sendiri oleh petani peserta dengan bantuan pengadaan oleh KUD. Dipihak perusahaan inti sebagai lembaga yang langsung menangani pengembangan perkebunan berperan sangat strategis dalam menentukan keberhasilan PIR-BUN. Sebagai perusahaan milik negara (BUMN), orientasi proyek selain komersial juga sosial. Sebagai BUMN berkewajiban untuk tetap meraih keuntungan, di samping tugas lainnya yaitu sebagai perusahaan inti yang berkewajiban membantu dan membina petani peserta PIR-BUN, agar mampu mandiri setelah konversi.

Pembinaan utama dari perusahaan inti dilakukan sebelum dilakukan konversi yaitu bimbingan langsung dengan menempatkan petani peserta sebagai pekerja kebun, yang melakukan kegiatan sesuai dengan standar perusahaan. Idealnya bimbingan tersebut tidak terbatas pada sebelum konversi, tetapi berkelanjutan bahkan sampai pada tahap *replanting* atau peremajaan. Sesudah konversi hubungan antara perusahaan inti dan plasma cenderung sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan. Namun dalam praktek setelah pelunasan kredit, hubungan dengan perusahaan inti terbatas pada kegiatan paska panen yaitu pemasaran hasil produksi TBS ke pabrik. Kegiatan lain seperti pemeliharaan diserahkan sepenuhnya pada kemauan petani dengan bantuan KUD. Hal ini dapat berpengaruh terhadap produktivitas hasil produksi, terutama apabila petani plasma tidak melakukan kegiatan sesuai standar perusahaan. Bahkann untuk penyediaan pupuk, perusahaan lepas tangan dan KUD tidak berdaya untuk mengusahakan pupuk dengan harga pabrik. Akibatnya banyak petani plasma melakukan kegiatan kebun yang terbatas, hanya mengutamakan kegiatan panen, dan mengabaikan kegiatan pemeliharaan.

Pada masa awal pelaksanaan kebun kelapa sawit yaitu tahun 1987, sebelum konversi, petani mengelola kebun secara kelompok, menurut hamparan kebun masing-masing kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 25 - 30 orang, mengerjakan satu hamparan dengan luas sekitar 50 – 60 ha. Sesudah konversi setiap petani mengelola 2 Ha dari hamparan kebun plasma masing-masing kelompok, yang ditentukan dengan sistem undian. Pembagian lahan yang dilakukan sesudah konversi ini berdampak kurang menguntungkan, karena petani kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan lahan hamparan (terutama kegiatan pemupukan) yang dianggap bukan miliknya. Kebiasaan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan standar, berlanjut sesudah konversi, sehingga berpengaruh terhadap hasil produksi. Dengan demikian kegiatan pemupukan sejak sebelum konversi dilakukan dengan cara tidak efektif.

Karena petani menganggap kebun yang dikerjakan belum tentu miliknya, sehingga pemupukan asal-asal saja tidak mengena pada sasaran pohon tetapi terbuang dan akhirnya terbawa air hujan masuk ke saluran air. Hal ini berarti pembiayaan yang telah diperhitungkan dalam konversi, tidak menghasilkan sesuai dengan standar produksi, karena banyak dibuang oleh petani. Pelaksanaan kegiatan yang tidak profesional tersebut merugikan semua pihak baik perusahaan maupun petani plasma, terutama berkaitan dengan produktivitas hasil produksi. Kemungkinan petani tidak akan melakukan hal demikian apabila sejak awal mereka mengetahui hak dan kewajibannya serta dampak dari penyimpangan yang dilakukan selama pembinaan.

Tidak efektifnya masa pembinaan untuk petani plasma juga disebabkan oleh ulah petugas perusahaan / mandor dan lemahnya sistem pengawasan. Dalam hal ini petugas hanya mengutamakan pencapaian target, tanpa peduli pada ketepatan sasaran target. Misalnya kegiatan pemupukan dilakukan dengan sistem instruksi, bukan bimbingan agar petani dapat melakukan kegiatan pemupukan dengan benar. Bagi petani yang masih baru dalam hal berkebun kelapa sawit, instruksi pemupukan dari mandor tanpa pengawasan, akan dilaksanakan sesuai target, tanpa peduli hasilnya. Kegiatan pemupukan kelapa sawit sebelum berproduksi, harusnya mengikuti aturan pupuk ditabur dalam piringan sekitar pokok pohon dari jarak 20 cm sampai ujung tajuk (sudah tentu piringan harus dipersiapkan sebelumnya). Sedangkan petani melaksanakannya dengan menaburkan pupuk sampai habis tanpa peduli sasarannya, sehingga banyak terbuang karena ditumpuk di tempat yang mudah dijangkau,

Pemberian pupuk yang tidak tepat pada sasaran pokok pohon ini menurut standar pengelolaan perkebunan yang secara profesional akan menghambat pertumbuhan kelapa sawit sehingga tanaman menjadi kerdil. Sedangkan pemberian pupuk satu tahun hanya dua kali, dengan demikian kesempatan dan waktu yang ada pun terbuang sia-sia. Kondisi demikian ini yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil produksi kelapa sawit.

Selain pemupukan, faktor lain yang dapat mempengaruhi produktivitas kelapa sawit adalah kegiatan pemeliharaan lainnya, misal pengendalian gulma, pengendalian hama / penyakit dan pemeliharaan sarana jalan dan drainase. Nampaknya petani plasma Desa Padang Jaya dalam hal pemeliharaan lain tentang kebun kelapa sawit masih kurang. Dari pengamatan yang telah dilakukan di kebun, nampak disekeliling dan di pohon kelapa sawit masih banyak ditumbuhi tanaman liar yang merambat. Banyaknya tumbuhan liar di ranting pohon kelapa sawit ini merupakan bagian yang tidak dilakukan dari pemangkasan daun. Pemangkasan daun dilakukan agar tanaman bersih dan memudahkan panen. Kegiatan pemeliharaan ini

seharusnya dilakukan oleh petani agar supaya produksi dapat tercapai sesuai standar. Namun para petani tidak melakukannya, hal ini kemungkinan disebabkan karena sejak awal tidak terbiasa memelihara kebun sesuai standar. Hal inilah yang menyebabkan produksi kelapa sawit yang mereka hasilkan tidak maksimal.

Kegiatan *ngoret* atau menyiangi yaitu membersihkan rumput di sekitar pohon, meskipun seharusnya dilaksanakan secara rutin, kurang diperhatikan oleh kebanyakan petani plasma sehingga kegiatan pengendalian gulma sering diabaikan. Mengenai kegiatan pengendalian penyakit antara lain dengan cara menyemprotkan obat-obatan, biasanya dilakukan oleh petani yang memiliki modal, karena biaya yang dikeluarkan relatif besar baik untuk obat-obatan maupun peralatannya. Pemeliharaan dengan pemberian air pada kebun plasma dimusim kemarau, biasanya sulit dilakukan petani plasma. Hal ini karena kondisi saluran air yang letaknya sulit terjangkau dari kebun, meskipun relatif mudah terjangkau dari pemukiman petani.

Bagi petani plasma yang memiliki modal, kegiatan pemeliharaan kebun biasanya dipercayakan kepada pihak lain dengan sistem borongan, meskipun hasilnya tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, atau kualitas hasil pekerjaan borongan masih rendah. Biasanya pemborong hanya melakukan pemeliharaan terbatas pada lokasi di sekitar jalan, sehingga nampak bersih hanya di permukaan, tidak pada semua kebun plasma sesuai dengan perjanjian kerja borongan.

#### **4.3.3. Pemetikan tandan buah segar (panen)**

Menurut standar pengelolaan perkebunan yang profesional, kelapa sawit berbuah setelah berumur 2,5 tahun dan buahnya masak setelah 5,5 bulan terjadi penyerbukan. Suatu areal sudah dapat dipanen jika tanaman telah berusia 31 bulan. Tanaman kelapa sawit di PIR-BUN Desa Padang Jaya yang ditanam sebelum transmigran datang pada tahun 1987, mulai dipetik hasilnya sekitar tahun 1990. Karena hasil TBS yang dipanen harus segera diolah menjadi CPO, maka masalah pengangkutan dan kelancaran penampungan TBS menjadi hal yang penting bagi petani plasma. Sebagai perusahaan inti berkewajiban menyediakan unit pengolahan hasil guna menampung hasil produksi petani plasma. Tersedianya unit pengolahan dan penampungan / pemasaran hasil produksi tersebut, dengan demikian memberikan peluang kepada petani untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang optimal. Namun banyak kendala yang menyebabkan hasil produksi tidak sesuai dengan yang diharapkan baik secara kuantitas dan kualitas. Salah satu kendala adalah sistem pemeliharaan yang tidak sesuai dengan standar perusahaan, sehingga produksi kelapa sawit yang dihasilkan memiliki



kualitas yang relatif rendah, sehingga mempengaruhi harga TBS yang ditetapkan. Menurut informasi harga TBS yang ditetapkan untuk kawasan perkebunan di Kaltim, lebih rendah dibandingkan dengan hasil dari daerah lain seperti Sumatera, karena pengaruh kualitas hasil produksi.

Kegiatan panen dilakukan petani plasma setiap dua minggu sekali. Namun pada saat dilakukan penelitian, menurut informasi karena produksi mulai menurun, sebagian kebun hanya panen sekali sebulan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan petani pada saat panen relatif berat, karena meliputi kegiatan antara lain : *mendongkel* yaitu memetik dengan cara mencongkel tandan buah segar yang rata-rata beratnya sekitar 10 kg. Sedangkan peralatan yang digunakan untuk mendongkel dengan *egrek*. Waktu panen dilakukan per kelompok hamparan (satu kelompok tani), dan bergiliran dengan kelompok tani lainnya. Kegiatan panen dilakukan secara bergantian antar kelompok tani, juga dimaksudkan untuk disesuaikan dengan kemampuan pabrik CPO untuk mengolahnya, sehingga kualitas TBS tetap terjaga. Pada waktu pelaksanaan survei, sebagian besar responden (87 persen) menyatakan sedang melakukan kegiatan panen, selebihnya sedang melakukan kegiatan pemeliharaan antara lain menyiangi.

Dalam mengerjakan / mengelola kebun, tenaga kerja yang digunakan dari masing-masing keluarga petani berlainan. Tenaga kerja yang terlibat dalam mengelola/ mengerjakan lahan kebun kelapa sawit sangat bervariasi, ada yang dikerjakan sendiri dengan anggota keluarganya dan ada yang dikerjakan orang lain dengan buruh. Yang paling besar prosentase petani dalam mengelola kebun dibantu oleh orang lain yang bukan anggota keluarganya yaitu dengan membayar tenaga kerja buruh (35 persen), kemudian ada yang dikerjakan sendiri (18 persen) dan atau dibantu anggota keluarganya yaitu anak atau keponakan ( 20 dan 11 persen) (Tabel 4.7).

Tabel 4.7  
Keterlibatan Tenaga Kerja Dalam Pengelolaan Kebun Plasma

Status TK Dlm RT	Jumlah Tenaga Kerja					Total
	1	2	3	4	5-10	
Sendiri	50,0	0,0	0,0	0,0	0	18,0
Dibantu ART	14,8	11,1	0,0	0,0	0	10,7
Sendiri dan ART	0,0	36,1	30,8	14,3	0	20,7
Dibantu non ART	35,2	30,6	38,5	71,4	25,0	34,7
Sendiri dan non ART	0,0	16,7	23,1	14,3	25,0	11,3
ART dan non ART	0,0	5,6	7,7	0,0	0,0	3,3
Sendiri+ART + non ART	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1,3
Total	100 (54)	100 (72)	100 (13)	100 (7)	100 (4)	100 (150)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, PPK – LIPI 2004.

Hasil survei menunjukkan bahwa hampir separuh responden (48 persen) menyatakan bahwa untuk pengelolaan kebun plasma dikerjakan oleh dua orang tenaga kerja, baik itu dikerjakan oleh orang lain / buruh dan dikerjakan sendiri dibantu orang lain. Sedangkan petani plasma yang mengerjakan sendiri lahan plasmanya sekitar 18 persen. Meskipun ada pula yang dikerjakan oleh lebih dari 3 orang tenagakerja, biasanya lahan mereka luas sehingga harus dikerjakan oleh beberapa orang. Hal ini juga dikemukakan oleh salah seorang pemuda lulusan SLTA yang bekerja sebagai buruh kebun sambil mencari pekerjaan yang tetap sebagai karyawan perusahaan. Penuturannya sebagai berikut :

*“Wah kalau kerja di kebun sendiri tidak sanggup, karena kalau kerja sendiri rasanya sepi nggak ada yang diajak ngobrol, jadi cepet capek” .*

Para pemuda pada umumnya mengaku untuk mengisi waktu mereka bekerja sebagai buruh perkebunan, terutama pada saat panen uang yang diterima lumayan, pada saat panen raya biasanya mereka 1 bulan kadang bisa memperoleh uang 1,5 juta rupiah. Sedangkan pada saat-saat belum panen relatif kecil, dalam sebulan informan mengaku cuma memperoleh uang sekitar 500 ribu rupiah. Sebenarnya anak muda di perkebunan kelapa sawit Desa Padang Jaya ini pada umumnya punya cita-cita bekerja di perusahaan disekitar yaitu perusahaan batu bara. Meskipun peluang ada tetapi karena mereka murni melamar sendiri dengan ijazah SLTA dan pelamar / saingan relatif besar, kemungkinan memang selektif. Dalam penuturannya salah satu informan mengatakan :

*“ Cita-cita anak muda disini kerja di perusahaan batu bara, karena lebih tetap, tinggalnya di mess, berangkat kerja antar jemput. Tetapi kalau mau kerja di sana harus punya kenalan orang dalam dan punya uang. La kalau terus-terusan kerja di pertanian ya remuk badannya”*

Petani di Desa Padang Jaya dalam satu tahun biasanya panen dari bulan Januari sampai Desember, tetapi pemetikan sawit tandan buah segar selama seminggu satu kali. Pada tahap ini perusahaan inti berkewajiban menampung seluruh hasil produksi petani plasma. Oleh karena itu sejak tanaman menghasilkan, perusahaan inti menyediakan atau membangun pabrik pengolahan. Sedangkan untuk kelancaran pengangkutan dan pemasaran hasil perusahaan pengolahan bekerjasama dengan KUD Desa Padang Jaya Perusahaan inti membeli hasil produksi kelapa sawit dengan harga yang ditetapkan oleh tim konsorsium (POKJA), yang terdiri dari pihak pemerintah (dinas terkait) dan perusahaan. Namun dalam praktek peran PTPN paling dominan dalam penetapan harga TBS (lihat Bab III).

#### **4.4. Kesejahteraan dan Strategi Kelangsungan Hidup Petani**

##### **4.4.1. Pendapatan Petani**

Kesejahteraan keluarga petani dapat tercermin dari pendapatan dan penggunaannya atau pengeluaran. Pendapatan keluarga (rumah tangga) petani terdiri dari berbagai sumber baik dari kebun plasma maupun usaha pertanian atau non pertanian diluar kebun plasma, yang diperinci sebagai berikut. Sumber dari pendapatan / penghasilan bagi petani PIR-Trans di Desa Padang Jaya yang berasal dari sektor pertanian ini bisa saja terdiri dari hasil perkebunan plasma, hasil tanaman pangan dari lahan pangan dan hasil dari lahan pekarangan. Sedangkan sumber dari non pertanian bisa terdiri dari berbagai usaha lainnya diluar pertanian.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 150 responden petani plasma, pada umumnya pendapatan petani dari hasil kebun plasma seluas 2 ha, pada panen terakhir paling rendah Rp120.000,- sedangkan paling tinggi Rp 4.000.000,- . Lebih separo petani (85 persen) berpendapatan maksimal sejuta rupiah, diantara mereka ini 53 persen hanya berpendapatan Rp 500.000,- kebawah dan 32 persen yang berpendapatan diatas Rp 500.000,- dan lainnya diatas sejuta rupiah (Tabel 4.8). Pendapatan petani plasma kelapa sawit di Desa Padang Jaya ini masih lebih rendah bila dibanding dengan pendapatan rata-rata petani kelapa sawit / ha di Kabupaten Pasir pada tahun 2002 (Rp 6.923.804,64 / ha). Meskipun pendapatan tertinggi petani plasma

sebesar Rp 4.000.000,- dengan luas 2 ha, masih lebih rendah dari rata-rata petani kelapa sawit di Kabupaten Pasir setiap luas 1 ha. Namun demikian kalau dibandingkan dengan pendapatan rata-rata petani perkebunan pada komoditas lain seperti kelapa dalam, karet, kopi, atau kakao, maka pendapatan petani plasma kelapa sawit masih lebih tinggi (Statistik Perkebunan Kab. Pasir, 2002). Dengan demikian bahwa pendapatan petani pada umumnya di Kabupaten Pasir ada dibawah UMP di Propinsi Kaltim (Rp 572,652,-).

Kalau ditinjau dari tahun kedatangan petani atau pertama kali menjadi petani plasma nampak bahwa lebih separo dari mereka yang datang sejak awal yaitu 1987 berpendapatan dibawah satu juta. Namun demikian ada pula diantara mereka yang sejak pertama datang memiliki pendapatan lebih besar dari sejuta rupiah (Tabel 4.8). Perbedaan pendapatan petani dari hasil kebun plasma ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya minat menjadi petani. Kalau mereka mempunyai minat tentunya mereka benar-benar mengerjakan / mengelola kebun (memelihara) kelapa sawit dengan sungguh-sungguh dan profesional. Hal ini akan mempengaruhi keadaan tanaman dan akhirnya hasil produksi kelapa sawit maksimal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Tabel 4.8  
Pendapatan Petani Menurut Tahun Kedatangan (Persen)

Jumlah Pendapatan	1987/sblm	1988 - 1990	> 1990	Jumlah
120.000 - 1.000.000	69,4	68,7	43,7	63,3
1.001.000 - 2.000.000	24,7	15,6	34,4	24,6
2.001.000 - 3.000.000	2,4	6,3	15,6	0,06
3.001.000 - 4.000.000	2,4	-	-	0,01
4.001.000 +	1,2	9,3	9,3	0,05
Jumlah	100 (85)	100 (32)	100 (32)	100 (150)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, PPK – LIPI 2004.

Relatif rendahnya pendapatan petani plasma tersebut disebabkan oleh rendahnya hasil produksi kelapa sawit pada saat dilakukan penelitian, meskipun harga jual tandan buah segar pada posisi relatif tinggi dibandingkan harga pada bulan-bulan sebelumnya. Pertambahan nilai dengan menjual hasil kelapa sawit dalam bentuk lain (pelepah atau daun) tidak dapat dilakukan oleh petani. Penyebabnya antara lain karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, minimnya informasi pasar. Disamping itu faktor alam dan kondisi tanah di Kalimantan Timur (dibandingkan dengan daerah lain) juga mempengaruhi rendahnya hasil produksi. Meskipun harga pada saat dilakukan penelitian mencapai harga tertinggi dibanding

sebelumnya, tetapi hasil produksi minim, kondisi ini tidak dapat mengangkat pendapatan petani. Hal inilah yang mendorong petani plasma untuk berusaha diluar sektor pertanian dengan harapan dapat menambah pendapatan untuk rumah tangga. Situasi demikian juga dikemukakan oleh Sawit (dikutip oleh Yulianti, 2003), bahwa penyebab dari keluarnya petani untuk bekerja di luar sektor pertanian adalah tidak cukupnya pekerjaan dan pendapatan usaha tani. Menurut mereka sifat pekerjaan musiman yang banyak mengandung resiko, sehingga pendapatannya juga tidak pasti. Hal ini juga terjadi pada petani plasma perkebunan kelapa sawit, bahwa pada saat panen penghasilan yang diterima hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Karena minimnya pekerjaan pertanian (perkebunan) yang bisa diharapkan di desa, maka wajar apabila petani meninggalkan desanya untuk bekerja dan beralih profesi untuk memperoleh tambahan penghasilan. Sebagian bekerja sebagai buruh bangunan di kota kecamatan atau di kota kabupaten. Ada juga yang beralih profesi di sektor jasa di desa sendiri dengan menarik ojek. Biasanya mereka yang bekerja meninggalkan desa ini masih berusia produktif (dibawah 50 tahun), atau pecahan KK (anak petani).

Kalau ditinjau dari pekerjaan para petani plasma diluar perkebunan plasma, nampak bahwa pada umumnya mereka bekerja masih terbatas pada pertanian juga, yaitu pada lahan pangan (31 persen), terutama bagi petani yang menjadi petani plasma sejak tahun 1987 ( 40 persen). Sedangkan mereka yang datang sesudah tahun 1988 sampai tahun 1990 an, persentase terbesar adalah bekerja sebagai pegawai / karyawan atau tenaga jasa ( 31 persen) (Tabel 4.9), begitu juga mereka yang datangnya sesudah tahun 1990. Dari pengamatan di lokasi pendatang yang datang kemudian, umumnya adalah pegawai baik pegawai negeri ataupun swasta.

Tabel 4.9  
Status Pekerjaan Petani Di Luar Perkebunan Plasma Menurut  
Tahun Kedatangan di Lokasi

Status Pekerjaan	1987/ sblm	1988 – 1990	> 1990	Jumlah
Tidak Bekerja	20,0	25,0	21,4	21,4
Tata Laksana & Jasa	17,6	31,3	28,6	22,7
Tenaga Perkebunan	11,7	6,3	14,3	11,0
Tenaga Pertanian	40,0	15,6	21,4	31,0
Peternakan & Lainnya	10,6	21,8	14,3	13,8
Jumlah	100 (85)	100 (32)	100 (28)	100 (145)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, PPK – LIPI 2004.

Pekerjaan diluar sektor pertanian di daerah sekitar penelitian sebenarnya relatif ada bagi angkatan kerja lulusan SLTA, misalnya saja di perusahaan-perusahaan swasta seperti pertambangan batubara. Kondisi ini sebenarnya memberi kesempatan pada mereka khususnya anggota rumah tangga petani (anak-anak petani lulusan SLTA) untuk terserap dalam kesempatan kerja setempat dan secara tidak langsung akan meningkatkan penghasilan petani. Meski demikian secara umum mereka tidak diterima sebagai tenaga kerja tersebut. Kemungkinan karena besarnya pelamar sedangkan tenaga kerja yang dibutuhkan terbatas, sehingga penerimaannya sangat selektif. Namun keadaan ini dipandang lain oleh para pelamar yang tidak diterima, mereka menganggap tidak diterimanya di perusahaan karena tidak punya koneksi. Hal ini dikemukakan oleh informan salah satu pelamar yang tidak diterima sebagai berikut : *“Kalau mau bekerja di perusahaan batubara harus punya kenalan orang dalam”*

Data tentang jumlah pendapatan rumah tangga petani yaitu pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber (termasuk anggota rumah tangga lain), menunjukkan bahwa sebagian besar (63 persen) responden memperoleh penghasilan maksimal satu juta rupiah pada satu bulan yang lalu (sebelum dilakukan penelitian). Sedangkan responden yang berpenghasilan dua juta rupiah relatif kecil (12 persen).

Ditinjau dari jumlah tanggungan keluarga rata-rata petani plasma PIR-BUN Desa Padang Jaya adalah sekitar 4 orang terdiri dari laki-laki (sekitar 2 orang) dan perempuan sekitar 2 orang. Jumlah tanggungan keluarga antara 1 sampai 9 orang. Berdasarkan hasil survei, sekitar 31 persen petani memiliki tanggungan keluarga di atas rata-rata dan persentase terbesar (37 persen) memiliki jumlah tanggungan 4 orang. Sedangkan petani yang pada umumnya berpenghasilan maksimal satu juta, memiliki beban tanggungan 2 orang atau lebih ( Tabel 4.10). Dengan pendapatan dan beban tanggungan yang ada dan didukung oleh kebutuhan keluarga, alokasi pengeluaran rumah tangga kemungkinan didominasi oleh pengeluaran untuk pangan.

Tabel 4.10  
Jumlah Anggota Rumah Tangga Menurut Pendapatan

Pendapatan	Jumlah ART				
	2 orang	3 orang	4 orang	5 orang	> 5 orang
Kurang 1 juta	89,5	61,5	57,1	72,0	52,3
1 – 2 juta	10,5	23,1	33,9	16,0	23,8
Diatas 2 juta	-	15,2	9,0	12,0	23,8
Jumlah	100 (19)	100 (26)	100 (56)	100 (49)	100 (21)

Sumber : Diolah dari Data Survei Penyerapan Tenaga Kerja Kelapa Sawit, Pasir, Kaltim PPK – LIPI 2004

#### 4.4.2. Pemilikan Lahan

Pemilikan lahan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penghasilan. Setelah konversi, petani plasma berhak memiliki lahan plasma seluas 2 Ha dan mengelola perkebunan kelapa sawit miliknya sesuai dengan strategi masing-masing. Sebagian responden terutama sebagai petani pengganti, memiliki lahan kebun sawit lebih dari jatah awal, baik berupa kebun plasma maupun non plasma diluar lokasi transmigrasi. Pemilikan kebun sawit oleh responden paling rendah 1 Ha dan paling tinggi 22 Ha.

Berdasarkan pemilikan lahan oleh responden di Desa Padang Jaya, pada umumnya (79 persen) responden hanya memiliki lahan perkebunan plasma yang telah konversi seluas 2 Ha. Hanya sekitar 22 persen yang telah berhasil memperluas lahan plasma, . umumnya pengelolaan lahanya diupahkan (dikerjakan oleh buruh). Hal ini menunjukkan bahwa mereka ini adalah petani pemilik modal. Status kegiatan para pemilik modal ini biasanya adalah seorang pegawai baik itu pegawai negeri sipil ataupun swasta. Kemudian tempat tinggal mereka ada yang tinggal dilokasi plasma dan ada pula yang tinggal di luar desa (di kota). Diantara mereka yang tinggal di lokasi biasanya mereka ini adalah guru, penyuluh lapangan atau tokoh agama.. Para pemilik modal ini pada umumnya merupakan pengganti pemilik lahan karena berbagai alasan. Seorang informan yang juga memiliki lahan plasma dengan membeli, kini punya usaha lain yaitu pembibitan kelapa sawit.: Sebagai pemilik modal dia menggantikan lahan milik petani plasma satu paket seharga Rp 400.000,- Pemodal ini menyatakan bahwa harga itu dapat dikatakan murah, dan sebagai perbandingan dia menyatakan "*harga beras pada waktu itu Rp 300,- per kilo gram*". Saat ini dia mengembangkan usaha penangkaran bibit, dengan melibatkan tenaga kerja tetap setiap harinya enam orang. Sedangkan pada saat sibuk seperti mengisi polibek, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sekitar tiga puluh orang.

Mengenai harga lahan plasma pada saat itu hingga saat ini sebenarnya tidak ada standar yang pasti berapa harga, menurut informasi harga lahan plasma kebun kelapa sawit in tergantung dari kebutuhan orang yang akan menjual. Namun ada juga yang memberikan harga tergantung dari letak kebun tersebut, apabila terletak di dekat aliran sungai berarti kebun tersebut relatif subur sehingga hasil produksi pun relatif lebih baik, maka harga ditawarkan tinggi pula. Sebaliknya bila letak kebun di perbukitan yang berarti lokasi pada tanah yang tandus, dengan demikian kebun sulit mendapatkan air sehingga hasil produksi sawit baik kuantitas maupun kualitas rendah, maka biasanya penawaranpun dengan harga rendah.

#### 4.4.3. Pemilikan barang-barang berharga

Berdasarkan pengamatan di lokasi PIR-BUN di Desa Padang Jaya, belum banyak rumah tangga petani yang memiliki berbagai barang-barang berharga. Hasil penelitian menunjukkan sekitar sepertiga (29 persen) responden yang telah memiliki barang-barang berharga seperti elektronik (televisi, radio, VCD), sepeda motor, ternak dan perhiasan. Kalau melihat proporsi mereka yang memiliki barang berharga ini nampaknya sama dengan proporsi mereka yang memiliki luas lahan lebih dari dua hektar. Kemungkinan mereka adalah para pemodal yang tinggal di desa ini. Dengan demikian wajar kalau mereka memiliki barang-barang berharga, karena selain memiliki kebun plasma lebih mereka juga bekerja atau berusaha diluar perkebunan plasma. Kalaupun ada petani plasma yang memiliki barang-barang berharga tersebut kemungkinan mereka memilikinya dengan cara kredit, baik dari bank, dealer sepeda motor ataupun dari koperasi. Kondisi petani dengan cara kredit seperti ini juga nampak dari strategi petani dalam menghadapi kesulitan ekonomi.

Pengamatan pada kondisi rumah tinggal para petani, pada umumnya masih beratapkan seng (80 persen). Sedangkan dinding rumah sebagian besar masih papan (87 persen) dan lantainya masih papan pula (58 persen). Melihat kondisi rumah tinggal yang demikian ini menunjukkan bahwa rumah mereka masih asli dari sejak mereka datang sekitar 17 tahun yang lalu. Kalau diamati dengan besarnya persentase kondisi rumah yang masih asli ini memang masih ditempati oleh pemilik yang asli. Persentase ini juga hampir sama dengan pemilikan dua hektar lahan plasma. Dengan demikian nampak bahwa petani plasma yang asli pada umumnya masih memiliki lahan kebun dan ditandai dengan kondisi rumah tinggal yang masih asli pula.

Kondisi rumah yang sudah diperbaiki biasanya mereka ini bukan petani transmigran asli, melainkan yang meneruskan atau membeli. Berbeda dengan rumah asli, rumah yang sudah diperbaiki kondisi atap dengan genteng, dinding dengan tembok batu bata, sedang lantainya menggunakan keramik serta perabotan rumah tangga lengkap.

#### 4.4.4. Strategi kehidupan petani

Keadaan perekonomian rumah tangga petani plasma nampaknya belum dirasakan adanya perubahan sejak mereka tinggal di lokasi PIR-Trans ini. Hal ini nampak dari keadaan ekonomi sekarang dibanding dengan keadaan sebelum krisis ekonomi pada tahun 1997. Hampir separo (44 persen) dari petani merasakan keadaan perekonomiannya sama saja antara sekarang dan keadaan sebelum krisis tersebut. Kemudian dalam waktu satu tahun ini



hampir semua rumah tangga petani ( 86 persen) pernah mengalami kesulitan keuangan.

Dalam menghadapi kesulitan hidup, strategi / upaya yang dilakukan pada umumnya adalah pinjam ke koperasi (maksudnya KUD), baik pinjam dalam bentuk uang kas atau membeli kebutuhan pokok lainnya dengan meminjam. Hampir semua responden mengaku pernah mengalami kesulitan, dan sebagian besar (67 persen) diantaranya mengaku jalan satu-satunya untuk menghadapi kesulitan keuangan adalah dengan cara meminjam uang ke KUD atau langsung dengan memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Nampaknya KUD di desa ini merupakan salah satu lembaga ekonomi yang dapat menjadi tumpuan harapan perekonomian petani plasma kelapa sawit. KUD dengan Waserdanya menyediakan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, gula, sabun, atau makanan kering / diawetkan. Mengenai harga yang ditetapkan KUD, , petani tidak pernah memperhitungkan, karena membeli dengan kredit, dianggap sebagai penolong dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi petani. Pembayaran hutang-hutang tersebut, dilakukan pemotongan langsung pada waktu menerima bayaran dari pabrik CPO.

Selain kebutuhan pokok dan perumahan, i kebutuhan petani lainnya adalah untuk pendidikan anaknya.. Untuk pendidikan SD sudah tersedia di desa, SLTP di kota kecamatan, dan tingkat SLTA tersedia di kota kabupaten (Tanah Grogot) atau Balikpapan. Untuk mencapai kecamatan masyarakat petani biasa menempuh dengan ojek atau dengan angkutan anak sekolah. Sedangkan SD pada umumnya ditempuh dengan jalan kaki atau sepeda motor, karena lokasinya berada di desa.

Dengan adanya fasilitas pendidikan hingga tingkat SLTA ini nampak bahwa anak-anak petani dapat berhasil mencapai pendidikan hingga SLTA. Dari semua responden dengan anggota rumah tangga yang berjumlah 611 orang, 11 persen diantaranya berhasil lulus hingga SLTA. Lulusan SLTA ini nampaknya dari SMU, meskipun di Kabupaten Pasir sudah tersedia sekolah kejuruan ( Kejuruan Pertanian, Kejuruan Ekonomi), namun kurang diminati. Di daerah perkebunan kelapa sawit dengan potensi sumber daya manusia yang pada umumnya masih rendah, tetapi tidak mendapat dukungan dan minat dari masyarakat untuk meningkatkan keahliannya ataupun ketrampilan di bidang perkebunan meskipun sekolah kejuruan sudah tersedia.

Sebenarnya kalau petani mau bekerja keras, kebiasaan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara hutang dapat dihindari. Sebagai contoh beberapa kasus petani yang berhasil sebagai petani plasma, didahului dengan bekerja keras mengerjakan apa saja sebelum kebun sawit menghasilkan, misalnya

berdagang hasil tanaman pekarangan ke pasar, berdagang apa saja, atau menjadi buruh bangunan, tukang ojek. Hasilnya dapat untuk menambah penghasilan sehari-hari. Sedangkan sebagian hasil kelapa sawit ditabung untuk memperluas lahan. Kondisi seperti ini dialami oleh salah seorang informan dengan pengalaman bekerja mulai dari menjual sendiri hasil lahan pangan ke pasar di Kecamatan Kuaro. Kini dia menikmati kerja kerasnya dengan memiliki kebun sawit yang luas dan mampu menyekolahkan anak-anaknya ke Jawa.

#### 4.5. Kesimpulan

Pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit pola PIR sejak tahun 1982 / 1983 dipercayakan kepada PT Perkebunan Nusantara XIII, di dalam perusahaan milik negara ini dapat menyerap tenaga kerja yang berpendidikan. Selain itu terdapat pula tenaga kerja buruh lepas yang digaji sesuai jumlah hari atau system borongan. Sedangkan di Desa Padang Jaya, Kecamatan Kuaro, terjadi pergantian petani (pemilikan lahan), sampai saat ini telah mencapai separonya. Kondisi ini disebabkan nasib mereka yang dirasakan tidak ada perubahan selama tinggal di lokasi, sedangkan tujuan mereka datang ke lokasi adalah ingin merubah nasib. Tidak adanya perubahan dirasakan terutama ketika tidak diterima jatah hidup sedangkan penghasilan yang diperoleh relatif minim, akhirnya diantara mereka meninggalkan lokasi kembali ke daerah asal atau kerja di luar lokasi. Setelah konversi terjadinya pergantian pemilikan disebabkan masuknya pemilik modal, yang berani membeli kebun kelapa sawit meskipun pekerjaannya diupahkan oleh buruh.

Petani pada umumnya masih berumur produktif, namun tidak diimbangi dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tingkat pendidikan petani pada umumnya relatif rendah sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi hasil produksi kelapa sawit, alasannya bahwa dengan pendidikan rendah tersebut akan memperlambat adopsi teknologi. Adopsi teknologi yang dimaksud penting bagi petani karena dapat dalam kegiatan perkebunan memerlukan pelatihan-pelatihan yang belum pernah diperoleh di daerah asal. Sedangkan latar belakang ketrampilan yang dimiliki di daerah asal berbeda, petani terbiasa mengolah lahan pangan.

Kegiatan petani tentang pengolahan kebun sawit terutama dalam hal pemeliharaan, sejak awal tidak sesuai dengan standar pengelolaan yang benar dan profesional. Pemeliharaan yang tidak efektif ini terutama dalam hal pemupukan yang mengakibatkan rendahnya hasil produksi kebun kelapa sawit. Rendahnya hasil produksi ini juga dipengaruhi oleh faktor alam dan kondisi kesuburan tanah di Kalimantan Timur. Keadaan cuaca yang relatif

lebih rendah dibanding propinsi lain untuk penanaman kelapa sawit, hal ini mempengaruhi pertumbuhan pohon kelapa sawit. Rendahnya hasil produksi tandan buah segar ini yang akhirnya juga mengakibatkan rendahnya penghasilan mereka. Rendahnya penghasilan petani juga dipengaruhi oleh harga yang kurang menguntungkan bagi petani. Rendahnya penghasilan petani akhirnya mengakibatkan rendahnya kesejahteraan mereka. Dilain pihak kebutuhan keluarga petani semakin besar sebagai akibat anak-anak mereka semakin besar sehingga semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Kebutuhan ini baik untuk pendidikan maupun kebutuhan pokok sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Strategi mereka pada umumnya lari ke koperasi (KUD). Dalam menghadapi kesulitan keuangan ini ada yang meminjam berupa uang atau mengambil langsung bahan-bahan kebutuhan pokok.



**PROSPEK PENYERAPAN TENAGA KERJA TERKAIT PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat dinamis dalam tiga dekade terakhir. Hal ini ditengarai dengan meningkatnya luas perkebunan kelapa sawit yaitu dari 106.000 ha pada akhir tahun 1960 an menjadi 2,7 juta ha pada tahun 1997. Pertumbuhan pesat ini telah menjadikan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar kedua sesudah Malaysia, dan menyumbang sekitar 30% dari persediaan minyak global pada tahun 1997 (Casson, 2000). Dari segi ekonomi perkembangan ini sangat penting, karena menjadi salah satu sumber devisa yang menguntungkan berbagai pihak, serta menyediakan lapangan kerja yang cukup besar karena sifat perkebunan yang cenderung padat karya. CPO juga dianggap komoditi strategis karena merupakan bahan baku minyak yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia (Sarjono, 1996). Hal ini dapat menjadi komoditi andalan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat, sekaligus menyediakan lapangan kerja di kawasan tersebut dan sekitarnya.

Sebelum krisis tahun 1997, Indonesia diprediksikan mampu menggantikan posisi Malaysia sebagai Negara produsen utama minyak kelapa sawit dunia. Untuk mencapai maksud tersebut, Indonesia bertekad untuk mencapai posisi tersebut dengan memperluas areal perkebunan kelapa sawit ke wilayah timur Indonesia. Pada akhir era Orde Baru, berbagai kemudahan diberikan kepada para investor dan para pelaku ekspor CPO, terutama untuk investasi kelapa sawit di wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Namun perkembangan ini agak tersendat sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi dan perubahan politik di Indonesia, bahkan tahun 1998 Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan kelapa sawit dan produksi CPO yang cukup signifikan. Banyak perkebunan swasta besar yang terpaksa menjual perkebunannya, atau menunda pembukaan lahan baru, karena menghadapi berbagai permasalahan dalam perbankan. Namun Malaysia mengambil manfaat dari keadaan ini yaitu melakukan ekspansi ke Indonesia, dengan mengambil alih perkebunan yang menghadapi masalah dengan BPPN. Keadaan demikian dapat mengganggu rencana besar Indonesia untuk menggantikan posisi Malaysia sebagai produsen dan eksportir terbesar dunia di bidang kelapa sawit.

Kini Indonesia memiliki kebun sawit seluas 3,5 juta hektar yang tersebar di 16 provinsi, namun masih banyak kendala untuk perkembangannya, baik dilihat dari kondisi lahan, kematangan SDM maupun ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Bidang transportasi dan logistik mempunyai

peranan penting dalam perkembangan dan penyebaran kelapa sawit di Indonesia (Djoko Pitono dkk., 2002). Dukungan infrastruktur / sarana prasarana di lokasi kegiatan sangat penting, mengingat kondisi infrastruktur di luar Jawa, terutama Kawasan Indonesia Timur, masih kurang memadai untuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit, termasuk kebutuhan untuk penyebaran industri hilir ke daerah perkembangan kelapa sawit di luar Jawa dan Sumatera.

Seiring dengan era otonomi daerah dan makin pulihnya ekonomi nasional, tampaknya rencana perkembangan perkebunan kelapa sawit ke Indonesia Timur terus berlanjut, termasuk perkembangan kelapa sawit ke Propinsi Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Pasir sebagai primadona propinsi. Meskipun di kawasan tersebut potensi lahan masih cukup luas untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit lebih lanjut, namun banyak pihak mencemaskan dampak perkembangan ini, karena sebagian besar perluasan merupakan hasil konvensi hutan tropis basah di Indonesia. Di daerah seperti Kalimantan dan Papua, banyak lahan hutan yang sedianya dikonservasi sebagai perkebunan kelapa sawit, kemudian diperlakukan oleh investor semacam HPH, yaitu dimanfaatkan kayu yang ada di lahan konvensi, tanpa kejelasan pengelolaan kelapa sawitnya, sehingga potensial menambah kerusakan lingkungan (Casson, 2000).

Bagian ini akan menganalisis prospek penyerapan tenaga kerja dalam kaitan dengan keberlangsungan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit terutama di Kabupaten Pasir, dan Kalimantan Timur pada umumnya. Untuk mendapatkan gambaran lengkap, pembahasan tentang prospek pengembangan, tidak dapat dilepaskan dengan kondisi dan kebijakan makro dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit, baik nasional maupun regional. Untuk itu akan dibahas beberapa hal terkait dengan prospek penyerapan tenaga kerja yaitu keberlangsungan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, perkembangan pengelolaan perkebunan, baik hulu maupun hilir. Bagian akhir tulisan akan membahas peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penyerapan tenaga kerja terkait dengan prospek pengelolaan perkebunan kelapa sawit, serta isu pokok sebagai kesimpulan. Sebagai sumber data terutama berasal dari data primer terutama data kualitatif dan review kepustakaan termasuk hasil-hasil penelitian terkait sebelumnya.

### **5.1. Keberlangsungan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit**

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Propinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tergolong baru apabila dibandingkan dengan perkebunan sejenis di Sumatera maupun wilayah Kalimantan lainnya. Namun dalam pengelolaan perkebunan

kelapa sawit di Kaltim, pengelolaan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir yang dikembangkan sejak awal tahun 1980 an, merupakan pionir dan kini kelapa sawit menjadi unggulan komoditi perkebunan. Sampai kini Kabupaten Pasir merupakan sentra produksi kelapa sawit di kawasan ini. Sekitar separuh produksi kelapa sawit di seluruh Kaltim dihasilkan oleh wilayah Pasir yang kini menjadi dua kabupaten yaitu Pasir dan Penajam Pasir Utara. Dengan demikian komoditi kelapa sawit yang merupakan bagian penting dari sub sektor perkebunan, juga memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Kabupaten Pasir. Sektor pertanian merupakan penyumbang APBD terbesar kedua sesudah sektor pertambangan dan diperkirakan untuk periode 2001-2005, kontribusi sektor pertanian mencapai sekitar 32%, dan tanaman perkebunan sekitar 6% (Propeda Kabupaten Pasir 2001-2005: 15). Dalam perkembangannya selain pola PIR-BUN, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten Pasir juga telah mengembangkan pola PIR- Swadaya, terutama untuk masyarakat lokal di Kabupaten Pasir.

Sebagai komoditi yang mempunyai peran strategis dalam menopang ekonomi masyarakat dan menyediakan lapangan pekerjaan di Kabupatren Pasir, maka keberlangsungan perkebunan kelapa sawit perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak terkait, seperti petani, pihak perusahaan, koperasi dan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan peran yang saling terkait dalam menopang keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut, sehingga diharapkan prospek penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit juga terjamin. Petani sawit diharapkan mampu untuk mengelola kebun kelapa sawit secara optimal, agar hasilnya memadai baik untuk menopang kehidupan petani beserta keluarganya, maupun mampu melakukan penanaman kembali (*replanting*) pada waktunya. Kemampuan petani untuk menjaga keberlangsungan kebun sawit ini sangat tergantung pada kesiapan mereka dalam mengelola kelapa sawit sesuai dengan standar pengelolaan secara profesional, sehingga hasil yang diperoleh dapat optimal. Hasil yang diperoleh petani dari pemasaran TBS ke perusahaan, juga dipengaruhi oleh harga TBS yang penetapannya sangat tergantung pada itikad baik dari perusahaan baik PTPN ataupun swasta. Sedangkan pihak koperasi petani berperan penting dalam membantu kelancaran bahan kebutuhan petani sebagai penghubung antara pihak petani dan perusahaan, terutama dalam pemasaran hasil. Pihak Pemda berkepentingan dalam mensukseskan perencanaan pembangunan termasuk keberlangsungan dan perkembangan perkebunan kelapa sawit, karena komoditi tersebut merupakan salah satu sumber ekonomi utama daerah dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Di bawah ini akan dibahas kondisi masing-masing pihak terkait dan perannya dalam mengupayakan keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di kawasan Kabupaten Pasir.

### 5.1.1. Peran petani

Data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir pada tahun 2002, menunjukkan luas areal perkebunan kelapa sawit di daerah ini mencapai 52.226,20 Ha (BPS Kab. Pasir, 2003: 181). Pembangunan perkebunan yang pertama di Kaltim adalah Kabupaten Pasir yang dilaksanakan sejak tahun 1982/1983, dengan pola PIR/NES yang luas arealnya mencapai 30.270 Ha terdiri dari kebun inti seluas 13.270 Ha dan kebun plasma seluas 17000 Ha (Disbun. Kaltim, 2003). Semula yang bertindak sebagai perusahaan inti adalah PTPN VII, kini dikelola oleh PTPN13 yang berkantor pusat di Pontianak, Kalimantan Barat. Perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR ini melibatkan sekitar 12.357 KK sebagai petani plasma, terdiri dari transmigran (80%) dan sisanya masyarakat lokal (20%). Rata-rata petani plasma memperoleh lahan untuk kelapa sawit sebanyak 2 Ha, sehingga jumlah petani plasma yang terserap sebanyak 8500 KK. Selebihnya adalah petani lepas baik dari masyarakat lokal maupun pendatang. Status mereka pada waktu itu adalah pekerja borongan atau kontrak dengan sistem upah borongan atau harian. Menurut laporan dari PTPN di lokasi Tajati, pada tahun 2004 kebun inti Tajati menyerap tenaga kerja sebanyak 444 orang, terdiri dari pimpinan dan para pelaksana.

Selama masa persiapan pola PIR-BUN, yaitu 3 tahun pertama penanaman, petani melakukan berbagai kegiatan di perkebunan plasma, dibawah bimbingan dan pengawasan mandor-mandor perusahaan inti. Pengalaman dan bimbingan ketrampilan selama masa ini, dapat dianggap sebagai pemberdayaan terhadap petani plasma, sehingga diharapkan setelah konversi petani mampu mandiri dengan melakukan berbagai kegiatan di perkebunan kelapa sawit sesuai dengan standar perusahaan. Keberhasilan petani dalam menyerap pengetahuan dan ketrampilan, sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan keberlangsungan pengelolaan kebun plasma yang menjadi miliknya. Beberapa kegiatan yang dilakukan petani selama masa persiapan antara lain *nunas* (pelepasan pelepah), *nebas* (menebang gulma dan semprot), garuk piring (membersihkan semak), pemupukan, dan panen. Sedangkan kegiatan pembukaan lahan dan penanaman bibit dilakukan sendiri oleh perusahaan inti, tanpa melibatkan petani plasma.. Masa persiapan ini sangat berarti buat petani, karena umumnya transmigran hanya berpengalaman sebagai petani tanaman pangan di daerah asalnya. Namun seperti dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, tidak semua kegiatan dilakukan sesuai dengan standar perusahaan, terutama untuk kegiatan pemupukan dan pemeliharaan lainnya. Hal ini dapat berdampak pada produktivitas hasil kelapa sawit, mengingat pemupukan merupakan faktor dominan (60%) dalam mencapai hasil optimal. Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap produktivitas adalah kualitas bibit/benih, umur tanaman dan kualitas tenaga kerja. Ulah para



mandor dan ketidak seriusan petani pada masa persiapan ini selain merugikan perusahaan inti, juga merugikan petani sendiri karena berpengaruh terhadap penghasilan mereka selanjutnya. Pada saat ini produksi kelapa sawit di Kabupaten Pasir hanya mencapai 14 ton per Ha per tahun, sementara produktivitas di Malaysia dapat mencapai 35 ton per Ha per tahun.

Sejak konversi (setelah kelapa sawit menghasilkan), petani plasma berkewajiban membayar biaya pengelolaan kebun dengan sistem kredit. Hal ini berarti kegiatan selanjutnya menjadi tanggung jawab petani sesuai dengan kelompok hamparan masing-masing. Kebiasaan untuk melakukan kegiatan tanpa mengikuti standar perusahaan berlanjut, karena pengeluaran biaya pemeliharaan terutama untuk pupuk dan obat-obatan, kini menjadi beban petani. Demikian pula kegiatan pemeliharaan kebun lainnya sering diabaikan petani, baik karena kurang tenaga maupun kurang menyadari akibatnya terhadap kelangsungan usaha perkebunan. Kegiatan petani yang paling menonjol adalah kegiatan panen yang dilakukan setiap dua minggu sekali, dengan mengikut sertakan anggota keluarga atau diupahkan. Minimnya kegiatan petani dalam kegiatan pemeliharaan juga dipengaruhi oleh penghasilan petani yang tidak tentu, dan tergantung pada persediaan pupuk dan harga yang ditetapkan oleh KUD. Kualitas hasil TBS yang ditengarai oleh tingkat rendemen yang ditentukan perusahaan, biasanya dipengaruhi oleh umur pohon, pola pemeliharaan dan waktu dan cara panen. Apabila kualitas kelapa sawit tidak sesuai dengan standar perusahaan, harga menjadi lebih rendah karena dikenai penalti oleh perusahaan. Akibatnya penghasilan petani cenderung menurun setelah beberapa tahun, baik karena menurunnya kuantitas dan kualitas kelapa sawit, maupun karena adanya fluktuasi harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Dalam setahun terakhir petani umumnya merasakan kecenderungan menurunnya hasil TBS dan semakin lamanya masa panen (sebulan sekali).

### **5.1.2. Peran perusahaan**

Kelangsungan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir sangat tergantung pada perusahaan yang menjadi mitra petani baik PTPN maupun swasta. Dalam hal perkebunan yang dikelola PTPN, peran penting perusahaan dilakukan sejak awal, yaitu dari masa penanaman, pemeliharaan, sampai dengan paska panen yaitu pemasaran dan pengolahan CPO. Demikian pula untuk perusahaan swasta yang biasanya berperan aktif dalam mengolah hasil petani (CPO). Pemasaran hasil sangat tergantung pada kemampuan perusahaan CPO untuk menampungnya, sementara untuk mendirikan perusahaan memerlukan modal besar, karena ketentuan pusat yang mensyaratkan pemilikan perkebunan inti untuk pendirian pabrik CPO.

Dengan demikian peran perusahaan dalam upaya memelihara kelangsungan perkebunan kelapa sawit, mencakup industri dari hulu ke hilir.

Selama ini pemasaran hasil TBS dari Kabupaten Pasir dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pabrik pengolahan CPO yang dimiliki perusahaan inti. Di Kabupaten Pasir terdapat 3 pabrik pengolahan CPO milik PTPN. Sebetulnya Pemerintah daerah pernah menjalin kontrak penjualan TBS hasil PIR-Swadaya ke PTPN 13, namun kini tidak dilanjutkan, karena petani harus menghadapi antrian panjang di pabrik pengolahan CPO, dan perbedaan harga yang ditentukan untuk petani dari PIR-Swadaya lebih rendah dari petani plasma PIR-BUN. Keadaan ini menunjukkan pabrik CPO yang tersedia sudah tidak mampu lagi menampung hasil TBS, terutama setelah PIR-Swadaya mulai menghasilkan. PTPN berperan dominan terhadap pemasaran hasil produksi petani plasma terutama dalam menentukan harga TBS, baik sebelum maupun sesudah pelunasan kredit.. Padahal setelah petani memperoleh sertifikat tanda pemilikan kebun, pemasaran dapat dilakukan secara bebas melalui KUD, baik ke perusahaan inti maupun pihak swasta. Namun sampai penelitian dilakukan, hampir semua petani plasma masih tetap menjadikan PTPN sebagai mitra utama dalam pemasaran hasil, walaupun banyak petani yang sudah melunasi kreditnya. Ikatan kemitraan antara plasma dan inti yang sudah terbina selama ini, tetap dipertahankan meskipun sebatas hubungan pemasaran hasil. Bahkan masuknya perusahaan swasta sebagai penampung hasil TBS (baru 6 bulan), tidak mempengaruhi KUD untuk mengalihkan pemasarannya, karena harga yang ditentukan oleh PTPN masih cukup bersaing dengan perusahaan swasta. Menurut informan dari KUD, apabila dalam perkembangannya harga yang ditentukan PTPN tidak menguntungkan petani, KUD bebas untuk mengalihkannya ke pihak swasta yang lebih menguntungkan. Dominannya perusahaan dalam penentuan harga selama ini cenderung kurang menguntungkan petani, sehingga sangat berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam kelangsungan pengelolaan kebun, karena pemeliharaan dan penanaman kembali membutuhkan biaya besar, sementara hasil produksi kurang mencukupi. Meskipun terdapat kelompok kerja (Pokja) untuk penetapan harga TBS, namun peran PTPN tetap sangat dominan, sehingga Pokja kesulitan dalam memperjuangkan harga yang lebih baik bagi petani.

### 5.1.3. Peran koperasi

Posisi koperasi (KUD) dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sangat strategis, terutama sebagai penghubung antara perusahaan inti dan plasma, baik dalam mengkoordinir cicilan kredit pada perusahaan, maupun fungsi koordinasi dalam pemasaran hasil. Sejak konversi, koperasi juga berfungsi

dalam penyuluhan di samping sebagai penyalur pupuk dan obat-obatan, menyediakan transportasi untuk pengangkut kelapa sawit dari kebun ke pabrik pengolahan. Koperasi juga menyediakan bahan kebutuhan sehari-hari petani. Sebagai anggota koperasi, petani mendapat berbagai kemudahan kredit (sampai setahun), dan mendapat prioritas dalam pemasaran ke PTP..

Peran KUD sangat besar dalam proses pemasaran TBS sejak dari kebun ke pabrik CPO, karena perusahaan hanya mau menerima apabila melalui KUD. KUD juga berkepentingan karena pada umumnya petani memiliki hutang pada KUD, baik untuk keperluan pengelolaan kebun maupun untuk keperluan sehari-hari. Oleh karena pembayaran hasil penjualan TBS baru diterima KUD setelah sebulan TBS diserahkan ke pabrik, bersamaan dengan penetapan harga oleh PTPN, maka petani menerima hasil sesudah dilakukan berbagai potongan hutang masing-masing petani. Akibatnya petani hanya menerima sisa penghasilan yang sangat berfluktuasi, tergantung hasil panen dan harga yang ditetapkan. Besar kecilnya hasil panen tidak selalu berkorelasi positif dengan kesejahteraan petani, karena seringkali pada saat panen raya, harga cenderung turun. Penghasilan yang berfluktuasi ini menjadi kendala bagi petani untuk melakukan pengelolaan sesuai standar, sehingga dapat berpengaruh terhadap kemampuan petani dalam melakukan *replanting* kelak. Biasanya KUD memperoleh informasi harga TBS, setelah sebulan pengiriman TBS ke pabrik, sehingga KUD kesulitan untuk membandingkan harga dengan pihak lain.

Peran Koperasi sangat strategis baik sebagai wakil petani dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kebun, maupun sebagai penghubung antara petani dan perusahaan. Namun demikian upaya KUD dengan mengikut sertakan petani dalam asuransi untuk peremajaan pohon, terancam gagal, karena banyak dana yang sudah dikumpulkan KUD, ditarik kembali oleh sebagian petani akibat menurunnya hasil kelapa sawit dalam setahun terakhir. Padahal asuransi ini dimaksudkan untuk membantu petani melaksanakan persiapan *replanting*, guna menjaga kelangsungan perkebunan plasmanya. Kondisi ekonomi petani plasma juga dapat dilihat dari data survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar petani plasma terutama transmigran asli (tahun 1987), pemilikan lahannya tidak bertambah yaitu rata-rata 3 Ha. Sementara pengganti petani (yang datang sesudah tahun 1990) mayoritas memiliki lahan di atas 3 Ha. Besar kemungkinan mereka memiliki modal sehingga mampu mengembangkan kebun kelapa sawit. Sebaliknya petani yang hanya mengandalkan hasil kebun plasma saja, dengan hasil yang cenderung menurun, akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan keberlangsungan kebunnya, karena dalam waktu dekat harus melaksanakan penanaman kembali (*replanting*).

#### 5.1.4. Pemerintah daerah

Salah satu semangat dalam visi pembangunan Kabupaten Pasir adalah 'menjadikan Kabupaten Pasir sebagai kawasan agroindustri terkemuka' (Propeda Kab. Pasir 2001-2005: 20). Dalam mewujudkan visi ini, pemda berkepentingan untuk menjaga kelangsungan hasil pertanian dalam arti luas di kawasan ini, sehingga memungkinkan untuk berkembangnya industri hilir di wilayahnya. Perkembangan agro industri sangat strategis baik dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, maupun menyediakan kesempatan kerja baik pada industri hulu maupun hilir, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Swadaya di Kabupaten Pasir, tidak terlepas dari strategi untuk mencapai visi atau sasaran pembangunan tersebut. Perkebunan dengan pola PIR- Swadaya ini merupakan kebijakan propinsi dan daerah tingkat II, dengan lokasi perkebunan yang tersebar pada lima kecamatan yaitu Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Grogot dan Ps. Belengkong. Sejak tahun 1990, pemerintah daerah membangun perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR Swadaya (PIR Lokal) dan PIR swadaya murni. PIR swadaya ini dikelola oleh Dinas Perkebunan Propinsi (APBD I) dengan luas 4324 Ha dan menjadi 6872 Ha pada tahun 2002. Tambahan luas areal berasal dari dana pemerintah daerah (APBD II) seluas 1499 Ha dan swadaya murni petani seluas 1148 Ha (Disbun. Kaltim, 2003:2). PIR-Swadaya ini melibatkan peserta sebanyak 3863 yang tergabung dalam 89 kelompok tani.

Peran pemda dalam pengembangan pola PIR-Swadaya sangat penting karena dimaksudkan antara lain untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara kehidupan petani plasma (PIR- PTPN) dengan masyarakat di sekitarnya (petani lokal). Animo masyarakat untuk mengikuti jejak petani plasma dalam mengelola perkebunan kelapa sawit dan terbatasnya kemampuan PTPN dalam menampung petani lokal (hanya 20%), menyebabkan upaya Pemda mendapat sambutan positif dari masyarakat Pasir. Apalagi Kabupaten Pasir masih memiliki potensi lahan yang cukup untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Dalam era otonomi daerah, pemda memiliki kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan, strategi dan program pengembangan sektor perkebunan yang berbasis ekonomi kerakyatan. Pemda sebagai daerah otonom dapat memberikan berbagai kemudahan baik terhadap investor maupun masyarakat petani, antara lain kemudahan izin, keringanan pajak dan peningkatan sarana dan prasarana, pemberian subsidi atau paket kredit untuk petani pemula. Pemda juga dapat memberi dukungan berupa kemudahan untuk mengakses modal bagi petani plasma yang memerlukan dana untuk *replanting* atau perluasan lahan. Pengelolaan lahan

perkebunan kelapa sawit seluas 2 Ha per keluarga, kini dianggap kurang mencukupi untuk kesejahteraan petani dan keluarganya. Keadaan ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah pecahan KK, keterbatasan kesempatan kerja di luar pertanian, serta fluktuasi harga yang cenderung kurang menguntungkan petani. Kemampuan petani untuk perluasan kebun sangat berarti baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya, juga sekaligus berarti menyediakan lapangan kerja yang lebih luas bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya, termasuk pecahan KK yang umumnya tidak memiliki lahan. Keadaan ini juga dapat membantu petani plasma dalam merencanakan penanaman kembali perkebunan plasma, yang semakin dekat waktunya. Apabila dalam kebijakan sub-sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dapat diarahkan untuk membantu mempersiapkan penanaman kembali kelapa sawit, baik petani plasma PTPN maupun petani swadaya, maka keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut dapat dipertahankan. Hal ini disebabkan menurunnya produksi dan kesejahteraan petani plasma akhir-akhir ini dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan pengelolaan kelapa sawit, yang berarti prospek penyediaan lapangan kerja dari perkebunan sawit turut terganggu.

Selama ini peran Pemda berbeda dalam menghadapi kedua pola perkebunan (PIR-BUN dan PIR-Swadaya). Keadaan ini disebabkan adanya perbedaan secara substansial antara kedua pola tersebut, baik dalam sumber pendanaan maupun penanggung jawab pengelolaannya. Pada pola PIR-BUN, sumber dana berasal dari bank dunia dan BRI, serta dikelola sebagai bagian dari PIR-nasional. Semua paket untuk persiapan awal pengelolaan kelapa sawit disediakan oleh perusahaan inti (PTPN) yaitu bibit, pupuk, obat-obatan, yang akan dibayar kembali oleh petani setelah menghasilkan. Namun sejak pengelolaan lahan menjadi tanggung jawab petani plasma, hubungan petani plasma dengan perusahaan inti hanya terbatas pada kegiatan pemasaran.

Pada pola PIR-Swadaya, peran Pemda sangat dominan karena sumber dana berasal dari APBD propinsi dan kabupaten, dengan substansi pengelolaan seperti pada pola PIR. Sebagai petani plasma adalah masyarakat lokal yang menyediakan lahan sendiri dan sejak awal petani dilibatkan dalam persiapan lahan dan penanaman bibit. Untuk pembiayaan selama persiapan, petani menerima paket berupa bibit, pupuk, obat-obatan, dan pembinaan dari Dinas Perkebunan propinsi atau kabupaten. Sebagian paket ini harus dibayar kembali secara kredit oleh petani swadaya, setelah kebun menghasilkan. Sebagai manager pengelola PIR swadaya adalah Ketua UPP PIR swadaya yang mendapat wewenang dari Disbun Propinsi dan dibantu oleh KUD di setiap kecamatan. Selain memimpin pengelolaan kebun kelapa sawit, kepala UPP juga berperan sebagai penghubung dalam pemasaran hasil ke pihak perusahaan pengolahan CPO atau ke perusahaan swasta yang

berinvestasi di lokasi perkebunan. Perbedaan kedua pola PIR inilah yang menyebabkan Pemda lebih memprioritaskan pemberdayaan petani lokal daripada petani plasma pada pola PIR-BUN, yang pembinaan sebelumnya menjadi tanggung jawab PTPN sebagai perusahaan inti. Namun pada saat ini kedua kelompok petani ini menjadi sasaran kebijakan dinas perkebunan pada umumnya, meskipun dengan porsi pembinaan yang berbeda. Dikuatirkan kurangnya pembinaan pada salah satu kelompok petani akan berdampak pada kualitas hasil dan kelangsungan perkebunan, sehingga peningkatan daya saing kelapa sawit di kawasan tersebut sulit tercapai.

Dalam era otonomi daerah, Pemda juga mempunyai wewenang lebih besar dalam mengklarifikasi status tanah (tanah negara atau tanah adat), sehingga investor mempunyai kepastian sebelum mengelola perkebunannya. Kerancuan mengenai status tanah dikuatirkan dapat menimbulkan keresahan sosial, sehingga dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di sub-sektor perkebunan. Penguasaan lahan perkebunan oleh PTPN dengan pola PIR-BUN merupakan bagian dari program nasional, yang melibatkan Departemen Perkebunan dan Departemen Transmigrasi. Sebelum otonomi daerah, semua izin untuk pemanfaatan lahan negara menjadi wewenang pemerintah pusat. Banyak tanah adat atau hak ulayat yang diklaim sebagai tanah negara, sehingga masyarakat setempat tidak berdaya untuk mempertahankan hak ulayat mereka, karena tidak ada bukti nyata yang mendukungnya. Pengakuan undang-undang akan hak ulayat atau adat baru mendapat ruang dalam era reformasi, sebagai koreksi atas pengabaian hak-hak masyarakat adat sebelumnya. Pengakuan hak adat tersebut di satu pihak sangat menguntungkan masyarakat lokal karena dapat mengembalikan hak-hak mereka yang hilang, tetapi di lain pihak dapat menghambat investor dalam keberlangsungan dan perkembangan perkebunan kelapa sawit di kawasan ini. Dalam beberapa kasus, tuntutan terhadap hak adat juga potensial disalahgunakan untuk berbagai kepentingan.

Meningkatnya harga lahan perkebunan juga potensial untuk praktek penyalahgunaan hak adat oleh berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat. Menurut informasi dari tetua adat di Pasir, hak adat biasanya diperoleh secara turun temurun terutama berkaitan dengan hutan rotan dan buah-buahan. Hak-hak adat diketahui oleh kelompok masyarakat bersangkutan, namun belum diakui pemerintah karena tidak jelas kriterianya. Ketidakjelasan aturan hak adat dan melemahnya kekuatan adat, sering menimbulkan gejolak dalam masyarakat, karena merasa hak-haknya terabaikan. Sebagai contoh pada pembukaan pertambangan yang dianggap banyak mengabaikan hak adat. Dalam mengatasi permasalahan ini, Pemda berwenang untuk meningkatkan kerja sama dengan tokoh adat setempat untuk meninjau status tanah hak negara. Hal ini dilakukan agar para inves-

tor tidak menghadapi resiko setelah proyek dilaksanakan. Kepastian akan status lahan yang diminati investor dapat menjamin keberlangsungan usaha perkebunan di kemudian hari, sehingga tidak menghambat penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit.

Dalam 6 bulan terakhir, Pemda telah berhasil menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk berinvestasi di bidang pemasaran kelapa sawit lengkap dengan sarana dan prasarana untuk penimbangannya. Persaingan antara PTPN dan pihak swasta dalam pemasaran kelapa sawit cukup positif bagi petani plasma, karena harga menjadi lebih kompetitif. Apalagi dalam promosinya PT swasta tidak melakukan penalti dan harga ditentukan di muka berdasarkan harga pasar dunia, sehingga dapat bersaing dengan harga dari PTPN. Upaya pemda untuk menambah pabrik pengolahan CPO agar dapat menampung kelebihan hasil kelapa sawit, sampai sekarang belum berhasil karena terbentur dengan peraturan pusat yang mewajibkan adanya perkebunan inti bagi pabrik pengolahan CPO. Padahal untuk menampung kelapa sawit dari perkebunan seluas 56.000 Ha, diperlukan 6 buah pabrik CPO, sementara pabrik CPO milik PTPN hanya 3 buah. Kasus demo petani yang pernah terjadi disebabkan oleh hasil produksi TBS yang melebihi daya tampung CPO, sehingga mengakibatkan antrian panjang yang mempengaruhi kualitas TBS dan menurunkan harga TBS. Tertundanya pendirian pabrik CPO, dapat diartikan berkurangnya kesempatan Pemda untuk memperluas kesempatan kerja pada industri hilir, dan meniadakan nilai tambah hasil produksi di wilayah Kabupaten Pasir. Sementara hasil TBS yang ditampung oleh perusahaan swasta lebih menguntungkan daerah lain, karena TBS diproses di pabrik CPO yang lokasinya di luar Kabupaten Pasir.

## 5.2. Prospek Pengelolaan Kelapa Sawit : Hulu dan Hilir

### 5.2.1. Prospek perkebunan kelapa sawit

#### *Di tingkat nasional*

Perkembangan pesat perkebunan kelapa sawit di Indonesia terkait erat dengan makin meningkatnya permintaan CPO, dan permintaan minyak goreng nabati baik di pasar domestik maupun global, yang merupakan hasil pengolahan dari industri hulu. Sampai tahun 1997 produksi CPO di tingkat nasional juga mengalami perkembangan pesat yaitu meningkat rata-rata sekitar 12% setahun (Casson, 2000).

Indonesia bertekad untuk dapat mengganti posisi Malaysia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Untuk mencapai posisi tersebut, secara nasional dilakukan perencanaan peningkatan luas perkebunan kelapa sawit

sampai 5,5 juta Ha pada tahun 2000, yang diarahkan ke wilayah Indonesia bagian timur terutama Kalimantan, Sulawesi dan Papua (Irian Jaya). Hal yang sama direncanakan pula untuk meningkatkan produksi CPO sampai 7,2 juta ton pada tahun 2000 dan 10,6 juta ton pada tahun 2005 (Arifin dan Susila, 1998). Perkembangan yang pesat di berbagai wilayah terjadi pada semua jenis perkebunan baik milik Negara (PTPN), swasta maupun perkebunan rakyat. Wilayah yang sudah lama mengalami perkembangan kelapa sawit, terutama dipengaruhi oleh meningkatnya perkebunan swasta besar, sementara untuk daerah yang baru berkembang, lebih banyak didominasi oleh perusahaan Negara. Namun demikian sampai tahun 1997, lahan perkebunan yang sudah ditanami kurang dari 30%nya, dari lahan yang disediakan. Sebagian disebabkan investor kurang serius dalam mengusahakan kebun sawit baik karena pengaruh krisis, atau mereka cenderung lebih memanfaatkan hutan konversi untuk keperluan lain (seperti pengambilan kayu) daripada membuka dan mengembangkan perkebunan sesuai dengan izin lokasi.

Berbagai kebijakan dilakukan untuk menarik investor memperluas perkebunan kelapa sawit ke arah Indonesia bagian timur, antara lain dengan menurunkan pajak ekspor produk CPO sampai 5%, mempromosikan pengembangan kebun sawit di Indonesia Timur dan mengalokasikan lahan yang luas melalui Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), bahkan penguasaan lahan sampai 40.000 Ha (dua kali lipat daerah lain) bagi para investor yang bersedia mengembangkan kebun sawit di Irian Jaya. Dengan dukungan kebijakan pusat, prospek perkembangan perkebunan kelapa sawit sesudah krisis masih terbuka lebar, terutama di Kalimantan dan Irian Jaya. Perkembangan sub-sektor kelapa sawit merupakan komoditi strategis, yang selain menghasilkan devisa, juga bersifat padat karya, karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dengan demikian apabila kebijakan tersebut tetap menjadi prioritas bagi pemerintah daerah, maka daerah berpeluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus mengatasi pengangguran di wilayahnya.

### *Di tingkat daerah*

Perkembangan pesat kelapa sawit di tingkat nasional, tidak berarti sama dengan perkembangan di tingkat daerah seperti Kalimantan Timur. Luas areal perkebunan kelapa sawit di luar Sumatera relatif masih kecil (kurang



dari 100.000 Ha.) (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1998). Bahkan dibandingkan propinsi lainnya di Kalimantan, pada tahun 1997 Propinsi Kaltim memiliki areal perkebunan terkecil yaitu 49.219 Ha, sementara Propinsi Kalbar memiliki areal kebun sawit dan produksi CPO terbesar yaitu 227.712 Ha dan 295.477 tonnes (Deptan. Dirjen Perkebunan, 1998). Kalimantan Timur sebagai bagian dari rencana pengembangan, merupakan kawasan perkembangan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Sesudah krisis (1998-2002) perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur mengalami perkembangan luas areal dan jumlah produksi yang relatif tinggi dibandingkan dengan perkembangan rata-rata luas areal dan produksi komoditi perkebunan lainnya. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Kaltim berkembang dari 91.571 Ha menjadi 132.178,5 Ha selama 5 tahun atau rata-rata pertumbuhan sebesar 11,08 % per tahun, merupakan pertumbuhan rata-rata tertinggi sesudah komoditi lada (14,38%). Sedangkan pertumbuhan rata-rata produksi kelapa sawit tertinggi dibandingkan komoditi lain yaitu mencapai 58.76% (Tabel 1 dan 3 laporan Disbun Kaltim, 2003). Dilihat dari perkembangan luas areal kebun sawit di Kaltim selama tahun 1992-2002, perkembangan terjadi pada semua jenis/pola perkebunan yaitu perkebunan rakyat (26,12%), PTPN (11,67%) dan PBS (48,42%), dengan kecenderungan perkembangan terbesar pada jenis perkebunan swasta, yaitu sekitar 48% selama 10 tahun (1992-2002) (Renstra Disbun Propinsi Kaltim, 2003:8). Daerah yang mengalami perkembangan kelapa sawit terluas di Kaltim adalah Kabupaten Pasir (sekarang menjadi Pasir dan Penajam Pasir Utara-PPU), yang mencapai sekitar separuh dari luas kelapa sawit di Kaltim.

Rencana perkembangan lebih lanjut perkebunan kelapa sawit di Kaltim ditetapkan pada tahun 1998, dengan luas 1 juta Ha (1,5 juta di Kalbar), untuk jangka waktu 15 tahun (2003-2018). Pada tahun 2003 realisasi kebun sawit di Kaltim baru mencapai luas sebesar 148.000 Ha atau 14,8%, sehingga untuk mencapai target 1 juta Ha pada tahun 2018, diperlukan kebijakan yang komprehensif dari masing-masing daerah untuk mendukung rencana tersebut. Rencana perluasan ini tersebar ke berbagai kabupaten, terutama Kutai Timur, Berau, Pasir dan Bulungan. Lebih dari separuh rencana perluasan terdapat di kabupaten-kabupaten ex- Kutai, terutama Kutai Timur. Secara rinci rencana penyebaran perluasan kebun sawit di Kaltim menurut daerah tingkat II sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Luas Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kabupaten  
di Propinsi Kalimantan Timur

LOKASI	Jumlah areal (Ha)
Kabupaten Pasir	25.000
Kabupaten Kutai Timur	500.000
Kabupaten Kutai Kertanegara	40.000
Kabupaten Kutai Barat	35.000
Kabupaten Nunukan	25.000
Kabupaten Berau	81.000
Kabupaten Bulungan	25.000
Kabupaten Malinau	4.500
Diabun Propinsi	10.000
TOTAL	745.500

Sumber: Laporan Disbun Propinsi Kaltim, 2003.

Kawasan Pasir (Pasir dan PPU) saat ini mendominasi perkebunan kelapa sawit di Kaltim, karena pada tahun 2002 memiliki luas areal lebih dari separuh luas kebun sawit di Kaltim (64.059,5 Ha). Kondisi ini menempatkan komoditi ini sebagai primadona dalam perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Meskipun banyak pihak meragukan Kaltim dapat mencapai target 1 juta Ha pada tahun 2018, namun melihat potensi lahan di Kabupaten Pasir, tampaknya target perluasan 25.000 Ha tidak terlalu sulit untuk dicapai. Hal ini didasarkan pada masih tersedianya Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) yang dapat dikonversikan untuk usaha perkebunan dan sudah mendapat ijin lokasi seluas 374.199 Ha (Pasir dan PPU), sementara realisasi tanam baru sekitar 96.360,5 Ha. Demikian pula kawasan ini masih memiliki sisa lahan KBNK dan lokasi yang ijin usahanya telah dicabut seluas 278.282 Ha. Namun banyaknya lahan yang dicabut izin lokasinya, juga menunjukkan ketidakseriusan investor untuk pengembangan kebun kelapa sawit di wilayah ini. Keengganan para investor juga disebabkan terjadinya konflik yang meluas antara perusahaan (PTPN) dengan masyarakat lokal, berkaitan dengan tanah adat atau hak ulayat. Keadaan ini dapat berpengaruh terhadap percepatan rencana perkembangan kebun sawit di masa depan.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan dari Dinas Perkebunan Pasir, target untuk mengembangkan areal kelapa sawit seluas 25.000 Ha di Kabupaten Pasir, terdiri dari 1.200 Ha untuk PIR Swadaya, 5.000 Ha yang akan dikembangkan oleh Koperasi Pegawai Negeri dan sisanya 18.800 Ha disediakan untuk perusahaan swasta yang berminat serius untuk menanamkan investasi di perkebunan kelapa sawit. Sedangkan perluasan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Swadaya di Kabupaten Pasir ditargetkan seluas 10.000 Ha dengan lokasi terutama sepanjang jalan (kiri-kanan) antara Tanah Grogot – Long Kali.

Sebagai komoditi andalan di Pasir, pemda berkepentingan untuk mendorong percepatan perluasan kelapa sawit di wilayahnya. Peran komoditi ini makin strategis di masa depan mengingat adanya ketersediaan lahan yang memadai untuk perkebunan, didukung oleh agroklimat yang sesuai untuk budidaya perkebunan. Di sisi lain komoditi yang dapat diperbaharui ini dapat menjadi andalan pengganti dari SDA yang ketersediaannya makin menipis seperti kayu dan pertambangan, sehingga sulit/tidak dapat diperbaharui lagi. Sebagai primadona, kelapa sawit di Pasir sangat diandalkan sebagai pengganti pemasok pendapatan daerah, di samping peran pentingnya dalam penyediaan lapangan kerja di daerah tersebut. Karena pengelolaan perkebunan cenderung bersifat padat karya, maka perkembangan lebih lanjut dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi. Namun demikian prospek perkembangan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tersebut juga terkait erat dengan berbagai faktor baik internal maupun eksternal, seperti potensi dan kondisi lahan, kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pusat, masalah lingkungan, serta kesiapan sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah (termasuk adat budaya).

### **5.2.2. Prospek industri pengolahan kelapa sawit**

CPO merupakan komoditi yang strategis, karena selain menghasilkan devisa, juga merupakan bahan baku pembuatan minyak masak utama yang banyak dikonsumsi dalam negeri. Dari perspektif investor, pasar CPO yang luas baik di dalam negeri maupun internasional, dapat diandalkan bagi keberlangsungan dan perkembangan usaha pengelolaan kelapa sawit dari hulu ke hilir. Sebagai komoditi ekspor yang sangat dibutuhkan oleh pasar baik domestik dan global, keberlangsungan dan perkembangan pengelolaan kelapa sawit dari hulu ke hilir sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekspor pemerintah, pajak dan kebijakan lainnya yang mendukung perkembangan industri terkait dalam negeri, termasuk penyebarannya ke daerah-daerah penghasil kelapa sawit.

Indonesia dianggap dapat menghasilkan kelapa sawit dengan biaya produksi yang efisien, karena dukungan berbagai faktor seperti ketersediaan dan kondisi lahan, tenaga kerja yang relatif murah dan potensi panen sepanjang panen. Selain sebagai produsen minyak sawit, Indonesia juga merupakan pasar minyak sawit terbesar di dunia, karena data tahun 1997 menunjukkan pasar Indonesia mengkonsumsi lebih dari separuh produksi CPO domestik, atau sekitar 20% produksi global. Sebelum krisis, pertumbuhan rata-rata permintaan global minyak sawit tercatat paling tinggi dibandingkan minyak lainnya. Dengan kondisi tersebut, prospek perkembangan minyak sawit di Indonesia masih cerah, karena luasnya permintaan pasar akan minyak kelapa

sawit, baik karena penambahan penduduk, maupun meningkatnya rata-rata penghasilan penduduk per kapita.

Dalam hal pengolahan hasil yang berkaitan dengan komoditi kelapa sawit, Indonesia tertinggal jauh dibandingkan Malaysia. Selama ini Indonesia lebih memfokuskan pada upaya perkembangan di sub-sektor perkebunan daripada untuk industri hilirnya. Sampai sekarang Indonesia hanya mampu mengembangkan industri pengolahan sederhana untuk minyak goreng dan olein, itupun masih terkonsentrasi di Jawa dan Sumatera. Padahal data menunjukkan relatif tingginya nilai tambah yang diperoleh dari kegiatan industri hilir yaitu industri minyak goreng yang mencapai sekitar 23-35% dari nilai input, selama periode 1987-1994 (Sarjono, 1996:15). Sementara negara produsen minyak sawit lainnya seperti Malaysia, selain minyak goreng juga mengembangkan industri pengolahan dengan teknologi tinggi untuk menghasilkan berbagai produk keturunannya seperti margarine, *shortening*, *oleokimia* dan sabun. Indonesia dengan potensi ketersediaan lahan dan efisiensi produksi (biaya SDM yang relatif murah), seharusnya lebih prospektif dibandingkan Malaysia, yang kini semakin jenuh karena keterbatasan lahan produktif.

Dalam hal menangkap peluang pasar yang besar berkaitan dengan kelapa sawit, penekanan strategi Indonesia berbeda dengan Malaysia. Malaysia lebih memfokuskan pada pengembangan industri hilir, sementara ekspansi pengadaan bahan baku diperoleh dengan kecenderungan melakukan relokasi perkebunan dan industri CPO ke Indonesia. Sebaliknya Indonesia menangkap peluang itu dengan strategi memperluas industri hulunya. Dalam hal ini Malaysia relatif lebih maju karena terjadinya proses *dynamic comparative advantage* di bidang kelapa sawit, yang sangat menguntungkan baik dari segi meningkatnya nilai tambah maupun perluasan kesempatan kerja (Arifin, 2004: 195). Sementara Indonesia perluasan kesempatan kerja masih mengandalkan pada sektor primer atau industri hulu yang relatif terbatas kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan petani, dan menciptakan lapangan kerja.

Ketertinggalan Indonesia dalam perkembangan Industri hilir, dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pada era orde baru yang hanya menguntungkan sekelompok kecil pengusaha konglomerat, termasuk penguasaan industri minyak goreng dengan jaringan pemasarannya sampai ke pelosok tanah air. Sekitar 60% pangsa pasar minyak goreng dikuasai oleh 2 kelompok besar konglomerat yaitu grup Salim dan Sinar Mas, yang juga secara terintegrasi menguasai industri dari hulu ke hilir, yaitu perkebunan, pengolahan CPO, industri minyak goreng, hingga ke pemasaran minyak gorengnya. Penguasaan secara total ini berpengaruh besar terhadap kebijakan

berkaitan ekspor pemerintah serta penetapan harga TBS di tingkat petani (Arifin, 2004). Kebijakan pengembangan agroindustri dengan pola tersebut tidak banyak memberi manfaat bagi kelompok besar masyarakat petani, baik dalam penyediaan kesempatan kerja maupun kesejahteraan petani. Kebijakan demikian bahkan memperlebar jurang perbedaan sosial-ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi berkaitan dengan pengelolaan kelapa sawit, terutama antara segelintir konglomerat dengan masyarakat pekebun.

Di tingkat daerah baik propinsi maupun kabupaten, perkembangan industri hilir hanya terbatas pada pengolahan minyak inti sawit (CPO), yang memang harus dilakukan di lokasi perkebunan untuk menjaga kualitas TBS. Pesatnya permintaan terhadap CPO baik di pasar domestik dan global, menyebabkan para investor di daerah lebih tertarik untuk mengembangkan areal perkebunan dan pendirian pabrik CPO, daripada berkonsentrasi ke pengembangan industri hilir nya. Dalam skala kecil, industri seperti minyak goreng juga sulit bersaing dengan para pengusaha yang cenderung oligopolistik. Kendala yang dihadapi pengusaha agro-industri skala kecil adalah terbatasnya akses informasi pasar dan modal, sehingga cenderung inefisien dalam pengelolaannya, dan kalah bersaing dengan pemodal yang memiliki banyak akses dan menguasai pangsa pasar yang luas. Dalam pengembangan industri pengolahan, para pemodal besar juga lebih memilih berkonsentrasi di Jawa, dengan alasan mendekati pasar potensial. Apabila kegiatan industri hilir tersebut dapat didorong penyebarannya ke daerah perkembangan kelapa sawit lainnya, maka peran pengembangan sub-sektor agro-industri sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah makin dapat terwujud.

Meningkatnya hasil produksi kelapa sawit sebagai dampak perluasan areal kebun kelapa sawit, telah meningkatkan kebutuhan daerah untuk pengolahan CPO. Kabupaten Pasir kini hanya memiliki 3 buah pabrik CPO milik PTPN, dan Idealnya diperlukan sedikitnya 6 pabrik CPO, namun pemda menghadapi kendala pengadaannya, karena peraturan pusat yang kurang akomodatif dengan perkembangan ekonomi daerah. Persyaratan pemilikan kebun inti untuk setiap pendirian pabrik CPO, tidak sejalan dengan kebijakan Pemda yang telah berhasil dalam pengembangan perkebunan dengan pola PIR-Swadaya. Pada saat ini yang dibutuhkan adalah pendirian pabrik CPO di Pasir, untuk menampung peningkatan hasil produksi kelapa sawit di kawasan ini. Bertambahnya pabrik CPO yang dikelola oleh pihak swasta, juga dapat mengurangi distorsi harga di tingkat petani yang selama ini didominasi oleh PTPN. Benturan kepentingan antar sektor (misal industri dan perkebunan) juga berpengaruh terhadap kemungkinan peningkatan agro-industri terkait dengan kelapa sawit. Kebijakan yang dirintis dinas perindustrian untuk memproses CPO skala kecil, sulit direalisasikan tanpa berbenturan dengan kepentingan pusat (diwakili oleh PTPN) di kawasan tersebut. Padahal

pengembangan agro-industri di kawasan penghasil komoditi strategis ini sangat diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja bagi keluarga petani dan masyarakat di sekitarnya, terutama angkatan muda yang relatif terdidik.

Mengacu pada PROPEDA Kabupaten Pasir periode 2001-2005, tampaknya kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit sejalan dengan kebijakan umum yang cenderung lebih menekankan pada 'pemberdayaan industri hulu, yang berorientasi pada pasar dengan meningkatkan partisipasi masyarakat'. Sedangkan peran pemerintah lebih pada penyediaan fasilitas umum, seperti sarana dan prasarana, IPTEK dan regulasi yang didasarkan pada mekanisme insentif dan disinsentif (Pemda Kab. Pasir, 2002). Strategi kebijakan lainnya dalam PROPEDA yaitu 'memperkuat industri hilir guna menciptakan nilai tambah', tampaknya belum difokuskan untuk komoditi kelapa sawit, karena lebih dimaksudkan untuk skala makro perkebunan. Sebagai komoditi strategis yang dibutuhkan pasar luas, kebijakan penekanan pada industri hulu, memang dapat menjamin keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut. Namun demikian prospek penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dan peningkatan nilai tambah produk, membutuhkan pengembangan industri hilir yang lebih luas. Demikian pula masih banyak potensi pengembangan industri hilir dari produk kelapa sawit di daerah, termasuk pemanfaatan limbah kelapa sawit yang belum tersentuh oleh kebijakan pembangunan daerah. Padahal kebijakan tersebut dapat lebih menjamin keberlangsungan dan perkembangan industri hulu, sekaligus pengembangan kegiatan ekonomi lainnya, yang sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat baik petani maupun elemen masyarakat lainnya. Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat sangat potensial untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lain, sehingga pada gilirannya dapat membantu untuk mempercepat pengentasan kemiskinan bagi masyarakat di kawasan tersebut.

### **5.3. Prospek Penyerapan Tenaga Kerja : Peluang dan Tantangan**

Sebagai komoditi pertanian, pengelolaan perkebunan yang luas dan menyebar ke berbagai lokasi, sangat potensial menyerap banyak tenaga kerja di daerah, khususnya masyarakat petani. Rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka mencapai target 1 juta Ha, diperkirakan mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama di kalangan petani. Apabila rencana ini dapat direalisasikan, akan sangat membantu pemda terutama dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan dan kemiskinan. Dengan demikian prospek penyerapan tenaga kerja di sub-sektor kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh keberlangsungan dan perkembangan sub-sektor

tersebut. Namun prospek yang sangat menjanjikan ini dapat diwujudkan apabila pelaku-pelaku ekonomi baik di daerah maupun di pusat mampu memanfaatkan peluang yang tersedia dan sekaligus dapat mengatasi tantangan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Bagian ini akan membahas beberapa peluang dan tantangan ke depan yang dapat mempengaruhi prospek penyerapan tenaga kerja terkait dengan pengelolaan kelapa sawit. Beberapa peluang dan tantangan dalam perkembangan kelapa sawit antara lain potensi dan kondisi lahan, kebijakan dan sistem birokrasi, potensi pasar dan daya saing, dan kesiapan sumber daya manusia.

### 5.3.1. Potensi dan kondisi sumber daya alam (SDA)

#### *Ketersediaan dan kondisi lahan*

Dilihat dari ketersediaan lahan secara fisik di Kabupaten Pasir dan Kaltim pada umumnya, dapat dinyatakan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit masih sangat potensial di kawasan tersebut. Hal ini merupakan peluang penting yang selama ini menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pengembangan perkebunan kelapa sawit. Namun dilihat dari realisasi tanam yang sudah dilakukan oleh masing-masing daerah, tampaknya tidak mudah memanfaatkan peluang emas ini sesuai dengan rencana masing-masing daerah. Hal ini dapat dilihat dari data tentang realisasi tanam yang relatif rendah dibandingkan dengan luas lahan yang memiliki izin lokasi, yaitu pada tahun 2002 sekitar 14% di Kaltim dan sekitar 25% di Kabupaten Pasir. Hal ini menunjukkan bahwa investor tidak sepenuhnya siap untuk segera merealisasikan pengembangan perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut. Bahkan di beberapa daerah banyak investor yang izin lokasinya dicabut, akibat ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan izin lokasi. Kurang seriusnya sebagian investor dalam memanfaatkan lahan yang sudah dikuasainya, kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi krisis (kekurangan modal), atau karena hanya ingin memanfaatkan kayu di lahan tersebut, yang dianggap lebih cepat meraih keuntungan dibandingkan membangun perkebunan kelapa sawit.

Sebagian lahan yang sudah memiliki izin lokasi juga merupakan hutan yang dikonversikan ke perkebunan. Pengembangan besar-besaran perkebunan kelapa sawit yang banyak dilakukan dengan konversi lahan hutan menjadi perkebunan (termasuk Kaltim), mengundang kritik dari para aktivis lingkungan, karena dianggap sebagai ancaman terhadap tutupan hutan di Indonesia. Pemanfaatan lahan hutan untuk perkebunan tersebut juga telah meningkatkan konflik sosial antara perusahaan-perusahaan besar dengan masyarakat lokal di sekitarnya. Meskipun Kalimantan Timur dan daerah lain

di Indonesia Timur masih memiliki hutan konversi untuk perkebunan, banyak perusahaan besar yang memanfaatkan kawasan hutan produksi untuk perkebunan kelapa sawit, sehingga semakin menguatkan dugaan adanya pemanfaatan lahan konsesi HPH untuk perkebunan kelapa sawit. Data di Kaltim menunjukkan sekitar 168.848 Ha lahan hutan telah dikonversikan ke perkebunan kelapa sawit (Casson, 2003:292). Keengganan investor untuk pengembangan kelapa sawit di luar Sumatera (termasuk Kaltim), memungkinkan penyimpangan dalam pemanfaatan hutan konversi untuk pengambilan kayu, sehingga pengembangan kelapa sawit terhambat. Hasil studi dari Pusat Penelitian Hutan Internasional (CIFOR), menunjukkan bahwa para investor menghadapi kendala dalam merealisasikan pengembangan kelapa sawit sesuai dengan rencana besar daerah, karena dua faktor utama yaitu konflik sosial dan lemahnya infrastruktur (Casson, 2000). Salah satu faktor yang menyebabkan prospek kelapa sawit di Kaltim dianggap tidak secerah Sumatera, adalah faktor iklim dan kondisi lahan yang umumnya dianggap kurang kondusif untuk membudidayakan kelapa sawit. Berdasarkan peta kesesuaian lahan untuk kelapa sawit, Kaltim masih memiliki lebih dari separuh lahan perkebunan yang berpotensi baik (3.794.100 Ha), selebihnya berpotensi sedang (329.900 Ha) dan rendah (2.416.800 Ha) (Disbun Kaltim, 2003).

Maraknya berbagai tuntutan atas tanah adat akhir-akhir ini juga terjadi pada lahan perkebunan kelapa sawit., baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan perusahaan. Kasus 'perebutan' kebun inti sawit milik PTPN 13 seluas 2000 Ha di Kabupaten Pasir oleh masyarakat lokal, dianggap suatu 'petaka' bagi Pasir, karena proses penyelesaiannya yang lama (sekitar 20 bulan), melibatkan masyarakat luas (10 desa dan 3 kecamatan), dan menimbulkan kerugian ekonomi yang relatif besar bagi semua pihak (Kompas, 2001). Kasus-kasus konflik yang terkait dengan peninjauan status tanah perkebunan, potensial dapat menghambat investor untuk perkembangan perkebunan di kawasan ini. Dikuatirkan apabila kasus demikian terus berlangsung, akan dapat mengganggu prospek pengembangan perkebunan kelapa sawit di Pasir dan Kaltim pada umumnya. Diperlukan antisipasi dan penyelesaian kasus secara bijaksana oleh Pemda dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat adat.

### *Ketersediaan benih unggul*

Pada saat ini Malaysia dengan luas lahan perkebunan 3,6 juta Ha dapat menghasilkan sekitar 13,4 juta ton CPO per tahun, sementara Indonesia dengan luas lahan sekitar 4,2 juta Ha, hanya menghasilkan 10,6 juta ton CPO per tahun. (Republika, 2004). Salah satu penyebab rendahnya



produktivitas kelapa sawit Indonesia dibandingkan Malaysia adalah faktor keaslian bibit, terutama untuk perkebunan rakyat. Di sinyalir terdapat sekitar 10% lahan sawit yang menggunakan benih palsu..Padahal penggunaan benih unggul kelapa sawit berperan penting dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Tanpa benih unggul, kelapa sawit tidak berbuah, atau berbuah kecil, dengan cangkang besar, sehingga merugikan petani dan pengusaha umumnya.

Sejalan dengan perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, permintaan akan benih unggul juga meningkat pesat, sehingga pasokan benih ke daerah sering terganggu. Selama ini benih unggul untuk kebutuhan perkebunan kelapa sawit secara nasional diperoleh dari ke 3 perusahaan yang sudah berpengalaman yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Soefindo dan P.T. London Sumatera (LonSum) yang berlokasi di Sumatera Utara. Untuk menutupi kekurangan persediaan bibit unggul Indonesia juga mengimport benih unggul dari Negara lain seperti Malaysia dan Papua Nugini.

Terbatasnya suplai dalam negeri dibandingkan kebutuhan bibit unggul selama ini, berdampak terhadap beredarnya banyak bibit palsu yang diusahakan secara liar oleh petani. Untuk menjaga kualitas produksi, PPKS bekerja sama dengan Disbun setempat bertindak tegas dengan membakar bibit liar dan menggantinya dengan bibit asli, serta pengedarnya ditangkap. Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan ketersediaan benih unggul adalah kemudahan dalam memperoleh, ketepatan waktu dan harga yang terjangkau. Untuk mengatasi ketersediaan benih unggul di daerah, diperlukan kemudahan untuk pengembangan perusahaan penghasil benih unggul di lokasi perkembangan kelapa sawit, sehingga keterlambatan dan kekurangan benih dapat diminimalisir. Kini di Kabupaten Pasir, terutama di Desa Padang Jaya sudah mulai dirintis pengembangan bibit unggul oleh seorang petani (pendatang) bekerja sama dengan PPKS Medan. Usaha pembibitan ini dinamakan : Penangkar Bibit Waralaba PPKS Medan, dengan pembinaan dari petugas Disbun Kabupaten Pasir. Pada saat ini usaha pembibitan menyerap tenaga kerja sebanyak 6 orang, 4 diantaranya adalah perempuan, dengan status buruh lepas dan upah Rp 20.000 (setengah hari). Pemasaran bibit tersebut sampai saat ini tidak ada masalah, terutama untuk perkebunan swadaya masyarakat dan untuk peremajaan kebun. Namun untuk pemasaran selanjutnya, persyaratan yang harus dipenuhi adalah mendapat sertifikasi dari PPKS Medan, mendapat izin dari Dinas Perkebunan Pasir dan berbadan hukum (bekerja sama dengan KUD setempat).

### 5.3.2 Kebijakan pemerintah dan sistem birokrasi

Era otonomi daerah (OTDA) telah memberi kewenangan lebih besar bagi daerah untuk memilih dan mengembangkan potensi daerah sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan daerah. Kabupaten Pasir dan beberapa daerah di Kaltim telah menetapkan komoditi kelapa sawit sebagai primadona untuk menjadi penghasil utama PAD. Selama ini banyak investor dianggap enggan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di luar Sumatera, antara lain karena kelemahan infrastruktur di Kalimantan pada umumnya. Padahal untuk memperoleh hasil yang optimal, pengembangan kelapa sawit memerlukan penyediaan infrastruktur yang dapat mendukung ketepatan waktu dalam proses pengangkutan TBS sampai ke pabrik CPO. Meskipun dalam kebijakan pembangunan daerah, peningkatan infrastruktur menjadi salah satu prioritas, namun masih diperlukan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Tantangan ke depan adalah mampukah Pemda menetapkan kebijakan yang kondusif bagi investor, sekaligus mampu menjadikan kelapa sawit Pasir sebagai komoditi yang kompetitif di pasar global.

Kendala lain dalam pengembangan pengelolaan kelapa sawit di Pasir dan Kaltim umumnya adalah kendala birokrasi yang menyulitkan daerah dalam pemberian izin terhadap investor. Dengan OTDA, izin untuk pengelolaan perkebunan berada di daerah, sementara pemerintah pusat masih menguasai izin pengelolaan hutan untuk konversi. Peraturan-peraturan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN, seringkali tidak sesuai dengan perkembangan OTDA yang memberi kewenangan lebih besar pada daerah untuk mengelola SDA di daerahnya. Di Kabupaten Pasir, Pemda menghadapi masalah dengan pengembangan pabrik CPO yang sangat dibutuhkan untuk menampung hasil yang makin meningkat. Sementara peraturan dari pusat masih mengikat daerah dengan keharusan adanya kebun inti sebagai prasyarat pendirian pabrik CPO. Untuk kasus Pasir, dimana pengembangan kelapa sawit dengan pola PIR-swadaya yang melibatkan perkebunan rakyat, sulit dipenuhi, sehingga menjadi kendala dalam pengembangan ke depan.

#### *Potensi pasar dan daya saing : domestik dan global.*

Kelapa sawit di Indonesia mempunyai prospek yang cerah, karena didukung oleh pasar yang prospektif baik domestik maupun global. Meningkatnya permintaan CPO dan minyak kelapa sawit baik domestik maupun global, merupakan modal penting dalam pengembangan industri kelapa sawit dari hulu ke hilir. Peluang Indonesia dalam menguasai pasar ekspor juga didukung

oleh daya saing yang cukup kompetitif dibandingkan minyak nabati lain. Daya saing Indonesia juga didukung oleh proses produksi CPO yang efisien, karena beberapa faktor seperti potensi panen sepanjang tahun, kondisi lahan dan tenaga kerja yang relatif murah.

Dalam merealisasikan kebijakan perkebunan yang berorientasi pasar, maka pilihan terhadap pengembangan kelapa sawit sebagai primadona pembangunan Pasir adalah tepat, karena komoditi ini memiliki peluang pasar yang besar, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor. Namun semakin banyak produksi dalam negeri, persaingan pasar semakin ketat, sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih profesional. Pasir seperti daerah lain di luar Sumatera, masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan daya saing kelapa sawit baik di pasar domestik maupun global. Realitas yang dihadapi oleh Pasir dan Kaltim pada umumnya antara lain: kondisi lahan, ketersediaan benih unggul di daerah, penetapan harga pasar yang masih didominasi PTPN, serta tidak adanya skim kredit untuk usaha perkebunan dengan bunga murah, sehingga perkembangan usaha menjadi lambat. Kelangkaan dana untuk pembangunan perkebunan yang berkesinambungan akan berdampak pada keberlangsungan banyak kebun plasma yang membutuhkan replantasi dalam waktu dekat. Kebijakan harga selama ini yang kurang menguntungkan petani dan produktivitas yang relatif rendah di Pasir, berpengaruh terhadap kemampuan petani untuk pengembangan perkebunan rakyat yang dimiliki saat ini. Meskipun harga inti sawit mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir, namun pada umumnya masih lebih rendah daripada harga yang ditetapkan untuk daerah Sumatera Utara, yang dianggap memiliki kualitas terbaik di Indonesia. Diperlukan kebijakan untuk mengatasi tantangan tersebut, agar keberlangsungan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit yang ditargetkan dapat tercapai. Melihat peran strategis kelapa sawit dalam perekonomian Pasir, maka prospek penyerapan tenaga kerja di sub- sektor kelapa sawit maupun sektor lainnya, sangat ditentukan oleh keseriusan pemda dalam mengelola komoditi tersebut, sehingga potensi pasar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

### *Kesiapan sumber daya manusia*

Kualitas SDM merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kelapa sawit. Kabupaten Pasir dan Kaltim umumnya memiliki SDM yang relatif rendah baik dari segi pendidikan maupun pengalaman dalam pengelolaan kelapa sawit. Pengembangan kelapa sawit di Pasir yang dikaitkan dengan pola PIR-BUN, merupakan

langkah penting dalam memberdayakan masyarakat mengenal kultur perkebunan sawit.

Masyarakat lokal yang semula tidak tertarik dan tidak mengenal kultur perkebunan kelapa sawit, kemudian berubah setelah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir yang dikelola oleh PTPN, mulai menghasilkan pada tahun 1990 an. Peningkatan kondisi sosial ekonomi yang dialami oleh sebagian petani plasma (umumnya pendatang), menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat lokal di sekitarnya. Hal ini mendorong Pemda untuk memperluas perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-Swadaya yang melibatkan lahan milik masyarakat lokal. Bahkan kasus konflik tanah yang menghasilkan perubahan penguasaan kebun inti milik PTPN menjadi kebun plasma milik masyarakat lokal, merupakan indikasi adanya perubahan animo masyarakat luas untuk terlibat dalam pengelolaan kebun sawit. Hal ini merupakan peluang bagi Pemda untuk meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam program pengelolaan kelapa sawit selanjutnya, sehingga dalam jangka panjang dapat menggantikan dominasi pola PIR-BUN di kawasan tersebut. Data proyeksi pengembangan areal perkebunan kelapa sawit untuk mencapai target sejuta ha, menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran komposisi tersebut, yaitu luas perkebunan rakyat diprediksikan mencapai 4 kali lipat dari luas areal kelapa sawit milik PTPN. Sedangkan dominasi perkembangan kelapan sawit tetap pada pola PBS, yang menguasai sekitar 80% lahan perkebunan..

Animo masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan kelapa sawit, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDMnya, agar hasil produksi sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan pasar. Dalam Propeda Kabupaten Pasir 2001-2005, kebijakan pemberdayaan masyarakat perkebunan dilakukan melalui upaya pengembangan SDM dan penguasaan IPTEK seperti pendidikan, dan pelatihan'.dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan ini diperlukan agar masyarakat lokal dapat berkompetisi secara sehat dengan pendatang yang relatif lebih berpengalaman. Hal ini dapat berdampak mengurangi keraguan investor dalam melibatkan masyarakat lokal yang selama ini dianggap tidak cocok untuk pengembangan kelapa sawit. Di samping itu keterlibatan masyarakat lokal dalam PIR-Swadaya juga berpotensi mengurangi konflik akibat kecemburuan sosial dengan pendatang. Tantangan ke depan bagi Pemda dalam pengembangan SDM adalah perlunya peningkatan koordinasi baik antar sektor terkait seperti sektor pendidikan, perkebunan dan tenaga kerja, maupun antara pemerintah (Disbun ) dengan pihak pengusaha. Kegagalan dalam meningkatkan kualitas SDM, akan berpengaruh terhadap produktivitas dan daya saing kelapa sawit, sehingga dapat prospek penyerapan tenaga kerja akan terhambat.

#### 5.4. Kesimpulan

Keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di suatu wilayah sangat terkait dengan kondisi dan peran berbagai pihak seperti petani, perusahaan, koperasi, dan pemda. Peran yang saling terkait dari berbagai pihak ini memerlukan sinergi untuk dapat menopang keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di kawasan tersebut, sehingga prospek penyerapan tenaga kerja juga dapat dipertahankan. Pihak Pemda berkepentingan untuk menjaga keberlangsungan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian dari perencanaan pembangunan khususnya sub-sektor perkebunan. Sektor ini merupakan salah satu sumber ekonomi utama daerah serta menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Dalam era otonomi daerah peran Pemda sangat strategis dalam menciptakan situasi yang kondusif di wilayahnya, sehingga para investor tertarik untuk merealisasikan rencana perkebunan dan mempertahankan keberlangsungan pengelolaan perkebunannya. Keterpaduan berbagai pihak dalam menjalankan fungsi masing-masing, merupakan prasyarat bagi keberlangsungan pengelolaan perkebunan kelapa sawit, sehingga prospek penyediaan kesempatan kerja di wilayah tersebut tetap terjamin.

Potensi perkembangan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Pasir cukup besar, karena potensi pasar yang luas (domestik dan global), potensi lahan yang tersedia serta dukungan kebijakan pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten. Namun demikian untuk merealisasikannya daerah masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: keterbatasan benih unggul; kualitas SDM dan adat budaya, daya saing produk di pasar domestik dan global dan kendala birokrasi dan ancaman menipisnya tutupan hutan akibat konversi hutan untuk perkebunan..

Peluang pasar CPO dan minyak goreng, masih terbuka baik untuk domestik maupun global. Namun demikian potensi untuk perkembangan pabrik pengolahan hasil dipengaruhi terutama oleh kebijakan pemda, kualitas SDM dan kesiapan infrastruktur sebagai penunjang industri hilir. Kecenderungan pengembangan industri hilir nasional yang terlanjur bersifat oligopolistik, telah menciptakan sekelompok pengusaha konglomerat yang menguasai jaringan pemasaran sampai ke pelosok desa. Hal ini menyulitkan daerah dalam upaya pengembangan industri hilir yang mampu bersaing dengan para pemodal besar.

Pembagian wewenang yang tidak jelas tentang pemanfaatan lahan, terutama yang terkait dengan lahan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Ketidakjelasan kewenangan ini akan mempersulit investor dalam pengurusan izin untuk pengembangan kelapa sawit.

Kelemahan koordinasi antar sektor terkait dengan pengembangan kelapa sawit (perkebunan, pertanian, kehutanan, dan perindustrian), potensial menjadi hambatan bagi percepatan perkembangan perkebunan kelapa sawit di daerah.

Adanya pengakuan undang-undang terkait dengan hak ulayat atau tanah adat yang belum jelas aturan pelaksanaannya, potensial menimbulkan konflik status tanah antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan perusahaan . Ketidakjelasan sejarah dan kriteria tanah adat dan belum adanya aturan yang rinci, sangat menyulitkan pelaksanaan di lapangan. Hal ini akan mengurangi rasa aman dan nyaman para investor dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kemudahan izin yang diharapkan investor dengan dilaksanakannya OTDA juga akan terhambat oleh penyalahgunaan hak adat oleh berbagai kelompok kepentingan.

Peraturan pusat yang berkaitan dengan pengelolaan perkebunan oleh BUMN, antara lain dalam hal pendirian pabrik pengolahan CPO yang memsyaratkan adanya kebun inti dan penentuan harga kelapa sawit, seringkali berbenturan dengan kepentingan daerah dalam upaya pengembangan industri kelapa sawit dari hulu ke hilir. Kebutuhan untuk menambah industri pengolahan CPO di Kabupaten Pasir dengan mengikutsertakan perusahaan swasta, sulit dilaksanakan karena pola PIR-Swadaya yang dikembangkan Pemda tidak memiliki kebun inti.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir telah menghasilkan komposisi penduduk yang majemuk, yaitu meningkatnya jumlah etnis pendatang terutama dari Jawa..Dampak positif dari program ini adalah berkembangnya perkebunan kelapa sawit di Pasir melalui pola PIR-Swadaya, yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pemilik lahan. Penyerapan tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit sangat tergantung pada keberlangsungan dan pengembangan kelapa sawit sesuai dengan target yang ingin dicapai. Keseriusan Pemda dalam menjaga kontinuitas perkebunan dan upaya mencapai target pengembangan, berperan penting dalam memperluas penyerapan tenaga kerja di wilayahnya.

Pengelolaan komoditi kelapa sawit potensial menyerap tenaga kerja besar baik melalui perluasan perkebunan kelapa sawit maupun melalui perkembangan industri hilir (agroindustri terkait). Pengelolaan perkebunan yang tidak optimal selain berpengaruh terhadap hasil produksi, juga menciptakan pengangguran dan setengah pengangguran, baik bagi petani maupun keluarganya. Hal ini dipengaruhi oleh

terbatasnya kesempatan kerja lain di sekitar lokasi, yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani sawit pada umumnya. Prospek agro-industri terkait dengan kelapa sawit di Kabupaten Pasir, masih sangat terbatas pada pengolahan minyak sawit mentah (CPO), padahal pengembangan industri hilir lainnya, seperti minyak goreng di daerah lain mampu memberi nilai tambah yang positif bagi kesejahteraan petani dan mengurangi tingkat pengangguran di kawasan tersebut.

Jumlah dan kualitas produk sangat dipengaruhi oleh profesionalisme SDM baik di tingkat birokrasi maupun petani. Keteringgalan SDM lokal juga akan berpengaruh terhadap keberlangsungan pengembangan kelapa sawit. Semakin banyak daerah menghasilkan kelapa sawit, persaingan pasar kelapa sawit akan semakin ketat baik di tingkat domestik maupun global. Untuk itu dibutuhkan pemberdayaan bagi petani, sehingga dapat mengelola perkebunan secara profesional. Upaya menyatukan luaran sekolah kejuruan dengan penyerapan tenaga kerja belum nampak, karena ketidak pastian peluang kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.. Koordinasi antar instansi terkait dibutuhkan sehingga peningkatan SDM dapat dimanfaatkan sesuai dengan penciptaan lapangan kerja baik di perkebunan kelapa sawit maupun industri pengolahan hasil.





### 6.1. Kesimpulan

Tanaman kelapa sawit merupakan komoditi unggulan bagi Propinsi Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Pasir sehingga pengembangan sub sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu prioritas bagi pembangunan di wilayah ini. Kabupaten Pasir memiliki potensi yang cukup besar bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2002, lebih dari separuh luas areal perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur, terdapat di Kabupaten Pasir termasuk Penajam Paser Utara (sekitar 64.059,5 Ha). Sebagai komoditi unggulan, perkebunan kelapa sawit menjadi andalan bagi perekonomian di Kabupaten Pasir, yang diindikasikan dengan besarnya sumbangan komoditi ini terhadap PDRB Kabupaten Pasir. Pengembangan kelapa sawit juga didukung oleh ketersediaan sumber daya lahan, sumber daya manusia, dan kebijakan daerah.

Perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir dapat dikelompokkan atas : 1) Perkebunan Rakyat; 2) Perkebunan Negara; dan 3) Perkebunan Besar Swasta (PBS). Berdasarkan luas areal, sebagian besar perkebunan kelapa sawit adalah perkebunan milik rakyat yang pengelolaannya terkait dengan pola PIR-BUN, PIR-Swadaya dan swadaya murni. Sebagai perusahaan inti untuk pola PIR-BUN adalah PTPN XIII dan sebagai plasma adalah petani yang sebagian besar merupakan transmigran dari Jawa. Salah satu lokasi PIR-BUN adalah Desa Padang Jaya yang melibatkan 350 KK, sebagian besar adalah transmigran dari Pulau Jawa, sebagai lokasi survey. Sedangkan untuk PIR-Swadaya, hampir semua yang terlibat adalah petani masyarakat local. Adapun pembinaan PIR-Swadaya dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan, dan dana dari APBD I (Propinsi) dan APBD II (Kabupaten). Dalam visi pembangunan daerah, pemerintah Propinsi Kalimantan Timur merencanakan pengembangan perkebunan kelapa sawit seluas 1 juta hektar dalam waktu 15 tahun (2003-2018).

Pengelolaan perkebunan kelapa sawit, yang meliputi usaha perkebunan dan pengolahan hasil mempunyai potensi yang cukup besar baik dalam penyerapan tenaga kerja, maupun meningkatkan kesejahteraan petani. Diperkirakan perkebunan kelapa sawit mampu menyerap sekitar 2 orang per kapling (2Ha), sehingga untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir diperkirakan pada tahun 2002 dapat menyerap sekitar 32.000 keluarga petani (dengan perkiraan 2 Ha untuk tiap keluarga). Apabila diperkirakan

setiap keluarga mempunyai tanggungan 3-4 orang ART, maka sekitar 96.000-128.000 jiwa penduduk menggantungkan hidup dari hasil kelapa sawit. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perkebunan kelapa sawit akan meningkat seiring dengan perluasan perkebunan kelapa sawit, sesuai dengan visi pembangunan daerah. Namun demikian dari luas lahan perkebunan yang telah memperoleh ijin untuk pembukaan kelapa sawit, baru sekitar 25 % yang sudah terealisasi penanamannya. Hal ini disebabkan banyak investor yang menyalahgunakan ijin lokasi untuk pemanfaatan selain kelapa sawit, seperti pengambilan kayu pada lahan HPH. Faktor lainnya adalah berkaitan dengan isu hak ulayat yang akhir-akhir ini berpengaruh terhadap kepemilikan lahan kelapa sawit (kasus 10 desa). Keadaan ini potensial menjadi kendala bagi masuknya investor di perkebunan kelapa sawit.

Potensi penyerapan tenaga kerja dapat diharapkan lebih besar dari pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit, seperti industri pengolahan CPO dan turunannya antara lain pabrik minyak sawit, mentega, sabun dan olein. Di wilayah ini, penyerapan tenaga kerja berkaitan dengan pengolahan hasil kelapa sawit, masih terbatas pada industri pengolahan CPO, yang jumlahnya sangat terbatas dibandingkan kebutuhannya. Penyerapan tenaga kerja di pabrik CPO akan meningkat sejalan dengan terealisirnya rencana pemda kabupaten untuk menambah sekitar 3 buah industri CPO. Terhambatnya realisasi pendirian pabrik CPO di Kabupaten Pasir, berkaitan dengan peraturan yang mensyaratkan adanya kebun inti untuk setiap pabrik. Hal ini kurang sesuai dengan kondisi di lokasi, karena hasil kelapa sawit dari PIR-Swadaya dan PIR-BUN pada saat penelitian, sudah melebihi daya tampung dari 3 buah pabrik CPO yang tersedia di lokasi (oleh PTPN). Dalam hal ini peraturan yang ada kurang mendukung penciptaan lapangan kerja terkait dengan pengolahan hasil kelapa sawit, khususnya CPO. Permasalahan ini dapat menjadi kendala dalam peningkatan kesejahteraan petani sawit, karena penetapan harga yang kurang menguntungkan petani.

Sebaliknya industri pengolahan CPO, perlu mendapat dukungan dari hasil produksi perkebunan kelapa sawit yang tergantung pada keberlangsungan perkebunan yang ada dan umur tanaman. Pada saat ini produksi tanaman kelapa sawit cenderung menunjukkan penurunan, seiring dengan umur tanaman yang semakin tua dan memerlukan peremajaan dalam waktu dekat (4-5 tahun). Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pendapatan yang diperoleh petani plasma kurang mendukung untuk melakukan peremajaan yang semakin dekat. Keadaan ini dapat mengganggu keberlangsungan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO yang ada.

CPO sebagai komoditi strategis selain sumber penghasil devisa, juga merupakan bahan dasar minyak goreng yang banyak dikonsumsi dalam negeri. Industri minyak goreng sangat penting karena bersifat padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Pada tahun 1997 industri minyak sawit di Indonesia telah mampu menyerap lebih dari 2 juta tenaga kerja. Potensi penyerapan tenaga kerja pada usaha pengolahan hasil lanjutan (turunan) seperti minyak goreng cukup besar, baik dilihat dari penciptaan lapangan kerja maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian pendirian industri pengolahan tersebut belum didukung oleh iklim investasi yang kondusif bagi masuknya investor dalam bidang tersebut. Beberapa faktor yang dianggap sebagai kendala antara lain terbatasnya infrastruktur, pasar masih terpusat di Jawa, dan saingan yang berat dari pabrik yang sudah ada.

Petani yang pada umumnya berumur produktif, namun tidak diimbangi dengan ketrampilan ataupun tingkat pendidikan yang ditamatkan. Tingkat pendidikan petani pada umumnya relatif masih rendah sehingga secara tidak langsung dapat memperlambat adopsi teknologi. Adopsi teknologi bagi petani penting karena dalam kegiatan perkebunan memerlukan pelatihan-pelatihan yang belum pernah diperoleh di daerah asal. Sedangkan latar belakang ketrampilan yang dimiliki di daerah asal berbeda, petani terbiasa mengolah lahan lahan pangan. Dilain pihak generasi berikutnya (anak-anak petani) tidak berminat untuk menjadi petani kelapa sawit meskipun sekolah kejuruan sudah tersedia di kabupaten, tetapi mereka lebih berminat menjadi karyawan pada perusahaan swasta.

Kegiatan petani tentang pengelolaan kebun kelapa sawit terutama dalam hal pemeliharaan, sejak awal tidak sesuai dengan standar pengelolaan yang benar dan profesional. Hal ini disebabkan karena pembinaan dari petugas perusahaan inti yang kurang profesional. Pemeliharaan yang tidak efektif ini terutama dalam hal pemupukan yang mengakibatkan rendahnya hasil produksi kebun sawit. Rendahnya hasil produksi ini juga dipengaruhi oleh faktor alam dan kondisi kesuburan tanah di Kalimantan Timur. Rendahnya hasil produksi TBS ini yang akhirnya juga mengakibatkan rendahnya penghasilan mereka yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan petani. Guna mencukupi kebutuhan keluarga ini, strategi yang mereka terutama adalah ke koperasi petani kelapa sawit (KUD). Hal ini juga dipengaruhi oleh terbatasnya kesempatan kerja lainnya diluar perkebunan kelapa sawit, sehingga menyulitkan petani untuk menambah penghasilannya. Demikian juga luas kebun plasma 2 Ha tiap keluarga dipertanyakan kecukupannya dalam memenuhi kebutuhan petani termasuk untuk *replanting*.

Keberlangsungan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir sangat terkait dengan kondisi dan peran berbagai pihak (diperlukan sinergi) dari berbagai pihak seperti petani, perusahaan, koperasi dan Pemda, sehingga prospek penyerapan tenaga kerja juga terjamin. Petani diharapkan mampu mengelola kebun kelapa sawit secara profesional sehingga hasil produksi optimal. Dengan demikian petani dapat meningkatkan kesejahteraan hidup sekaligus mampu melakukan *replanting* tepat pada waktunya. Sedangkan perusahaan sebagai penampung hasil produksi mempunyai peranan penting dalam penetapan harga. KUD sebagai koperasi petani juga memiliki peranan penting dalam membantu kelancaran usaha tentang pemasaran hasil produksi ke perusahaan pengolahan, selain itu juga dalam hal penyediaan kebutuhan petani. Dilain pihak pemda berperan dalam menjaga keberlangsungan perkebunan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, karena sub sektor perkebunan merupakan salah satu sumber ekonomi daerah serta penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir memiliki potensi yang cukup besar, hal ini didukung oleh potensi pasar baik domestik maupun global, dukungan luas lahan, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten maupun propinsi. Namun tantangan ini masih belum terealisasi karena masih menghadapi berbagai masalah antara lain kualitas SDM, adat dan budaya, daya saing produk di pasar nasional dan global, keterbatasan bibit unggul, kendala birokrasi serta ancaman pelestarian lingkungan karena meningkatnya konversi hutan untuk perkebunan. Prospek agro industri terkait dengan kelapa sawit di Kabupaten Pasir, masih sangat terbatas pada pengolahan minyak sawit mentah (CPO), padahal pengembangan industri hilir lainnya, seperti minyak goreng di daerah lain mampu memberi nilai tambah yang positif bagi kesejahteraan petani dan mengurangi tingkat pengangguran di kawasan tersebut.

Undang-undang yang berkaitan dengan hak ulayat dan tanah adapt belum diakui keberadaannya oleh pemerintah. Hal ini akan mengurangi rasa aman bagi investor dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Selain itu adanya penyalahgunaan hak adat oleh berbagai kelompok juga menghambat para investor dalam hal perijinan, terutama dalam pelaksanaan OTDA. Sedangkan peraturan pemerintah pusat mengenai pengelolaan perkebunan oleh BUMN dalam hal pendirian pabrik pengolahan CPO dan penetapan harga, berbenturan dengan kepentingan daerah tentang pengembangan perkebunan kelapa sawit. Peraturan pemerintah pusat mensyaratkan investor yang akan mendirikan pabrik mengharuskan memiliki perusahaan inti, dilain pihak daerah dengan berkembangnya perkebunan PIR Swadaya membutuhkan pabrik pengolahan hasil kelapa sawit (CPO).

## 6.2. Implikasi Kebijakan

1. Perlunya Pemda untuk mengupayakan perkembangan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan target yang ditentukan. Dan perlunya koordinasi peran berbagai pihak terkait secara sinergi, antara lain perusahaan, petani, birokrasi. Koordinasi dan sinergi berbagai pihak akan berdampak positif terhadap perbaikan harga, pembinaan petani yang profesional.
2. Perlunya Pemda membantu petani plasma melalui program dari pemerintah (ekonomi kerakyatan) dengan jalan memberi kemudahan kredit untuk *replanting* atau menyediakan kesempatan kerja diluar perkebunan kelapa sawit.
3. Perlunya dilakukan penyesuaian peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kelapa sawit sehingga memudahkan Pemda dalam merealisasikan perkembangan perkebunan kelapa sawit, antara lain mempercepat realisasi pendirian pabrik CPO dan kepastian hukum tentang penguasaan lahan perkebunan baik untuk investor maupun petani.
4. Perlunya Pemda untuk memfasilitasi kemudahan bagi KUD dalam menyediakan pupuk dengan harga pabrik, mengingat pabrik pupuk ada di Propinsi Kalimantan Timur. Hal ini penting agar petani dapat memperoleh pupuk dengan harga terjangkau. Dengan kemudahan ini diharapkan petani dapat meningkatkan minat pemeliharaan kebun kelapa sawit sehingga produksi meningkat.
5. Perlunya mengarahkan sisetim pendidikan kejuruan, dalam hal ini perkebunan yang dapat menarik minat anak-anak muda untuk menjadi petani yang profesional. Disamping itu dalam rangka pengembangan agro industri kelapa sawit perlu memasukkan pengembangan industri hilir kelapa sawit, hal ini sangat diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja terutama angkatan muda yang terdidik.
6. Perlunya penegakan hukum untuk semua pihak terkait dengan pengelolaan kelapa sawit, sehingga pemanfaatan lahan dapat disesuaikan dengan ijin lokasi yang diberikan



## DAFTAR PUSTAKA

---

- Akatiga (1994)  
*Studi Pelaksanaan Pola PIR di Beberapa Jenis Perkebunan Indonesia*, Bandung: Akatiga.
- Andi Nuhung, Iskandar, DR,Ir (2003)  
*Perusahaan Inti Rakyat Dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan : Studi Kasus PIR-BUN Sumatra Selatan*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Arifin, Bustanul (2004)  
*Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Jakarta, Kompas.
- Arifin, Sultoni dan W. Susila (1998)  
*Indonesia as a Major Oil Palm Producer: Prospect and Challenges*, Bogor: Center for Economic Studies, Research and Development, Dept of Agriculture.
- BPS (2003)  
*Kabupaten Pasir Dalam Angka, 2002*, Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- BPS (2002)  
*Kalimantan Timur Dalam Angka, 2001*, Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- BAPPEDA Kabupaten Pasir (2000)  
*Propeda Kabupaten Pasir 2001-2005*, Tanah Grogot: BAPPEDA.
- \_\_\_\_\_ (1999)  
*Sasaran dan Strategi Pengembangan*, Dalam Renstra Perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2000- 2003. Samarinda: Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur.
- Buku Kompas (2001)  
*Profil Daerah Kabupaten dan Kota, Jilid I*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- CASSON Anne (2000)  
*The Hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm Sub-Sektor in an Era of Economic Crisis and Political Change*, Bogor: CIFOR.

- \_\_\_\_\_ (2003)  
*'Politik Ekonomi Sub Sektor Perkebunan Kelapa sawit di Indonesia'*, dalam buku:  
: Bab 10: 273-299.
- Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir (2003)  
*Statistik Perkebunan Kabupaten Pasir Tahun 2002*, Pasir: Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir.
- Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur (2003)  
*Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pengembangan PIR-Swadaya di Kabupaten Pasir*, Pasir: Dinas Perkebunan Kabupaten.
- Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur, 2003.  
*Gambaran Singkat Pembangunan Perkebunan di Propinsi Kalimantan Timur*, laporan, Samarinda: Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur.
- Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur, 2003.  
*Laporan Bulanan Perkembangan Kegiatan PIR-Swadaya, Desember 2003*, Samarinda: Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur
- \_\_\_\_\_, 2003  
*'Sasaran dan Strategi Pengembangan'* dalam *Renstra Perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2000- 2003*. Samarinda, Disbun. Kaltim.
- √ Daliyo dkk (2000)  
*Pengembangan Ketenagakerjaan sub-sektor Ago Industri Kalimantan Timur: Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Global*, Jakarta: PPK-LIPI.
- Dewan Riset Nasional (2002)  
*'Peran Industri Manufaktur Sebagai Penghela Pembangunan Nasional Berkelanjutan Dengan SDA Sebagai Platform Berdasarkan Pendekatan Pengembangan IPTEK: Kasus Sawit sebagai Penggerak, Pemicu dan Pemacu Pembangunan IPTEK'*, *Ringkasan Rapat DRN Inti*, 5 Nopember 2002.
- Iqbal, M. Irfan (2000)  
*Budaya dan Sejarah Kerajaan Paser*, PT. BHP Kendilo Coal Indonesia dan Bina Lingkungan Hidup Indonesia, Kalimantan.



- Kompas (2003)  
*'Waspada! Perusakan Hutan Akibat Izin Kebun Sawit di Kalimantan'*, Jakarta: Kompas.
- \_\_\_\_\_ (2004)  
*'Melirik Sawit Sejuta Hektar'*, Jakarta: Kompas 30 Maret 2004.
- \_\_\_\_\_ (2004)  
*'Peladang Berpindah dan Kearifan Tradisional'*, Jakarta: Kompas 8 Oktober 2004.
- Kompas, 2001  
*Profil Daerah Kabupaten dan Kota, Jilid I. Jakarta*, Penerbit Buku Kompas.
- Pemda Kabupaten Pasir (2000)  
*Profil Rangan Barat I Kecamatan Kuaro*, Pasir.
- Purwono & Siregar (2004)  
*Para Perintis di Tanah Harapan*, Dalam Majalah Tempo Edisi 28 Juni - 4 Juli 2004, Jakarta: Majalah Tempo.
- PITONO, Djoko dkk. (2002)  
Tim Forum Kerja Manufaktur DRN
- Republika (2003)  
*10 Persen Lahan Sawit Gunakan Benih Palsu*, Jakarta: Republika.
- Rustiani, Frida dkk (1997)  
*Mengenal Usaha Pertanian Kontrak*, Bandung: Akatiga.
- Saryono Mukti (1996)  
*Perkembangan dan Prospek Kelapa Sawit Indonesia*, Dalam Media Perkebunan No. 13 Desember 1996, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman J. (2001)  
*Investasi Bidang Ketenagakerjaan untuk Membangkitkan Perekonomian Nasional*, Dalam Berita Iptek Th Ke 42. No 1, 2001, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

v Sumono (2002)

*Kualitas Petani Kelapa Dalam perspektif Kependudukan, Sosial Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara,*  
Jakarta: P2K-LIPI.

Yuliati, Yayuk, Ir. MS (2003)

*Sosiologi Pedesaan,* Malang: Lappera Pustaka Utama.